



**ANALISIS KINERJA KEUANGAN
DAN PENERAPAN PENGAKUAN PENDAPATAN
BERDASARKAN PSAK 72
PADA PROYEK PEMBANGUNAN *LIGHT RAIL TRANSIT* (LRT)
JABODEBEK PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK
TAHUN 2015-2022**

Skripsi

Dibuat Oleh :

Ayu Yulia
022119020

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JULI 2023

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN
DAN PENERAPAN PENGAKUAN PENDAPATAN
BERDASARKAN PSAK 72
PADA PROYEK PEMBANGUNAN *LIGHT RAIL TRANSIT* (LRT)
JABODEBEK PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK
TAHUN 2015-2022**

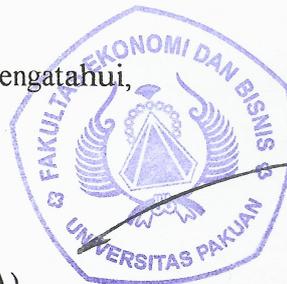
Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gerlar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pakuan Bogor

Mengatahui,

Dekan Fakultas Eknonomi dan Bisnis

(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., C.A)



Ketua Program Studi Akuntansi

(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA,
CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA., CFE., CGCAE)

**ANALISIS KINERJA KEUANGAN
DAN PENERAPAN PENGAKUAN PENDAPATAN
BERDASARKAN PSAK 72
PADA PROYEK PEMBANGUNAN *LIGHT RAIL TRANSIT* (LRT)
JABODEBEK PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK
TAHUN 2015-2022**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari : Jum'at, 28 Juli 2023

Ayu Yulia

022119020

Disetujui,

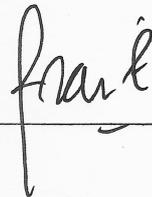
Ketua Penguji Sidang

(Amelia Rahmi, SE., M.Ak., AWP)



Ketua Komisi Pembimbing

(Tiara Timuriana, S.E, MM., CAP)



Anggota Komisi Pembimbing

(Dr, Siti Maimunah, S.E., M.Si., CPSP., CPMP., CAP)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ayu Yulia
NPM : 022119020
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Keuangan dan Penerapan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 pada Proyek Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2015-2022

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi diatas adalah benar karya saya dengan arahan dari ketua komisi pembimbing dan anggota komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan di cantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan Bogor.

Bogor, 28 Juli 2023



Ayu Yulia
022119020

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun
2023 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

Ayu Yulia, 022119020, Analisis Kinerja Keuangan dan Penerapan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 pada Proyek Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2015-2022. Dibawah bimbingan ibu Tiara Timuriana, SE, MM., CAP dan ibu Dr. Siti Maimunah, S.E., M.Si., CPSP., CPMP., CAP.

Pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 merupakan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan memberikan pedoman yang harus diikuti dalam menentukan kapan pendapatan harus dilaporkan dan bagaimana pendapatan diukur. Pada PSAK 72, pendapatan diakui oleh perusahaan ketika perusahaan telah melaksanakan kewajiban dengan mengalihkan barang atau jasa yang telah dijanjikan kepada pelanggan (aset). Pelanggan akan mendapatkan pengendalian atas aset ketika aset telah dialihkan. Dengan kata bahwa pendapatan baru akan diakui saat transaksi telah terjadi. Pengakuan pendapatan perusahaan dapat dilakukan setelah penyelesaian kontrak tersebut selesai dengan pelanggan dan terdapat pada laporan keuangan. Laporan keuangan mempunyai peran sangat penting dalam memberikan informasi keuangan pada suatu periode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu keuangan perusahaan. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban finansialnya dan menghasilkan pendapatan yang tinggi merupakan perusahaan yang sehat. Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dan maupun penyaluran dana yang diukur dengan *current ratio*, *debt to asset ratio* dan *net profit margin*.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan unit analisis penelitian adalah PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2022. Metode yang digunakan untuk menganalisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proyek infrastruktur PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada tahun 2015-2022 dilihat berdasarkan *current ratio*, *debt to asset ratio* dan *net profit margin* masing-masing dinilai kurang baik. Sedangkan Penerapan pengakuan pendapatan PSAK 72 pada Proyek Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2022 secara langsung berhubungan pada kontrak dengan pelanggan yang diakui perusahaan setelah kontrak proyek selesai dilakukan. Terjadinya kenaikan dan penurunan pengakuan pendapatan berdasarkan progress pencapaian proyek pembangunan LRT Jabodebek

Kata Kunci : Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72, Kinerja Keuangan, *Current Ratio*, *Debt to Asset Ratio* dan *Net Profit Margin*.

PRAKATA

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan yang berjudul **“ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAN PENERAPAN PENGAKUAN PENDAPATAN BERDASARKAN PSAK 72 PADA PROYEK PEMBANGUNAN *LIGHT RAIL TRANSIT* (LRT) JABODEBEK PT ADHI KARYA (PERSERO) TBK TAHUN 2015-2022”**

Adapun skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, Bogor.

Penulis menyadari bahwa dalam pembuatan skripsi ini penulis mendapatkan dukungan dan bantuan serta kritik yang membangun dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena atas rahmat, kuasa serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Orang tua penulis, Ayah dan Ibu. Terimakasih banyak atas tenaga, keringat, doa, dan pikiran untuk bakal, biaya, dan perjalanan hidup selama ini semoga anakmu ini dikemudian hari dapat membalas segala kebaikan yang telah kalian berikan.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., C.A. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
4. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA. selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
5. Ibu Tiara Timuriana, SE, MM., CAP. Selaku Dosen Pembimbing Satu yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan, saran dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
6. Ibu Dr. Siti Maimunah, S.E., M.Si., CPSP., CPMP., CAP. Selaku Dosen Pembimbing Dua yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan, saran dan memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti.
7. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha, dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
8. Kakakku “Azang Akmal” dan “Dissa Permana” kakak kandung. Terimakasih banyak atas doa, bantuan, motivasi, dan semangat kepada penulis mulai dari awal perjalanan hidup perkuliahan hingga sampai menyelesaikan tugas akhir
9. Teman-teman kelas A Akuntansi dan Konsentrasi Akuntansi Keuangan angkatan 19 yang telah memberikan saran-saran dan dukungannya dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini masih banyak sekali kekurangan, karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki. Semoga kekurangan tersebut dapat menjadi pembelajaran bagi penulis,

untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. penulis berharap penelitian ini dapat berguna bagi kita semua.

Bogor, 28 Juli 2023
Penulis,

Ayu Yulia

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR TELAH DISIDANGKAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN HAK PATEN	v
LEMBAR HAK CIPTA.....	vi
ABSTRAK	vii
PRAKATA	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi dan Perumusan Masalah	10
1.2.1. Identifikasi Masalah	10
1.2.2. Perumusan Masalah	11
1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian	11
1.3.1. Maksud Penelitian	11
1.3.2. Tujuan Penelitian.....	11
1.4. Kegunaan Penelitian	11
1.4.1. Kegunaan Praktis.....	12
1.4.2. Kegunaan Akademis	12
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Teori Sinyal (<i>Signalling Theory</i>).....	13
2.2. Kinerja Keuangan	14
2.2.1. Pengertian Kinerja Keuangan	14
2.2.2. Pengukuran Kinerja Keuangan.....	16
2.2.3. Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan.....	17
2.2.4. Tahapan Pengukuran Kinerja Keuangan	18
2.3. Laporan Keuangan.....	19
2.3.1. Pengertian Laporan Keuangan	19

2.3.2. Tujuan Laporan Keuangan	20
2.3.3. Komponen Laporan Keuangan	21
2.3.4. Karakteristik Laporan Keuangan	21
2.3.5. Analisis Laporan Keuangan.....	22
2.4. PSAK 72 Pengakuan Pendapatan dari Kontrak Pelanggan	23
2.4.1. Pengertian Pendapatan	23
2.4.2. Pengakuan Pendapatan	23
2.4.3. Proses Pengakuan Pendapatan	24
2.4.4. Pengakuan Pendapatan dari Kontrak Pelanggan (PSAK 72).....	26
2.4.5. Metode Pengakuan Pendapatan dari Kontrak Pelanggan (PSAK 72).....	27
2.5. Perusahaan Konstruksi	28
2.5.1. Pengertian Perusahaan Konstruksi	28
2.5.2. Jenis Proyek Konstruksi.....	29
2.5.3. Kontrak Konstruksi.....	29
2.5.4. Tahapan Kegiatan Proyek Konstruksi	30
2.6. Penelitian Sebelumnya	33
2.6.1. Penelitian Sebelumnya	33
2.6.2. Perbedaan dan Persamaan Penelitian	36
2.7. Kerangka Pemikiran	37
BAB III. METODE PENELITIAN.....	38
3.1. Jenis Penelitian.....	38
3.2. Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian.....	39
3.2.1. Objek Penelitian.....	39
3.2.2. Unit Analisis Penelitian.....	39
3.2.3. Lokasi Penelitian.....	39
3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian	39
3.3.1. Jenis Data.....	39
3.3.2. Sumber Data Penelitian	40
3.4. Variabel Penelitian	40
3.5. Metode Pengumpulan Data	40

3.5.1. Data Sekunder	40
3.6. Metode Analisis Data	40
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	43
4.1.1. Perkembangan dan Kegiatan Usaha	43
4.1.2. Visi, Misi dan Nilai Budaya PT Adhi Karya (Persero) Tbk	45
4.1.3. Struktur Organisasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk ...	46
4.2. Hasil Penelitian.....	49
4.2.1. Hasil Analisis Kinerja Keuangan pada Proyek Pembangunan <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Jabodebek PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2022.....	49
4.2.2. Hasil Analisis Penerapan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 pada Proyek Pembangunan <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Jabodebek PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2022	57
4.2.3. Hasil Analisis Kinerja Keuangan Mempengaruhi Penerapan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 pada Proyek Pembangunan <i>Light Rail Transit</i> (LRT) Jabodebek PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2022.....	67
BAB V. SIMPULAN DAN SARAN.....	70
5.1. Simpulan	70
5.2. Saran	71
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76
LAMPIRAN	77

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	: Partisipasi Sektor Konstruksi dalam Peningkatan Laba Bersih PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2015-2022.....	5
Tabel 1.1.	: Rincian Proyek Pembangunan Prasarana LRT Terintegrasi Wilayah Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2015-2022	9
Tabel 1.2.	: Rincian Proyek Pembangunan Jalan LRT Terintegrasi Wilayah Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2015-2022	9
Tabel 2.1	: Penelitian Terdahulu.....	33
Tabel 3.1	: Variabel Penelitian	40
Tabel 4.1	: Kinerja Keuangan yang Diprosikan dengan <i>Current Ratio</i> (CR) Tahun 2015-2022	50
Tabel 4.2	: Kinerja Keuangan yang Diprosikan dengan <i>Debt to Asset Ratio</i> (DAR) Tahun 2015-2022.....	52
Tabel 4.3	: Kinerja Keuangan yang Diprosikan dengan <i>Net Profit Margin</i> (NPM) Tahun 2015-2022.....	55
Tabel 4.4	: Progress Penyelesaian Kontrak Konstruksi Pembangunan Prasarana LRT Terintegrasi Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2015-2022.....	62
Tabel 4.5 :	Pendapatan, Biaya dan Laba Kotor dari Proyek Pembangunan Jalan LRT Terintegrasi Wilayah Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2015-2022	63
Tabel 4.6	: Progress Penyelesaian Kontrak Konstruksi Pembangunan Prasarana LRT Terintegrasi Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2015-2022.....	66
Tabel 4.7 :	Pendapatan, Biaya dan Laba Kotor dari Proyek Pembangunan Jalan LRT Terintegrasi Wilayah Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2015-2022	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2013-2022	1
Gambar 1.2 : Perkembangan <i>Current Ratio</i> , <i>Debt to Asset Ratio</i> , <i>Net Profit Margin</i> PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2015-2022.....	6
Gambar 2.1 : Kerangka Pemikiran	37
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk.....	46
Gambar 4.2 : Kinerja Keuangan yang Diproksikan dengan <i>Current Ratio</i> (CR) PT Adhi Karya (Persero) Tbk	52
Gambar 4.3 : Kinerja Keuangan yang Diproksikan dengan <i>Debt to Asset Ratio</i> (DAR) PT Adhi Karya (Persero) Tbk.....	54
Gambar 4.4 : Kinerja Keuangan yang Diproksikan dengan <i>Net Profit Margin</i> (NPM) PT Adhi Karya (Persero) Tbk.....	57
Gambar 4.5 : Progress Penyelesaian Kontrak Konstruksi Pembangunan Prasarana LRT Terintegrasi Jabodebek Tahun 2015-2022 ..	65
Gambar 4.6 : Progress Penyelesaian Kontrak Konstruksi Pembangunan Jalan LRT Terintegrasi Jabodebek Tahun 2015-2022.....	67

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Data Keuangan Segmen Infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2015- 2022.....	77
Lampiran 2 : Progress Penyelesaian Kontrak Konstruksi Pembangunan Prasarana LRT Terintegrasi Wilayah Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk.....	78
Lampiran 3 : Progress Penyelesaian Kontrak Konstruksi Pembangunan Jalan LRT Terintegrasi Wilayah Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk.....	80

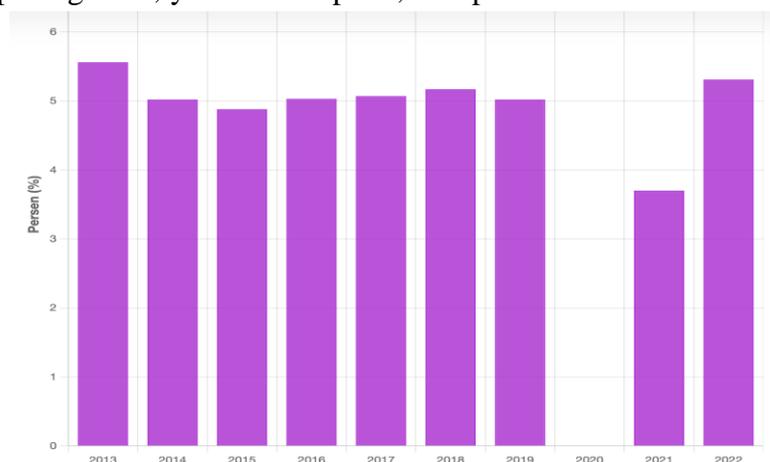
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perkembangan dunia bisnis di era globalisasi seperti sekarang ini menunjukkan pertumbuhan yang sangat pesat. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya perkembangan teknologi yang cepat dan kebijakan pemerintah. Banyak perusahaan yang tumbuh dan berkembang pada berbagai sektor usaha yang dijalani. Oleh karena itu perusahaan dituntut untuk melakukan inovasi serta kreatifitas agar mampu bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Berbagai cara dilakukan perusahaan agar dapat mempertahankan eksistensinya dan bisa memenangkan persaingan. Untuk itu, perusahaan harus memiliki perencanaan yang baik pada semua bidang yang dijalani.

Perkembangan dunia bisnis yang pesat memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi yang cukup stabil. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022 sebesar 5,31%, angka ini lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada 2021 sebesar 3,70%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2022 merupakan capaian tertinggi sejak tahun 2013 yang mencapai 5,56%. Tingginya pertumbuhan ekonomi tahun 2022 didukung oleh peningkatan persentase ekspor (16,28%) dan impor (14,75%). Pada tahun 2016, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,03%. Peningkatan terjadi dalam tahun 2017 yang mencapai 5,07%, tahun 2018 sebesar 5,17%, dan 2019 mengalami penurunan sehingga pertumbuhan ekonomi 5,02%. Angka pertumbuhan ekonomi merosot tajam hingga -2,07% pada 2020 yang diakibatkan adanya pandemi Covid-19 serta pembatasan sosial yang berdampak pada terbatasnya aktivitas perekonomian di Indonesia. Meskipun masih dalam kondisi pandemi, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami peningkatan, yakni mencapai 3,70% pada 2021.



Gambar 1.1 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2013-2022

Sumber: www.bps.go.id (2023)

Pertumbuhan perekonomian Indonesia tersebut sejalan dengan fenomena yang sedang terjadi yang berkaitan dengan percepatan pembangunan infrastruktur di era pemerintahan saat ini yang sedang gencar melakukan percepatan pembangunan infrastruktur Indonesia. Tujuan dari percepatan pembangunan infrastruktur ini yaitu memberikan konektivitas daerah satu dengan yang lainnya dan menciptakan perekonomian yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Pembangunan infrastruktur yang saat ini gencar dilakukan oleh pemerintahan berimbas pada pertumbuhan signifikan industri konstruksi dalam negeri. Industri konstruksi di Indonesia seakan bangkit dan berada di era baru yang menopang pembangunan. Berdasarkan data Pusat Pengembangan Infrastruktur Wilayah Nasional (BPIW) bahwa sepanjang tahun 2015 sampai dengan kuartal 3 tahun 2021 sektor konstruksi rata-rata berkontribusi 9,94% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Angka tersebut menempati peringkat ke-4 kontribusi terbesar terhadap PDB total Nasional di bawah sektor perdagangan besar, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, serta sektor industri pengolahan.

Umumnya di Indonesia perusahaan konstruksi terdiri dari Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMS merupakan badan usaha yang didirikan dan dimodali oleh seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan UUD 1945 pasal 33, bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau tidak menguasai hajat hidup orang banyak (wikipedia.org, 2018). Sedangkan BUMN Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan yang dipisahkan (wikipedia.org, 2018). BUMN memiliki suatu kelebihan, yaitu kemampuan yang memadai dalam mengerjakan proyek infrastruktur sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemerintah. Hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya keterlibatan BUMN pada proyek-proyek infrastruktur negara dibandingkan dengan kerjasama pemerintah dengan perusahaan konstruksi swasta. Oleh karena itu, hadirnya perusahaan BUMN dipercaya dapat memudahkan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Keuntungan tersebut dapat dilihat pada kinerja keuangan perusahaan yang mengalami pertumbuhan positif. Sejumlah perusahaan konstruksi BUMN membukukan kenaikan laba bersih sepanjang tahun di tengah proyek infrastruktur yang terus dikebut oleh pemerintah. Salah satu perusahaan konstruksi BUMN yang juga tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah PT. Adhi Karya (Persero) Tbk yang mencatatkan pertumbuhan laba bersih berdasarkan prognosa kinerja keuangan tahun 2022 sebesar Rp 81,24 miliar, capaian tersebut mengalami pertumbuhan 47,22% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp 55,18 miliar (www.adhi.co.id, 2023).

Pertumbuhan laba bersih tersebut dikarenakan beberapa proyek akan selesai sehingga perusahaan akan mendapatkan modal baru untuk membiayai proyek lainnya. Selain itu, perusahaan BUMN sektor konstruksi juga akan mendapatkan

keuntungan dari upaya pemerintah yang semakin gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Peningkatan tersebut tentunya juga akan memberikan dampak terhadap kinerja keuangan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk sektor konstruksi. Untuk mengetahui seberapa besar perubahan kinerja perusahaan, dapat mengukur dan menganalisis terhadap laporan keuangan yang dimiliki perusahaan sehingga dapat diketahui seberapa besar perubahan yang terjadi akibat dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan. Laporan keuangan pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk sektor konstruksi merupakan suatu informasi yang menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan dan lebih jauh informasi tersebut juga bisa mencerminkan kondisi kinerja keuangan perusahaan tersebut (Fahmi, 2017). Untuk mendapatkan informasi dari laporan keuangan, maka diperlukan analisis terhadap laporan keuangan yang dimiliki.

Menurut Fahmi (2017) kinerja keuangan adalah suatu analisa yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dan maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas (Sharaswati, 2019). Menurut Kasmir (2017), rasio solvabilitas diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktivitas perusahaan dibiayai dengan hutang, artinya berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasinya. Sedangkan rasio likuiditas diproksikan dengan *Current Ratio* (CR) diperlukan untuk pihak perusahaan, investor maupun pihak lain yang terkait dengan perusahaan karena dapat mengantisipasi dana yang diperlukan saat keperluan mendesak, dapat mempermudah pelanggan yang ingin melakukan transaksi dengan perusahaan menjadi poin penentu investasi (Kasmir 2017). Rasio profitabilitas diproksikan dengan *Net Profit Margin* (NPM) diperlukan untuk semua pihak yang menggunakan laporan keuangan perusahaan, karena rasio ini bertujuan untuk menghitung laba perusahaan dan membandingkan maupun menganalisisnya (Sartono, 2016).

Dalam menilai kinerja keuangan perusahaan dapat ditunjukkan melalui laporan keuangan yang telah disajikan oleh pihak manajemen perusahaan. Laporan keuangan perusahaan merupakan hasil dari suatu proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk komunikasi dengan pengguna laporan keuangan dan juga digunakan sebagai alat pengukur kinerja keuangan perusahaan (Rubianti, 2013). Dengan menggunakan analisa laporan keuangan, maka perusahaan dapat merencanakan dan mengatur segala kebutuhan perusahaan untuk mengukur kekuatan dan kelemahan dalam mencapai dan meningkatkan apa yang dicita-citakan perusahaan (Classyane, dkk, 2015). Laporan keuangan perusahaan sangat bermanfaat bagi masyarakat, investor, pemegang saham, dan manajemen dalam proses pengambilan keputusan dan pengembangan aset yang dimiliki. Perkembangan perusahaan sangat bergantung pada modal yang ditanamkan oleh investor, sehingga

perusahaan harus memiliki kinerja yang baik agar mendapatkan kepercayaan dari investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan. Rasio keuangan menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau ukuran efektivitas pengelolaan manajemen perusahaan (Wiagustini, 2014).

PT Adhi Karya (Persero) Tbk adalah salah satu perusahaan BUMN yang bergerak dalam jasa konstruksi, pembangunan infrastruktur, properti, *real estate* dan EPC (*Engineering, Procurement and Construction*). PT Adhi Karya (Persero) Tbk membagi beberapa proyeknya kedalam beberapa segmen konstruksi seperti 1) proyek infrastruktur mencakup jalan, jembatan, saluran irigasi, pembangkit listrik dan Pelabuhan dan 2) proyek konstruksi mencakup gedung pencakar langit, hotel, rumah sakit dan sekolah. Dalam rangka mendukung program-program pemerintah meningkatkan pertumbuhan perekonomian melalui pengembangan infrastruktur di Indonesia. PT Adhi Karya (Persero) Tbk seringkali ditunjuk langsung pemerintah untuk menggarap proyek-proyek konstruksi infrastruktur karena senantiasa memberikan yang terbaik dalam setiap proyek sehingga dipercaya menjadi bagian dari pertumbuhan infrastruktur Indonesia.

Salah satu proyek infrastruktur yang beberapa tahun terakhir digarap oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk adalah Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Terintegrasi Wilayah Jabodebek. Proyek tersebut merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi sehingga diberikan fasilitas-fasilitas kemudahan pelaksanaan proyek oleh pemerintah. Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Terintegrasi Wilayah Jabodebek bertujuan untuk mengurangi kepadatan dan mengurai kemacetan Jalan Tol Jakarta Cikampek, serta Jalan Tol Jagorawi karena kebutuhan akan LRT sangat mendesak sehingga pemerintah menunjuk PT Adhi Karya (Persero) Tbk melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015 untuk membangun prasarana dan jalan LRT. Pemerintah menunjuk PT Adhi Karya (Persero) Tbk karena dinilai paling siap dalam membangun LRT Jabodebek. Dalam Perpres di sebutkan bahwa PT Adhi Karya (Persero) Tbk ditugaskan untuk membangun prasarana dan jalan LRT sebanyak 6 Lintas Pelayanan mulai dari Cibubur, Dukuh Atas, Bekasi Timur, Senayan, Bogor dan Grogol. Pemberi proyek Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Terintegrasi Wilayah Jabodebek berasal dari Kementrian Perhubungan Republik Indonesia yang dilaksanakan selama tahun 2015-2022.

Proyek Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Terintegrasi Wilayah Jabodebek tersebut dilaksanakan oleh bagian segmen konstruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk, dimana lebih dari 50% penghasilan laba bersih perusahaan berasal dari segmen konstruksi. Maka dengan adanya proyek Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Terintegrasi Wilayah Jabodebek berdampak pada peningkatan laba bersih PT Adhi Karya (Persero) Tbk selama tahun 2015-2022.

Tabel 1.1 Partisipasi Sektor Konstruksi dalam Peningkatan Laba Bersih PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2015-2022

Tahun	Lab a Bersih Perusahaan	Lab a Bersih Konstruksi	Sektor Konstruksi
2015	Rp.463.685.000.000	Rp.456.720.299.816	98,50%
2016	Rp.313.450.000.000	Rp.209.994.520.993	66,99%
2017	Rp.915.410.000.000	Rp.831.349.973.661	90,82%
2018	Rp.644.150.000.000	Rp.107.154.985.252	16,64%
2019	Rp.663.800.000.000	Rp.512.977.730.841	77,28%
2020	Rp.33.900.000.000	Rp.30.452.762.863	89,83%
2021	Rp.55.180.000.000	Rp.19.370.783.458	35,10%
2022	Rp.81.200.000.000	Rp.56.029.473.938	69,00%
Rata-rata	Rp.396.346.875.000	Rp.278.006.316.353	68,02%

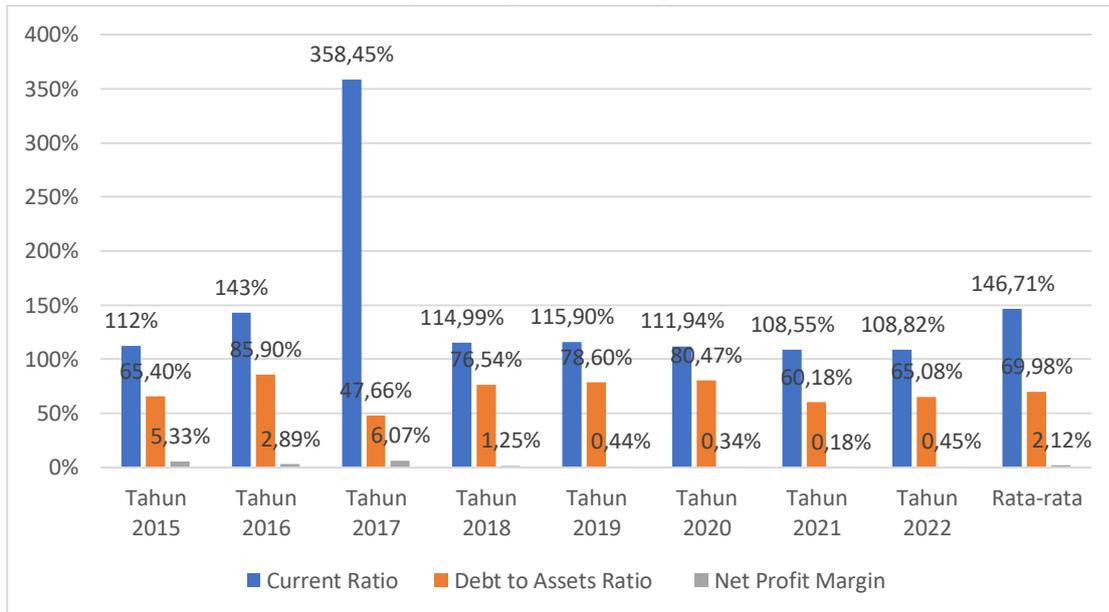
Sumber : PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa sektor konstruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk telah berpartisipasi sebesar 68,02% atau Rp.278.006.316.353 terhadap rata-rata laba bersih perusahaan sebesar Rp.396.346.875.000 selama tahun 2015-2022. Tingginya partisipasi laba bersih sektor konstruksi terhadap laba bersih seluruh sektor usaha pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk menggambarkan bahwa sektor konstruksi berperan penting dalam perkembangan usaha perusahaan. Sektor konstruksi tersebut diharapkan mampu mempertahankan posisi yang kuat perusahaan dalam persaingan industri ini sehingga PT Adhi Karya (Persero) Tbk mampu mempertahankan reputasi sebagai salah satu perusahaan konstruksi terbaik Indonesia. Kondisi ekonomi serta kebijakan pemerintah yang mendukung perkembangan konstruksi meyakinkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk terus berkarya dan membangun infrastruktur serta yang berkualitas di Indonesia.

Setiap perusahaan konstruksi tidak lepas dari masalah keuangan termasuk perusahaan konstruksi BUMN PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang mengalami penurunan signifikan laba bersih pada tahun 2020 sebesar 96% akibat pandemi Covid-19. Berhasil tidaknya perusahaan tergantung pada kondisi keuangan perusahaan yang disusun dalam laporan keuangan. Analisis atas laporan keuangan dan interpretasinya pada hakekatnya adalah untuk mengadakan penilaian atas keadaan keuangan perusahaan dan potensi atau kemajuannya melalui laporan keuangan. Analisis laporan keuangan mencakup pengaplikasian berbagi alat dan teknik analisis pada laporan keuangan dalam rangka untuk memperoleh ukuran dan hubungan yang berarti dan berguna dalam proses pengambilan keputusan.

Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau hutang dalam jangka waktu pendek, perusahaan dapat mengukur dengan menggunakan *current ratio*. Untuk mengukur sejauh mana perusahaan mendanai usahanya dengan membandingkan antara dana sendiri yang telah disetorkan dengan jumlah pinjaman dari para kreditur, perusahaan dapat mengukur dengan menggunakan *debt to asset ratio*. Sementara itu untuk mengetahui kemampuan

perusahaan dalam menghasilkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya, perusahaan dapat mengukur dengan menggunakan *net profit margin* (Astuti, 2019). Berikut ini kinerja keuangan pada proyek infrastruktur PT Adhi Karya (Persero) Tbk sektor konstruksi yang terdiri dari *Current Ratio* (CR), *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Net Profit Margin* (NPM) periode 2015-2022.



Gambar 1.2 Perkembangan *Current Ratio*, *Debt to Asset Ratio*, *Net Profit Margin* Sektor Konstruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2015-2022

Sumber: www.idx.co.id Data diolah (2023)

Berdasarkan data pada gambar tersebut, sektor konstruksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk dapat dilihat dari *Current Ratio* (CR), *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Net Profit Margin* (NPM) mengalami nilai yang fluktuatif dalam rasio kinerja keuangan. Rata-rata rasio likuiditas (*current ratio*) selama 8 tahun adalah sebesar 146,71%. *Current ratio* tertinggi sebesar 358,45% pada tahun 2017 dan terendah sebesar 108,55% tahun 2021. Terjadinya *current ratio* yang tinggi disebabkan oleh turunnya liabilitas kontrak yang dimiliki perusahaan karena perusahaan sudah menyelesaikan kewajibannya dalam menyelesaikan konstruksi bangunan dari pengguna jasa, sedangkan *current ratio* rendah dikarenakan perusahaan sedang mengalami kenaikan liabilitas karena belum menyelesaikan pembangunan.

Perhitungan rata-rata nilai *debt to asset ratio* pada tahun 2015-2022 sebesar 69,98%. *Debt to asset ratio* pada PT Adhi Karya (Persero) Tbk tertinggi pada tahun 2016 sebesar 85,90% dan terendah sebesar 47,66% pada tahun 2017. Terjadinya *debt to asset ratio* yang tinggi disebabkan oleh naiknya liabilitas kontrak perusahaan karena belum menyelesaikan kewajiban untuk mengakui pendapatan. Sedangkan rasio terendah terjadi karena berkurangnya liabilitas kontrak yang telah dilakukan perusahaan dan pendapatan dapat diakui. Tinggi dan rendahnya *debt to asset ratio*

memiliki arti yang berbanding terbalik. Rendah justru menampilkan kemampuan perusahaan dalam menutupi liabilitas dengan aset yang dimilikinya.

Pada perhitungan *net profit margin ratio* tahun 2015-2022 sebesar 2,12%, Nilai *net profit margin ratio* tertinggi pada tahun 2017 sebesar 6,07% dan terendah sebesar 0,18% pada tahun 2021. Pada perhitungan *net profit margin ratio* tertinggi karena perusahaan berhasil menyelesaikan kewajiban yang sebelumnya tertunda dan mengakui pendapatan dari penjualan bangunan. Sedangkan terendah terjadi karena perubahan disebabkan adanya penyesuaian pada pendapatan dari penjualan bangunan. Rasio *net profit margin ratio* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan berkemampuan dalam menghasilkan laba dari penjualannya.

Pendapatan merupakan salah satu akun penting dalam laporan keuangan yang nilainya sangat berguna bagi para pengguna laporan keuangan untuk mendapatkan informasi mengenai posisi keuangan dan menilai kinerja suatu perusahaan. Pendapatan juga digunakan sebagai penggerak utama suatu perhitungan kinerja lain seperti laba bersih dan laba per lembar saham. Pendapatan ialah indikator untuk membentuk laba yang merupakan tujuan utama bagi perusahaan yang *profit oriented*, sehingga nilai pendapatannya harus diukur secara wajar sesuai prinsip pengakuan pendapatan yang berlaku. Sedangkan, pengakuan pendapatan juga menjadi salah satu masalah penting dalam akuntansi, pendapatan perlu diakui pada saat yang tepat agar mencerminkan nilai yang sebenarnya, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyajian informasi keuangan dan pengambilan keputusan.

Informasi mengenai laporan keuangan berguna bagi banyak pihak internal seperti manager, direksi, komisaris, pemegang saham serta pihak eksternal seperti pemerintah, investor, kreditur, *supplier* dan lainnya. Oleh karena itu, pihak perusahaan harus mengacu pada sebuah kerangka prosedur yang terdiri dari standar yang dapat diterima secara umum. Standar ini disebut Standar Akuntansi Keuangan (SAK), atau saat ini lebih dikenal dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Menurut Yadiati (2017), PSAK adalah sebuah kerangka prosedur rujukan dalam membuat laporan keuangan akuntansi. PSAK didesain secara universal agar dapat dipahami di setiap negara, sehingga pada tahun 2015, PSAK resmi mengadopsi Standar Pelaporan Keuangan Internasional atau *International Financial Reporting Standards* (IFRS) dengan tujuan menghasilkan informasi keuangan yang dapat diperbandingkan, mempermudah analisis kompetitif maupun hubungan baik dengan pelanggan, *supplier*, investor, dan kreditor secara global.

Dalam perkembangannya, PSAK terus direvisi secara berkesinambungan sehingga menjadi PSAK 72 yang menjadi standar tunggal dalam pengakuan pendapatan yang berlaku untuk sebagian kontrak dengan pelanggan yang resmi menggantikan seluruh standar yang terkait dengan pengakuan pendapatan sebelumnya. PSAK 72 menyatakan bahwa pendapatan baru dapat diakui ketika (atau selama) perusahaan telah memenuhi kewajibannya. Perusahaan yang memiliki kontrak jangka panjang tersebut seperti industri pada sektor konstruksi yang berdampak pada perubahan standar karena dalam penyelesaian kewajibannya

membutuhkan lebih dari satu periode keuangan. Oleh karena itu perusahaan harus bisa menentukan kapan waktu yang tepat untuk pendapatan dapat diakui pada periode yang sedang berjalan.

Menurut Wisnantiastri (2018), sektor usaha yang akan berpengaruh terhadap penerapan standar PSAK 72 yaitu perusahaan yang bergerak di bidang properti dan jasa konstruksi. Jika sebelumnya pendapatan bisa diakui setelah kontrak dilakukan, berbeda dengan PSAK 72 yang pendapatannya akan diakui setelah semua hak dan kewajiban selesai sehingga emiten harus menyortir kembali kontrak dengan pengguna jasa. Oleh karena itu PSAK 72 mensyaratkan perusahaan untuk melakukan analisis terhadap transaksi sebelum menentukan pengakuan pendapatan.

PSAK 72 dalam menentukan pengakuan pendapatan, entitas harus melakukan analisis transaksi berdasarkan kontrak yang terdiri dari 5 (lima) tahapan yaitu 1) identifikasi kontrak dengan pelanggan yaitu para pihak mengidentifikasi hak, jangka waktu pembayaran, dan substansi komersial mengenai barang dan jasa yang akan dialihkan; 2) identifikasi kewajiban pelaksanaan (*performance obligations*) dalam kontrak yaitu entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan bersifat dibedakan atau tidak dalam segi substansial; 3) penentuan harga transaksi yaitu jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan yang tidak termasuk jumlah yang ditagih atas pihak ketiga, 4) pengalokasian harga transaksi pada setiap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak yaitu entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan (atau barang atau jasa bersifat dapat dibedakan) menggambarkan jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan; dan 5) pengakuan pendapatan akhirnya dapat diakui ketika entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan.

Pada penerapan PSAK 72 pengakuan pendapatan berpengaruh terhadap keberadaan kontrak konstruksi yang sangat penting mengingat pada umumnya pengguna jasa memiliki kedudukan lebih dominan dibandingkan penyedia jasa (perusahaan jasa konstruksi), dimana penyedia jasa hampir selalu memenuhi kontrak yang dibuat oleh pengguna jasa karena pengguna jasa selalu menempatkan dirinya lebih tinggi (Yasin, 2016). Dengan demikian, kontrak konstruksi merupakan dokumen yang penting dalam proyek, dimana segala hal terkait hak dan kewajiban serta alokasi risiko diatur dalam kontrak. Sehingga kontrak dalam suatu kegiatan jasa konstruksi menjadi dasar dilaksanakannya kegiatan konstruksi mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan juga pengawasan konstruksi. Demikian pentingnya memahami kontrak konstruksi karena kerugian proyek terbesar adalah disebabkan oleh kegagalan dalam mengelola kontrak konstruksi. Oleh karenanya pemahaman kontrak mutlak diperlukan oleh Tim Proyek dalam menjalankan proyek agar semua masalah dan risiko yang terkandung di dalamnya dapat diatasi dan sesuai dengan kemampuan masing-masing pihak dalam mengatasinya.

Dalam pengakuan pendapatan PT Adhi Karya (Persero) Tbk menggunakan metode persentase penyelesaian dengan menggunakan taksiran metode *cost to cost basis* untuk menghitung besarnya pendapatan konstruksi. Perusahaan menentukan persentase penyelesaian berdasarkan biaya yang telah dikeluarkan kemudian dibandingkan dengan seluruh taksiran biaya. Berikut ini merupakan pengakuan pendapatan pada proyek Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Terintegrasi Wilayah Jabodebek berdasarkan metode persentase penyelesaian pada tahun 2015-2022.

Tabel 1.2 Rincian Proyek Pembangunan Prasarana LRT Terintegrasi Wilayah Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2015-2022

Tahun	Nilai Kontrak	Biaya Konstruksi	Persentase (%) Penyelesaian
2015	Rp21.772.640.362.000	Rp56.606.825.911	0,27
2016		Rp601.478.312.120	2,88
2017		Rp4.504.691.288.822	21,55
2018		Rp5.997.391.497.293	28,69
2019		Rp3.294.059.044.054	15,76
2020		Rp789.689.838.722	3,78
2021		Rp2.764.807.028.025	13,23
2022		Rp2.889.588.546.150	13,82
Total		Rp20.898.312.381.097	100

Sumber : PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa persentase penyelesaian proyek Pembangunan Prasarana LRT Terintegrasi Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2015-2022 cenderung fluktuatif setelah menerapkan PSAK 72 selama 8 (delapan) tahun terakhir. Perhitungan pengakuan pendapatan yang diakui perusahaan konstruksi dilakukan setelah kontrak proyek selesai dilakukan. PT Adhi Karya (Persero) Tbk memperoleh kontrak Pembangunan Prasarana LRT Terintegrasi Jabodebek senilai Rp21.772.640.362.000 dengan penyelesaian selama 8 tahun yakni sebesar 100%. Progress penyelesaian kontrak tertinggi pada tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp5.997.391.497.293 atau 28,69% dari nilai kontrak proyek, sedangkan penyelesaian kontrak terendah pada tahun 2015 dengan nilai sebesar Rp56.606.825.911 atau 0,27% dari nilai kontrak proyek. Adapun progress proyek Pembangunan Jalan LRT Terintegrasi Jabodebek yang merupakan bagian dari proyek pembangunan LRT Terintegrasi Jabodebek sebagai berikut,

Tabel 1.3 Rincian Proyek Pembangunan Jalan LRT Terintegrasi Wilayah Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2015-2022

Tahun	Nilai Kontrak	Biaya Konstruksi	Persentase (%) Penyelesaian
2018	Rp1.762.193.297.229	Rp451.416.564.312	58,63
2019		Rp247.939.928.047	32,20
2020		Rp70.639.020.119	9,17
Total		Rp769.995.512.478	100

Sumber : PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 1.3 dapat dilihat bahwa persentase penyelesaian proyek Pembangunan Jalan LRT Terintegrasi Wilayah Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2015-2022 cenderung fluktuatif. Perhitungan pengakuan pendapatan yang diakui perusahaan konstruksi dilakukan setelah kontrak proyek selesai dilakukan. PT Adhi Karya (Persero) Tbk memperoleh kontrak Pembangunan Jalan LRT Terintegrasi Wilayah Jabodebek senilai Rp1.762.193.297.229 dengan penyelesaian selama 3 tahun yakni sebesar 100%. Progress penyelesaian kontrak tertinggi pada tahun 2018 dengan nilai sebesar Rp451.416.564.312 atau 58,63% dari nilai kontrak proyek, sedangkan penyelesaian kontrak terendah pada tahun 2020 dengan nilai sebesar Rp70.639.020.119 atau 9,17% dari nilai kontrak proyek. Penerapan pengakuan pendapatan PSAK 72 pada ketiga proyek konstruksi infrastruktur PT Adhi Karya (Persero) Tbk berdampak pada penyelesaian kontrak yang diharapkan perusahaan yaitu 100% kontrak terselesaikan. Penyelesaian kontrak konstruksi tersebut terdapat pada laporan keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk yang mempunyai peran sangat penting dalam memberikan informasi keuangan pada suatu periode tertentu yang digunakan untuk menggambarkan kinerja suatu perusahaan. Perusahaan yang mampu memenuhi kewajiban finansialnya dan menghasilkan pendapatan yang tinggi merupakan perusahaan yang sehat.

Analisis kinerja keuangan dan penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang baik bagi kepentingan internal maupun eksternal perusahaan, maka penting untuk mengetahui apakah kinerja keuangan perusahaan baik atau tidak serta penerapan pengakuan pendapatan sudah sesuai berdasarkan PSAK 72 atau tidak. Pada penelitian Sukardi (2022) menunjukkan bahwa analisis kinerja keuangan terhadap 4 (empat) BUMN Bidang Konstruksi menunjukkan rata-rata kinerja keuangan sebelum Covid-19 lebih baik di bandingkan selama Covid-19, sedangkan penelitian Pratiwi dan Putri (2021), menunjukkan bahwa penerapan pengakuan pendapatan sebagai pendapatan sudah berdasarkan PSAK 72 dalam mencatat laporan laba Rugi. Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil objek penelitian pada perusahaan konstruksi yaitu PT Adhi Karya (Persero) Tbk karena perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dan penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 pada proyek dengan lengkap. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian yang berjudul “**Analisis Kinerja Keuangan dan Penerapan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 pada Proyek Pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2015-2022**”.

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, dapat dikemukakan identifikasi masalah pada penelitian ini mengenai analisis kinerja keuangan dan penerapan

pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 pada Proyek Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2022, yaitu sebagai berikut :

1. PT. Adhi Karya (Persero) Tbk mengalami penurunan pengakuan pendapatan dari kontrak berjalan waktu satu tahun lebih.
2. Berdampak pada penggunaan jasa konstruksi infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.
3. Pendapatan yang menurun menyebabkan turunnya kinerja keuangan melalui laba infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.
4. PT. Adhi Karya (Persero) Tbk menjadi tidak lebih baik dari segi laporan keuangan.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, dapat dikemukakan rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis kinerja keuangan yang diproksikan dengan *current ratio*, *debt to asset ratio* dan *net profit margin* pada Proyek Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2022?
2. Bagaimana analisis penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 pada Proyek Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2022?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan penelitian tersebut, maka maksud dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui kondisi kinerja keuangan dan penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 pada Proyek Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2022, kemudian menyimpulkan hasil penelitian, serta memberikan saran dan informasi yang dapat dijadikan pertimbangan pengambilan keputusan dalam menentukan kinerja keuangan dan pengukuran pendapatan pada segmen operasional infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2022.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan maksud penelitian tersebut, maka tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kinerja keuangan yang diproksikan dengan *current ratio*, *debt to asset ratio* dan *net profit margin* pada Proyek Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2022.

2. Untuk menganalisis penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 pada Proyek Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2022.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik kegunaan praktis ataupun kegunaan akademis.

1.4.1 Kegunaan Praktis

Adapun kegunaan praktis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, pengetahuan atau pemahaman mengenai kinerja keuangan dan penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.
2. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan pengetahuan baru serta dapat dijadikan sebagai bahan kajian bagi Mahasiswa Perguruan Tinggi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan.
3. Bagi umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bermanfaat mengenai dampak kinerja keuangan terhadap penerapan pengakuan pendapatan PSAK 72 perusahaan konstruksi sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan perusahaan dalam menentukan kinerja keuangan pada laporan keuangan perusahaan mengalami perubahan akibat dari penerapan standar akuntansi baru dan terhambatnya penyelesaian kewajiban kontrak konstruksi.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Bagi ilmu pengetahuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, pengetahuan dan perkembangan khususnya di bidang akuntansi keuangan yang berkaitan dengan kinerja keuangan dan penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori sinyal pertama kali dikemukakan oleh Spence pada tahun 1973 dalam penelitiannya yang berjudul *job market signalling*. Teori ini melibatkan dua belah pihak antara manajemen dengan investor luar untuk memberikan sinyal. Manajemen berusaha memberikan informasi yang lengkap kepada investor sehingga nantinya investor dapat menyesuaikan keputusan dengan sinyal yang diterima. Hubungan teori sinyal dengan penelitian ini adalah penetapan kebijakan baru dalam mengakui pendapatan serta SAK baru dalam perusahaan sebuah bentuk sinyal yang dapat diberikan kepada pihak luar. Dengan adanya penerapan PSAK 72 akan memberikan sinyal kepada investor bahwa perusahaan telah menerapkan standar yang telah berlaku. Dengan demikian ini akan menjadi sinyal positif kepada investor, sehingga dengan adanya sinyal tersebut diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Menurut Brigham (2011) *Signaling Theory* adalah suatu tindakan yang diambil manajemen suatu perusahaan yang memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Perusahaan dengan prospek yang menguntungkan akan mencoba menghindari penjualan saham dan mengusahakan setiap modal baru yang diperlukan dengan cara-cara lain, termasuk penggunaan hutang. *Signalling Theory* (Teori sinyal) menunjukkan adanya asimetri informasi antara manajemen perusahaan dan pihak-pihak berkementingan dengan informasi tersebut. Teori sinyal mengemukakan tentang bagaimana seharusnya perusahaan memberikan sinyal-sinyal pada pengguna laporan keuangan. *Signaling Theory* mengemukakan tentang bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Sinyal dapat berupa promosi atau informasi lain yang menyatakan bahwa perusahaan tersebut lebih baik daripada perusahaan lain. Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang berkualitas.

Perusahaan mengakui pendapatan saat pendapatan tersebut telah direalisasikan pada saat atau telah diterima atau didapatkan. Pendapatan diakui dengan seharusnya saat pendapatan sangat besar maupun kecil akan menyebabkan data dalam laporan laba rugi untuk Pendapatan adalah salah satu akun utama pada laporan keuangan yang informasinya sangat bermanfaat bagi para penggunanya terkait laporan posisi keuangan dan penilaian kinerja suatu perusahaan (IASB, 2018).

Pendapatan merupakan patokan dalam melakukan perhitungan kinerja suatu perusahaan. Sedangkan, pengakuan terhadap pendapatan merupakan salah satu faktor utama dalam penentuan pendapatan perusahaan, dimana pendapatan perlu dilakukan pengakuan pada saat sesuai dan tepat supaya menunjukkan value yang sesungguhnya, dan tidak terjadi salah saji dalam pelaporan informasi keuangan dan pengambilan keputusan menjadi lebih akurat (Hidayat,2017).

2.2 Kinerja Keuangan

2.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaa keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan merupakan suatu gambaran kondisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu baik menyangkut aspek penghimpunan dan maupun penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas dan profitabilitas (Sharaswati, 2019). Sedangkan Fahmi (2017) mendefinisikan kinerja keuangan adalah suatu analisa yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat laporan keuangan yang telah memenuhi standar dan keuangan dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) atau GAAP (*General Accepted Accounting Principle*), dan lainnya. Kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang menunjukkan efektivitas dan efisien suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuannya. Persaingan bisnis yang semakin ketat menuntut setiap perusahaan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan agar tidak kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan investor. untuk memutuskan bahwa suatu perusahaan memiliki kinerja yang baik, ada dua penilaian yang paling dominan yang dijadikan dasar acuan. Penilaian ini harus dilakukan dengan melihat sisi kinerja keuangan dan non keuangan.

Kinerja keuangan melihat pada laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan dan itu tercermin dari informasi yang diperoleh dari laporan posisi keuangan, laba komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Pengertian kinerja keuangan secara bahasa, kata kinerja dapat diartikan *job performance* atau *actual performance* atau prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang telah dicapai oleh seorang karyawan. Kinerja sendiri dapat diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang yang dicapai dengan adanya kemampuan, kemauan, usaha dan perbuatannya sendiri dalam situasi tertentu. Berdasarkan Surat Keterangan Menteri Keuangan RI No. 740/KMK.00/1989, kinerja diartikan sebagai sebuah prestasi yang telah dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang mancerminkan tingkat kesehatan perusahaan tersebut.

Kinerja menurut *Oxford Dictionary* merupakan suatu tindakan atau suatu cara perusahaan dalam bertindak saat melakukan fungsi organisasinya. Sebenarnya kinerja merupakan suatu kontrak, dimana banyaknya para ahli yang masih memiliki

sudut pandang yang berbeda-beda dalam mendefinisikan atau mengartikan kata kinerja. Seperti yang dikatakan oleh Robins, bahwa kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi dan kesempatan. Beberapa ahli mendefinisikan kinerja sebagai berikut :

- 1) Menurut Fahmi (2018) kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar. Kinerja keuangan perusahaan yang baik adalah pelaksanaan aturan-aturan yang berlaku sudah dilakukan secara baik dan benar.
- 2) Menurut Hery (2017) kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan dari mengandalkan sumber daya yang dimilikinya. Perusahaan dikatakan berhasil apabila perusahaan telah mencapai suatu kinerja tertentu yang telah ditetapkan.
- 3) Menurut Hayat dkk (2018) kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola aset perusahaan efektif selama periode tertentu.

Banyak sekali defenisi atau pengertian dari kinerja oleh para ahli, namun semua pengertian tersebut mempunyai beberapa kesamaan arti dan makna dari kata kinerja tersebut. Sehingga dapat disimpulkan kinerja merupakan hasil kerja atau perbandingan secara kualitas dan kuantitas baik yang bersifat fisik atau mental, fisik atau non mental, gambaran kondisi keuangan perusahaan baik menyangkut penghimpunan dan penyaluran dana, yang biasanya diukur dengan indikator kecukupan modal, likuiditas, dan profitabilitas, dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi dalam meningkatkan perusahaan dan mencapai suatu hasil atau tingkat prestasi atau gambaran keberhasilan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi baik itu secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan kewenangan dan tugas tanggung jawab masing-masing dalam upaya untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika secara keseluruhan selama periode tertentu selama dalam melaksanakan tugas tersebut.

2.2.2 Pengukuran Kinerja Keuangan

Dalam rangka menilai tercapai tidaknya tujuan perusahaan, maka perlu diperlakukan penilaian menyeluruh, salah satunya dengan mengetahui kinerja keuangan suatu perusahaan. Menurut Warsono (2018), kinerja perusahaan dapat dirumuskan sebagai suatu perbandingan antara nilai yang dihasilkan oleh suatu

perusahaan yang dicapai dengan memanfaatkan asset produktifnya dengan nilai yang diharapkan oleh pemilik asset tersebut. Pengukuran kinerja keuangan melalui laporan keuangan perusahaan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan tersebut, sehingga untuk selanjutnya kekurangan-kekurangan yang ada dapat diperbaiki. Hal ini tentunya dapat mengambil informasi bagi pengambil keputusan sehingga kinerja perusahaan dapat terus ditingkatkan. Mulyadi (2018) mengatakan jika menilai kinerja keuangan perusahaan bertujuan memotivasi karyawan dalam mencapai sasaran organisasi dan dalam standar perilaku yang dapat diterapkan sebelumnya agar dapat menghasilkan tindakan dan hasil yang diinginkan.

Pengukuran kinerja keuangan dapat dinilai dengan beberapa alat analisis. Salah satunya ialah dengan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan metode yang umum dilakukan untuk mengukur kinerja perusahaan di bidang keuangan. Rasio keuangan merupakan alat yang digunakan untuk membandingkan seberapa besar tingkat kinerja keuangan perusahaan. Pada dasarnya perhitungan rasio keuangan adalah untuk menilai kinerja keuangan perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan. Menurut Harahap (2018), rasio keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan antara suatu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan.

Menurut Kasmir (2019) rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya yang dilakukan antara satu komponen dengan komponen lain dalam satu laporan keuangan atau antar laporan keuangan. Rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan diantaranya rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan diantaranya rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas (Solikhah, Susyanti & Wahono, 2018). Ketiga rasio tersebut merupakan rasio keuangan yang utama digunakan untuk menilai kinerja perusahaan (Ghany, 2018).

1. Rasio likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* (CR)

Rasio likuiditas adalah rasio yang memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang-utang (liabilitas) jangka pendeknya (Solikhah, Susyanti & Wahono, 2017). Rasio likuiditas merupakan rasio yang umumnya menjadi pertimbangan kreditor untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan. Penelitian ini diproksikan dengan rasio kas *cash ratio*. Rasio ini dipilih karena merupakan ukuran yang paling umum dipakai untuk mengetahui kesanggupan perusahaan dalam memenuhi liabilitas lancar dengan menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditor jangka pendek dipenuhi oleh aset yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan jatuh tempo utang (Wardiyah, 2018). Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$CR = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

2. Rasio solvabilitas yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR)
Rasio solvabilitas (rasio *coverage*) adalah rasio yang mengukur tingkat perlindungan bagi kreditor jangka panjang dan investor (Kieso, Weygant & Warfield, 2014). Rasio solvabilitas disebut juga rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh liabilitasnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang ketika perusahaan dilikuidasi (Kasmir, 2019). Seperti halnya rasio likuiditas, rasio solvabilitas juga umumnya menjadi pertimbangan kreditor untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan (Ghany, 2018). Penelitian ini diproksikan dengan rasio *debt to asset ratio* (*debt ratio*). Rasio ini dipilih karena menggambarkan perbandingan antara total liabilitas dan total aset sehingga dapat diketahui apakah aset perusahaan cukup (*solvable*) atau tidak cukup (*insolvable*) untuk membayar semua liabilitasnya. Rasio ini juga berguna untuk mengetahui seberapa jauh aset perusahaan dibiayai dengan utang (Irwati, 2018). Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$DAR = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

3. Rasio profitabilitas yang diproksikan dengan *Net Profit Margin* (NPM)
Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan sebuah perusahaan untuk periode waktu tertentu (Kieso, Weygant & Warfield, 2014). Rasio profitabilitas disebut juga sebagai rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan (Kasmir, 2019). Rasio ini merupakan salah satu rasio yang penting dan umum digunakan oleh investor maupun kreditor dalam menilai perusahaan (Ghany, 2018). Penelitian ini diproksikan dengan rasio *net profit margin ratio*, *return on investment* (ROI). Rasio ini dipilih karena merupakan salah satu rasio yang berpengaruh signifikan untuk memprediksi pertumbuhan laba. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

2.2.3 Tujuan Pengukuran Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan hal terpenting bagi perusahaan karena kinerja keuangan merupakan salah satu indikator untuk mengetahui apakah bisnis yang dijalankan akan tetap terus berjalan dengan baik kedepannya atau tidak. Tujuan penilaian kinerja keuangan perusahaan menurut Munawir (2018) adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat likuiditas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memperoleh kewajibannya yang harus segera dipenuhi atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi keuangannya pada saat ditagih.
2. Untuk mengetahui tingkat solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi dari kewajiban keuangan jangka pendek atau jangka panjang.

3. Untuk mengetahui tingkat rentabilitas atau profitabilitas, yaitu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu.
4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha, yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunga atas hutang-hutangnya termasuk membayar kembali pokok hutangnya tepat waktu serta kemampuan membayar deviden secara teratur kepada para pemegang saham tanpa mengalami hambatan atas krisis keuangan.

2.2.4 Tahapan Pengukuran Kinerja Keuangan

Menurut Fahmi (2017), ada 5 (lima) tahapan dalam pengukuran kinerja keuangan suatu perusahaan secara umum, yaitu :

1. Melakukan *review* terhadap data laporan keuangan
Review dilakukan dengan tujuan agar laporan keuangan yang sudah dibuat tersebut sesuai dengan penerapan kaidah-kaidah yang berlaku secara umum dalam akuntansi, sehingga dengan demikian hasil laporan keuangan tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
2. Melakukan perhitungan
 Penerapan metode perhitungan adalah disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang sedang dilakukan sehingga hasil dari perhitungan tersebut akan memberikan suatu kesimpulan sesuai dengan analisis yang diinginkan.
3. Melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan yang telah diperoleh
 Dari hasil hitungan yang sudah diperoleh tersebut kemudian dilakukan perbandingan dengan hasil hitungan dari berbagai perusahaan lainnya, Metode yang paling umum digunakan untuk melakukan perbandingan ini ada dua yaitu:
 - a. *Time series analysis*, yaitu membandingkan secara antar waktu atau antar peroleh dengan tujuan itu nantinya akan terlihat secara grafik.
 - b. *Cross sectional approach*, yaitu melakukan perbandingan terhadap hasil perhitungan rasio-rasio yang telah dilakukan antara satu perusahaan dan perusahaan lainnya dalam ruang lingkup yang sejenis dilakukan dengan cara bersamaan.
4. Melakukan penafsiran (*interpretation*) terhadap berbagai permasalahan yang ditemukan
 Pada tahap ini analisis kinerja keuangan perusahaan adalah setelah dilakukan ketiga tahap tersebut selanjutnya dilakukan penafsiran untuk melihat permasalahan dan kendala-kendala yang dialami oleh perusahaan tersebut.
5. Mencari dan memberikan pemecahan masalah (*solution*) terhadap berbagai macam permasalahan yang ditemukan

Pada tahap terakhir, setelah ditemukan berbagai permasalahan yang dihadapi maka dicarikan solusi guna memberikan suatu masukan terhadap permasalahan yang menjadi kendala dan hambatan selama ini dapat terselesaikan.

2.3 Laporan Keuangan

2.3.1 Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan produk hasil akhir dari serangkaian proses pencatatan akuntansi yang memberikan informasi mengenai perkembangan suatu perusahaan kepada pihak internal maupun eksternal. Laporan keuangan biasanya disusun berdasarkan periode tertentu misalnya tahunan ataupun bulanan. Menurut Kasmir (2019), laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Sedangkan menurut peraturan pemerintah No. 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menyatakan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilaksanakan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Menurut Hery (2018), laporan keuangan merupakan produk akhir dari serangkaian proses pencatatan dan pengikhtisaran data transaksi bisnis. Sementara itu, Sujarweni (2017), laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode keuangan yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan dapat menggambarkan aktifitas dari suatu perusahaan pada satu periode akuntansi. Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Pada hakekatnya suatu laporan keuangan bersifat umum yang ditunjukkan kepada beberapa pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Pihak-pihak yang berkepentingan yaitu pemilik perusahaan, pemerintah, kreditor dan pihak lainnya.

Laporan keuangan mempunyai tujuan untuk menyediakan informasi yang meliputi posisi keuangan, kinerja dan perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi (Darminto dan Juliaty, 2019). Informasi mengenai posisi keuangan sangat diperlukan dalam evaluasi kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas. Kinerja keuangan perusahaan diperlukan dalam memprediksi perusahaan di waktu yang akan datang. Perubahan posisi keuangan bermanfaat untuk menilai aktivitas yang berkaitan dengan pendanaan, investasi dan operasi perusahaan. Laporan keuangan yang memenuhi tujuan tersebut akan bermanfaat terhadap sebagian besar pengguna laporan keuangan

2.3.2 Tujuan Laporan Keuangan

Pada dasarnya tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu

perusahaan yang digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan oleh pemakainya. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2018), tujuan dari laporan keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini adalah memenuhi kebutuhan bersama dari sebagian besar pengguna. Namun demikian laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari berbagai kejadian dimasa yang lalu dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan.
3. Laporan keuangan yang telah menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen atau merupakan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melakukan penilaian terhadap apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen, melakukan hal ini agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin saja mencakup keputusan untuk menanamkan atau menjual investasi mereka dalam suatu perusahaan atau keputusan untuk mengangkat Kembali atau melakukan penggantian manajemen.

Disisi lain, tujuan laporan keuangan menurut Harahap (2018), adalah sebagai berikut :

1. *Screening*, analisis dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui situasi dan kondisi kerusakan dari laporan keuangan tanpa pergi langsung ke lapangan.
2. *Understanding*, memahami perusahaan, kondisi keuangan dan hasil usahanya.
3. *Forecasting*, analisis yang digunakan untuk memprediksi kondisi keuangan perusahaan dimasa yang akan datang.
4. *Diagnosis*, analisis dilakukan untuk melihat kemungkinan adanya masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan, baik dalam manajemen operasi, keuangan ataupun masalah lainnya.
5. *Evaluation*, analisis dilakukan untuk menilai prestasi manajemen, kinerja operasional, tingkat efisiensi dan lain sebagainya dalam mengelola perusahaan.

2.3.3 Komponen Laporan Keuangan

Laporan keuangan perusahaan merupakan laporan yang sangat penting bagi perusahaan karena di dalam laporan keuangan terdapat suatu informasi keuangan perusahaan, saat usaha semakin meningkat dan membutuhkan modal, dan mengajukan pinjaman ke bank, maka laporan keuangan perusahaan akan dilihat oleh perbankan. Laporan keuangan dibagi menjadi beberapa jenis, menurut IAI (2018), menjelaskan komponen atau jenis laporan keuangan terdiri dari :

1. Neraca

Neraca merupakan bagian dari laporan keuangan, neraca memperlihatkan tentang posisi keuangan pada akhir periode akuntansi. Keadaan harta atau kekayaan perusahaan akan terlihat dalam neraca. Terdapat aktiva (asset) dan pasiva terdapat kewajiban dan modal.

2. Laporan laba rugi
Pada dasarnya laporan laba rugi memberitahu tentang kemajuan perusahaan dalam suatu periode. Laporan ini menggambarkan sesuatu yang diperoleh perusahaan selama satu periode, apakah laba atau rugi dan berapa banyak laba atau rugi yang diperoleh.
3. Laporan perubahan posisi keuangan
Laporan perubahan posisi keuangan biasanya dijadikan dalam laporan arus dana, laporan ini melaporkan dari mana dana diperoleh dan kemana dana digunakan. Laporan arus kas melaporkan perubahan posisi keuangan berbasis kas yaitu ringkasan kas yang diterima dan dikeluarkan perusahaan.
4. Catatan atas laporan keuangan
Laporan ini berisi beberapa keterangan yang merupakan penjelasan tertulis dari aspek-aspek penting yang dapat memberikan banyak informasi.
5. Laporan arus kas
Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluar kas perusahaan.

2.3.4 Karakteristik Laporan Keuangan

Karakteristik laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi di dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi pemakai dalam mengambil keputusan ekonomi (Darminto dan Julianty, 2019). Karakteristik laporan ini meliputi dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dipertimbangkan.

1. Dapat dipahami
Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk dapat dipahami oleh pemakai, dalam hal ini pemakai asumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan akuntansi serta kemauan mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.
2. Relevan
Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang ada dapat mempengaruhi pengambilan keputusan ekonomi dengan membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang.
3. Keandalan
Informasi laporan mempunyai kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material.
4. Dapat dibandingkan

Laporan keuangan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan yang lalu dan dengan perusahaan lain. Hal ini dapat dilakukan apabila penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut.

2.3.5 Analisis Laporan Keuangan

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Bagi para analis, laporan keuangan merupakan media yang paling penting untuk menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan. Suatu analisis terhadap laporan keuangan dilakukan untuk mengetahui secara rinci hubungan antara satu pos dengan pos yang lain yang ada di dalam laporan keuangan. Menurut Harmono (2017) analisis laporan keuangan merupakan alat analisis bagi manajemen keuangan perusahaan yang bersifat menyeluruh, dapat digunakan untuk mendeteksi atau mendiagnosis tingkat kesehatan perusahaan, melalui analisis kondisi arus kas atau kinerja organisasi perusahaan baik yang bersifat parsial maupun kinerja organisasi secara keseluruhan.

Menurut Hery (2018) Analisis laporan keuangan merupakan suatu proses untuk membedah laporan keuangan kedalam unsur-unsur dan menelaah masing-masing dari unsur tersebut dengan tujuan untuk memperoleh pengertian dan pemahaman yang baik dan tepat atas laporan keuangan itu sendiri. Menganalisis laporan keuangan berarti menilai kinerja perusahaan, baik secara internal maupun eksternal dalam industri yang sama. Hal ini berguna bagi arah perkembangan perusahaan dengan mengetahui seberapa efektif operasi perusahaan telah berjalan. Analisis laporan keuangan sangat berguna tidak hanya bagi internal perusahaan saja, tetapi juga bagi investor dan pemangku kepentingan lainnya. Analisis laporan keuangan merupakan suatu metode yang membantu para pengambilan keputusan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan melalui informasi yang didapat dari laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dapat membantu manajemen untuk mengidentifikasi kekurangan atau kelemahan yang ada dan kemudian membuat keputusan yang rasional untuk memperbaiki kinerja perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

2.4 PSAK 72 Pengakuan Pendapatan dari Kontrak Pelanggan

2.4.1 Pengertian Pendapatan

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul selama proses aktivitas normal. Menurut Riahl (2017), pendapatan berasal dari penjualan barang dan penyerahan jasa serta diukur dengan pembebanan yang dikenakan kepada pelanggan, klien, atau penyewa untuk barang dan jasa yang disediakan. Pendapatam juga mencakup keuntungan dan penjualan atau pertukaran aktiva (selain saham) yang diperdagangkan, bunga dan dividen yang diperoleh dari investasi dan peningkatan lainnya dalam ekuitas pemilik kecuali yang berasal dari kontribusi modal dan

penyesuaian modal. Menurut Rudianto (2018), pendapatan (*revenue*) adalah kenaikan modal perusahaan yang timbul akibat penjualan produk perusahaan. Istilah pendapatan biasanya digunakan oleh perusahaan jasa, sedangkan perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur lebih menggunakan istilah penjualan (*sales*) untuk mencatat transaksi yang sama. Pendapatan sebuah perusahaan juga dapat didefinisikan sebagai banyaknya penerimaan yang dinilai dengan satuan mata uang yang dapat dihasilkan perusahaan atau suatu bangsa dalam periode tertentu.

Menurut Harnanto (2019) menuliskan bahwa pendapatan adalah “kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya. Menurut Sochib (2018) pendapatan merupakan aliran masuk aktiva yang timbul dari penyerahan barang/jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama periode tertentu. Bagi perusahaan, pendapatan yang diperoleh atas operasi pokok akan menambah nilai aset perusahaan yang pada dasarnya juga akan menambah modal perusahaan. Namun untuk kepentingan akuntansi, penambahan modal sebagai akibat penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain dicatat tersendiri dengan akun pendapatan.

Dilihat dari berbagai definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa.

2.4.2 Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan diatur dalam PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan), yang memberikan pedoman yang harus diikuti dalam menentukan kapan pendapatan harus dilaporkan dan bagaimana pendapatan diukur. PSAK 72 (yang menggantikan PSAK 23: Pendapatan) menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Pendapatan (*revenue*) dalam PSAK 72 diterjemahkan sebagai penghasilan yang timbul selama proses aktivitas normal entitas. Metode pengakuan pendapatan dalam PSAK 72 adalah *accrual* basis, di mana pendapatan diakui pada saat terjadi transaksi. Pendapatan perlu diakui dalam waktu yang tepat agar mencerminkan nilai perusahaan sebenarnya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penyajian informasi keuangan yang digunakan sebagai pengambilan keputusan. Kriteria tertentu perlu dipenuhi dalam menentukan pengakuan pendapatan agar menghasilkan informasi akuntansi yang relevan dan dapat dipercaya. PSAK 72 mempunyai tujuan untuk menetapkan prinsip dimana perusahaan diharapkan dapat menyediakan informasi yang berguna bagi pengguna laporan keuangan mengenai arus kas dalam sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan. Dalam PSAK

72, pendapatan diakui oleh perusahaan ketika perusahaan telah melaksanakan kewajiban dengan mengalihkan barang atau jasa yang telah dijanjikan kepada pelanggan (aset). Pelanggan akan mendapatkan pengendalian atas aset ketika aset telah dialihkan. Dengan kata bahwa pendapatan baru akan diakui saat transaksi telah terjadi.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2018), “pendapatan diakui ketika kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke entitas dan manfaat ini dapat diukur secara andal”. Adapun pengakuan pendapatan menurut Martani, dkk (2016), yaitu: pendapatan diakui ketika besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke dalam perusahaan dan nilai manfaat tersebut dapat diukur dengan andal. Walaupun pada umumnya pendapatan diakui pada saat penyerahan barang atau jasa, namun mungkin saja pendapatan diakui pada waktu lain, yaitu sebelum penyerahan barang atau jasa maupun setelah penyerahan. Metode akuntansi untuk mengakui pendapatan menggunakan metode persentase penyelesaian pekerjaan. Selama ini telah dikenal secara umum bahwa ada dua dasar pengakuan pendapatan, yaitu:

1. *Accrual* basis Dasar akrual ini mengakui pendapatannya pada saat periode terjadinya transaksi pendapatan. Dengan dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui pada saat kejadian walaupun kas belum diterima.
2. *Cash* basis Dasar tunai adalah apabila pendapatan yang hanya diperhitungkan berdasarkan penerimaan dan pengeluaran kas. Penjualan barang atau jasa hanya dapat diperhitungkan pada saat tagihan langganan diterima.

2.4.3 Proses Pengakuan Pendapatan

Untuk dapat menentukan pengakuan pendapatan, standar akuntansi mensyaratkan entitas untuk melakukan analisis transaksi berdasarkan kontrak terlebih dahulu, yang terdiri dari 5 (lima) tahapan berikut. Berikut ini diikhtisarkan lima tahapan dalam proses pengakuan pendapatan (*the five-steps revenue recognition process*).

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan
Suatu kontrak adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan. Kontrak dapat tertulis, lisan, atau tersirat dalam praktik bisnis entitas pada umumnya. Suatu entitas menerapkan pengakuan pendapatan atas suatu kontrak dengan pelanggan sesuai dengan kriteria berikut,
 - a. Kontrak memiliki substansi komersial;
 - b. Para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing;
 - c. Entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan;
 - d. Entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan; dan

- e. Kemungkinan besar (*probable*) entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan.
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan
Kewajiban pelaksanaan adalah suatu janji dalam kontrak untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan. Janji ini dapat secara eksplisit, implisit, atau kemungkinan berdasarkan praktik bisnis entitas pada umumnya. Pada awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan baik:
 - a. Suatu barang atau jasa (atau sepaket barang atau jasa) yang bersifat dapat dibedakan; atau
 - b. Serangkaian barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang secara substansial sama dan memiliki pola pengalihan yang sama kepada pelanggan.
3. Menentukan harga transaksi
Harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Entitas mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas untuk menentukan harga transaksi. Sifat, waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan mempengaruhi estimasi harga transaksi. Ketika menentukan harga transaksi, entitas mempertimbangkan dampak dari seluruh hal yaitu imbalan variabel, estimasi pembatas imbalan variabel, keberadaan komponen pendanaan signifikan dalam kontrak imbalan non kas dan hutang imbalan kepada pelanggan.
4. Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan
Tujuan ketika mengalokasikan harga transaksi adalah entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan (atau barang atau jasa bersifat dapat dibedakan) dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan. Untuk memenuhi tujuan alokasi, entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan yang diidentifikasi dalam kontrak dengan dasar harga jual berdiri sendiri relatif (*relative stand-alone selling price*). Harga jual berdiri sendiri adalah harga barang atau jasa yang dijanjikan dijual secara terpisah oleh entitas kepada pelanggan. Bukti terbaik dari harga jual berdiri sendiri adalah harga barang atau jasa yang dapat diobservasi ketika entitas menjual barang atau jasa secara terpisah dalam keadaan serupa dan kepada pelanggan serupa. Harga atau daftar harga kontraktual untuk barang atau jasa mungkin merupakan (tetapi tidak dianggap menjadi) harga jual berdiri sendiri dari barang atau jasa.
5. Mengakui pendapatan ketika (pada saat) entitas telah menyelesaikan kewajiban pelaksanaan
Entitas mengakui pendapatan ketika (pada saat) entitas telah menyelesaikan

kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan pengendalian barang atau jasa kepada pelanggan. Pengendalian dapat dialihkan pada suatu saat tertentu (*at a point in time*) atau sepanjang waktu (*a period of time*).

2.4.4 Pengakuan Pendapatan dari Kontrak Pelanggan (PSAK 72)

PSAK 72 merupakan adopsi dari *International Financial Reporting Standards* (IFRS) No 15 yang berisikan tentang *revenue from contracts with costumers* dan merupakan pengganti dari standar akuntansi terkait sebelumnya meliputi PSAK 23 tentang pendapatan, PSAK 34 tentang kontrak konstruksi, ISAK 10 mengenai program loyalitas pelanggan, ISAK 21 mengenai perjanjian konstruksi real estate, ISAK 27 mengenai pengalihan aset dari pelanggan dan PSAK 44 tentang akuntansi aktivitas pengembangan *real estate*. Prinsip utama pengakuan pendapatan adalah bahwa entitas mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang mencerminkan imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran dengan barang atau jasa tersebut. Entitas mempertimbangkan syarat kontrak serta selirih fakta dan keadaan yang relevan ketika menerapkan pernyataan ini. Entitas menerapkan pernyataan ini, termasuk penggunaan panduan praktis, secara konsisten terhadap kontrak dengan karakteristik dan keadaan yang serupa.

Dalam PSAK 72 paragraf 1 (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018) dijelaskan bahwa PSAK 72 bertujuan untuk menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi kepada pengguna laporan keuangan mengenai sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan serta arus kas dari kontrak dengan pelanggan. Entitas mengakui pendapatan untuk menggambarkan pengalihan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan dalam jumlah yang menjadi hak entitas

Pengakuan pendapatan merupakan hal yang penting dalam suatu kontrak karena pendapatan ini berhubungan secara langsung dengan laba suatu entitas. Pengakuan pendapatan secara umum diakui atas dasar kas dan *dasae actual* (Hery, 2021). Pengakuan pendapatan dapat diakui pada saat pengakuan pendapatan telah diperoleh, dapat diukur serta kolektibel. Menurut Londa et al (2020), pengakuan pendapatan dapat diakui apabila memenuhi beberapa syarat berikut ini:

1. Definisi yaitu suatu sistem atau informasi tertentu memerlukan definisi operasional yang jelas untuk bisa dimasukkan ke dalam elemen laporan keuangan.
2. Dapat diukur yaitu suatu sistem tertentu harus dapat diukur dengan atribut yang relevan untuk menentukan keandalan daya ujinya yaitu karakteristik, sifat atau aspek yang dapat diukur dan dihitung.
3. Relevan yaitu apabila digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, informasinya mampu menghasilkan manfaat tertentu.
4. Keandalan yaitu informasi tersebut dapat disajikan secara wajar, dapat diuji dan netral.

Sedangkan pengakuan pendapatan dapat diakui pada saat (Londa et al, 2020), yaitu sebagai berikut:

1. Pengakuan pendapatan diakui selama adanya kegiatan memproduksi. Pengakuan pendapatan dalam hal ini apabila harga kontrak awal dan estimasi biaya untuk penyelesaian proyek dapat dipastikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Nilai pendapatan ini didasarkan atas akumulasi biaya yang telah dikeluarkan selama proses pembangunan proyek tersebut.
2. Pengakuan pendapatan dapat diakui saat kegiatan produksi telah selesai. Dalam mengakui pendapatan saat kegiatan produksi atau kegiatan menghasilkan suatu barang maupun jasa selesai ini juga terdapat beberapa syaratnya yaitu penentuan harga jual yang tepat, sulitnya penentuan biaya produk, pesediaan dapat saling dilakukan pertukaran.
3. Pengakuan pendapatan diakui saat adanya penjualan dari hasil produksi perusahaan.
4. Pengakuan pendapatan saat diterimanya kas.

2.4.5 Metode Pengakuan Pendapatan dari Kontrak Pelanggan (PSAK 72)

Dalam PSAK 72 (2017) pengakuan pendapatan dan biaya kontrak yaitu jika hasil kontrak konstruksi dapat diestimasi secara andal, maka pendapatan kontrak yang berhubungan dengan kontrak diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan, taksiran rugi pada kontrak konstruksi segera diakui sebagai beban. Menurut Rangkuti (2018), ada 2 metode dalam pengakuan pendapatan jasa konstruksi, yaitu:

1. Metode kontrak selesai (*Completed Contract Method*)
Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang mempunyai kontrak jangka pendek atau proyek yang memiliki resiko yang tidak dapat diestimasi secara andal. Metode kontrak selesai mengakui pendapatan dan laba kotor pada saat kontrak diselesaikan secara keseluruhan.
2. Metode persentase penyelesaian (*Percentage of Completion Method*)
Metode ini biasanya digunakan oleh perusahaan yang memiliki kontrak jangka panjang, dimana jangka waktunya lebih dari satu periode akuntansi. Metode ini mencerminkan prestasi kerja masa berjalan atas penyelesaian kontrak lebih dari satu periode akuntansi. Metode ini mengakui pendapatan biaya dan laba kotor sesuai dengan tercapainya kemajuan ke arah penyelesaian kontrak jangka panjang. Metode persentase penyelesaian memiliki dua pendekatan, yaitu:
 - a. Metode pendekatan fisik (*physical progress approach*) adalah metode pengakuan pendapatan yang diukur berdasarkan persentase kemajuan fisik yang dicapai di lapangan. Dengan pendekatan fisik ukuran dibuat berdasarkan hasil yang telah dicapai (*output measures*). Rumus persentase penyelesaian dihitung sebagai berikut,

$$\frac{\text{Biaya yang terjadi sampai tanggal ini}}{\text{Estimasi total biaya terkini}} = \text{Persentase penyelesaian}$$

- b. Metode pendekatan *cost-to-cost* adalah metode pengakuan pendapatan yang diukur berdasarkan persentase selesai yang diperoleh dari besarnya biaya yang terjadi untuk mencapai tahap penyelesaian pekerjaan proyek. Perhitungannya berdasarkan ukuran masukan (*input measures*), yaitu usaha-usaha dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pekerjaan suatu kontrak. Metode upaya atau usaha yang dikeluarkan (*efforts-expended method*). Metode ini menentukan persentase penyelesaian atas pelaksanaan pekerjaan proyek dengan cara membandingkan usaha-usaha yang telah tercurah dengan usaha-usaha yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek.

Persentase penyelesaian X Estimasi total pendapatan = Pendapatan yang diakui

Definisi ini diperkuat dengan pendapat Stice (2017) yang menyatakan bahwa metode upaya yang dikeluarkan didasarkan pada beberapa ukuran atas pekerjaan yang telah dilakukan. Ukuran-ukuran tersebut meliputi jam tenaga kerja, dolar tenaga kerja, jam mesin atau jumlah bahan baku. Tingkat penyelesaian diukur dengan cara yang serupa seperti metode *cost to cost* : rasio dari usaha yang telah dilakukan sampai tanggal tersebut terhadap estimasi total usaha yang masih harus dilakukan untuk seluruh kontrak pekerjaan dalam pelaksanaan.

2.5 Perusahaan Konstruksi

2.5.1 Pengertian Perusahaan Konstruksi

Proyek artinya sekumpulan kegiatan yang bekerjasama satu dengan lainnya dimana terdapat titik mulai serta titik selesai dan akibat tertentu, sebuah proyek umumnya bersifat lintas fungsi suatu organisasi sebagai akibatnya membutuhkan bermacam-macam keahlian dari aneka macam profesi serta organisasi. Dikutip dari Dipohusodo (2017), bahwa suatu proyek merupakan upaya yang mengerahkan sumber daya yang tersedia, yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan, sasaran serta harapan penting tertentu dan harus diselesaikan dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan kesepakatan. Suatu kegiatan proyek ialah kegiatan sementara dari anggota, material, maupun sarana dalam mencapai target/sasaran proyek pada kurun suatu waktu yang memiliki jadwal berakhir.

Proyek konstruksi ialah sebuah rangkaian aktivitas yang berkaitan satu dengan yang lainnya dalam capaian suatu tujuan yang memiliki batasan waktu, biaya serta mutu tertentu. Kegiatan proyek konstruksi akan membutuhkan *resources* (sumber daya) yaitu manusia, material, alat-alat, metode, dana/uang, informasi, dan waktu batasan kegiatan. Pekerjaan konstruksi tak pasti bisa diklasifikasi menjadi proyek konstruksi, namun wajib mempunyai kriteria khas mirip dibawah ini. Dimulai dari awal kegiatan proyek (awal rangkaian aktivitas) serta diakhiri menggunakan akhir proyek (akhir rangkaian aktivitas), dan memiliki jangka waktu yang biasanya terbatas. Rangkaian aktivitas proyek hanya satu kali sebagai akibatnya membentuk produk yg bersifat unik. Jadi tidak terdapat 2 atau lebih proyek yang identik, yang terdapat ialah proyek yang sejenis.

2.5.2 Jenis Proyek Konstruksi

Berdasarkan Ervianto (2015), suatu kegiatan proyek konstruksi bisa diklasifikasikan sebagai 2 jenis kelompok bangunan:

1. Bangunan Gedung
Tempat tinggal, tempat kerja, pabrik serta lain-lain. Ciri-ciri kelompok bangunan merupakan:
 - a. Pekerjaan dikerjakan di lokasi cukup kecil atau sempit serta kondisi tanah pondasi biasanya telah diketahui.
 - b. Manajemen diperlukan, terutama untuk kelangsungan pekerjaan.
 - c. Proyek konstruksi membentuk kawasan orang yang bekerja atau tempat tinggal bagi pada pekerja.
2. Bangunan sipil
Jalan raya, bendungan, jembatan, serta infrastruktur lain. Ciri-ciri kelompok bangunan sipil merupakan:
 - a. Pekerjaan dikerjakan di lokasi yang besar/luas maupun panjang serta kondisi tanah pondasi yang terlalu signifikan ketidakselarasan satu dengan lainnya pada sebuah proyek.
 - b. Manajemen diperlukan untuk menemukan solusi suatu persoalan.
 - c. Proyek konstruksi dikerjakan untuk mengontrol atau mengendalikan keadaan alam supaya bermanfaat bagi keselarasan seluruh umat manusia.

2.5.3 Kontrak Konstruksi

Menurut PSAK 72 (2017) paragraph 4, kontrak konstruksi adalah kontrak yang dilakukan negoisasi dengan khusus untuk pengadaan konstruksi suatu asset yang memiliki hubungan erat antara satu dengan lainnya dalam hal teknologi, rancangan, manfaat dan juga tujuan utama penggunaan. Diana (2017), mengemukakan bahwa kontrak konstruksi merupakan kesepakatan yang terjadi di antara pengguna jasa dengan pemberi jasa atau kontraktor untuk melakukan konstruksi atas asset tunggal, seperti jembatan, jalan, bangunan, dan asset tunggal lainnya. Waktu dimulainya pekerjaan sampai dengan penyelesaian, terkadang berada pada waktu periode yang berbeda. Dengan adanya perbedaan waktu atau periode tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah pengalokasian pendapatan kontrak dan beban kontrak. Beberapa yang sering terjadi persoalan dalam kontrak konstruksi yaitu mengenai pengakuan atas pendapatan karena dalam pengerjaan kontrak konstruksi membutuhkan waktu kurang dari satu periode akuntansi bahkan lebih dari satu periode akuntansi.

Pada kontrak konstruksi yang membutuhkan jangka waktu yang kurang dari satu periode akuntansi maka metode pengakuan pendapatan yang digunakan adalah metode kontrak selesai. Bagi kontrak konstruksi yang memiliki masa pengerjaan lebih dari satu periode, standar akuntansi keuangan memberikan pedoman kepada para pengusulan laporan keuangan untuk menggunakan metode pengakuan

pendapatan persentase penyelesaian. Menurut Irnawati (2022), kontrak konstruksi yang membutuhkan jangka waktu panjang dalam perjanjian atau kesepakatan antara kedua belah pihak sering kali untuk mengatur agar penjual atau kontraktor yang melakukan pembangunan dapat melakukan penagihan berdasarkan atas interval waktu yang telah ditentukan pada perjanjian atau disebut dengan system *termin*. Menurut Brahim (2021), dalam harga kontrak terdapat pada kontrak konstruksi, biasanya dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu:

1. Kontrak harga tetap
Perjanjian awal dengan kontraktor yang memiliki syarat bahwa kontraktor mengatakan setuju akan nilai atau biaya kontrak tetap atau dengan tarif yang tidak berubah pada setiap unit *output* yang dikeluarkan.
2. Kontrak biaya plus
Sebuah kontrak awal yang memberikan pernyataan apabila kontraktor mengeluarkan biaya-biaya yang sudah mendapatkan izin, maka akan diberikan penggantian sesuai nilai yang dikeluarkan dan ditambah dengan nilai imbalan yang akan didapatkan. Imbalan tersebut diperhitungkan atas dasar persentase tertentu dari biaya ataupun dari imbalan tetap.

2.5.4 Tahapan Kegiatan Proyek Konstruksi

Pada saat memulai aktivitas proyek konstruksi wajib melalui sebuah proses yang panjang yang didalamnya memuat tentang persoalan yang wajib diselesaikan pada proyek. pada suatu aktivitas konstruksi juga ada sebuah rangkaian aktivitas yang berurutan serta berkaitan. Seluruh aktivitas tadi dimulai sejak munculnya suatu inspirasi serta gagasan yang timbul dari kebutuhan, kemungkinan keterlaksanaan, klasifikasi rumusan kebutuhan, pembuatan rancangan awal (*preliminary design*), pembuatan rancangan absolut (*design development* serta lebih jelasnya *design*), persiapan administrasi untuk aplikasi, penentuan calon pelaksana (*procurement*), lalu aplikasi pembangunan di lokasi yang sudah ditentukan (*construction*), dan pemeliharaan dan persiapan penggunaan bangunan (*maintenance, start-up* serta *implementation*) aktivitas membangun berakhir ketika bangunan tersebut mulai dipergunakan (Ervianto, 2015).

1. Tahap studi kelayakan
Studi kelayakan merupakan penelitian perihal bisa tidaknya suatu proyek dilaksanakan dengan berhasil. pada hal ini studi kelayakan ialah bahan pertimbangan pada pengambilan suatu a keputusan a apakah akan didapatkan atau menolak suatu gagasan usaha yang sudah direncanakan. Pengertian layak tadi pada evaluasi ini artinya kemungkinan dari gagasan proyek yang akan dilaksanakan memberikan manfaat baik pada financial benefit dan juga social benefit. Berdasarkan Ervianto (2015), aktivitas yang dilaksanakan di tahap studi kelayakan (*feasibility study*) merupakan:
 - a. Menyusun rancangan proyek secara kasar serta membentuk perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk a menuntaskan proyek a tersebut.

- b. Meramalkan manfaat yang akan diperoleh. Bila proyek tadi dilaksanakan, baik manfaat eksklusif (manfaat ekonomis) dan juga manfaat tak eksklusif (fungsi sosial).
 - c. Menyusun analisa kelayakan proyek, baik secara ekonomis dan juga finansial.
 - d. Menganalisis akibat terhadap lingkungan yang mungkin terjadi jika proyek tersebut dilaksanakan.
2. Tahap penjelasan
- Tujuan tahap penjelasan (*briefing*) ialah untuk menerima penjelasan yang berasal dari pemilik proyek tentang fungsi proyek serta biaya yang diizinkan memperhitungkan serta membentuk taksiran biaya yang dibutuhkan. Aktivitas yang dilakukan di tahap penjelasan (*briefing*) merupakan:
- a. Menyusun planning kerja serta memilih para perencana serta para pakar.
 - b. Mempertimbangkan kebutuhan pemakai, keadaan lokasi serta lapangan, merencanakan rancangan, taksiran biaya, persyaratan mutu.
 - c. Mempersiapkan ruang lingkup kerja, jadwal waktu, taksiran biaya serta implikasinya, dan planning pelaksanaan.
 - d. Mempersiapkan sketsa menggunakan skala tertentu sebagai akibatnya dapat menyampaikan gambar berupa denah serta batas-batas proyek.
3. Tahap perancangan
- Tahap ini bertujuan untuk melengkapi penjelasan proyek serta memilih tata letak, rancangan, metode konstruksi, serta taksiran biaya konstruksi supaya mendapatkan persetujuan oleh pemilik proyek serta pihak berwenang yang terlibat. tahap ini pula mempersiapkan info pelaksanaan yang dibutuhkan, termasuk Gambar *planning* serta spesifikasi, dan melengkapi seluruh dokumen *tender*. Aktifitas yang dilaksanakan di tahap perancangan (*design*) merupakan:
- a. Membuat ikhtisar proyek sebagai penyelesaian akhir.
 - b. Menyelediki persoalan teknis
 - c. Memintai persetujuan akhir ikhtisar oleh pemilik proyek
 - d. Mempersiapkan rancangan skema termasuk taksiran biaya
 - e. Mempersiapkan rancangan detail
 - f. Mempersiapkan gambar kerja, spesifikasi serta jadwal
 - g. Mempersiapkan kasiran biaya akhir
 - h. Mempersiapkan daftar kuantitas
 - i. Mempersiapkan program pelaksanaan pendahuluan termasuk jadwal waktu.
4. Tahap pengadaan
- Mencari penyedia jasa yang akan menjadi pelaksana konstruksi ialah hal yang sangat krusial pada suatu proyek konstruksi. Proses ini dianggap procurement. Salah satu cara untuk mencari penyedia jasa ialah menggunakan pelelangan atau tender. Pelelangan didefinisikan menjadi

serangkaian aktivitas untuk menyediakan barang/jasa menggunakan cara membangun persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara serta memenuhi kondisi, sesuai metode serta norma tertentu yang sudah ditetapkan serta diikuti oleh pihak-pihak yang terkait secara azas sebagai akibatnya terpilih penyedia terbaik.

5. Tahap pelaksanaan

Tahap ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan yang diperlukan oleh pemilik proyek yang sudah dibuat oleh konsultan perencana pada Batasan biaya, waktu yang sudah disepakati (tepat waktu), serta menggunakan mutu yang sudah disyaratkan (sempurna mutu). Aktivitas yang dilakukan merupakan merencanakan, mengkoordinasi, mengendalikan seluruh operasional dilapangan. aktivitas perencanaan serta pengendalian ialah:

- a. Perencanaan serta pengendalian jadwal waktu pekerjaan.
- b. Perencanaan serta pengendalian organisasi lapangan.
- c. Perencanaan serta pengendalian tenaga kerja.
- d. Perencanaan serta pengendalian alat-alat dan materi

6. Tahap pemeliharaan dan persiapan penggunaan

Tahap pemeliharaan serta persiapan penggunaan (*maintenance and start up*) ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian bangunan yang sudah selesai dilaksanakan menggunakan dokumen kontrak yang sudah ditetapkan dan peruntukan fasilitas yang terdapat apakah sudah sinkron sebagaimana mestinya. Selain itu, di tahap ini pula dirancang suatu catatan tentang konstruksi berikut petunjuk operasinya serta melatih staff dalam memakai fasilitas yang tersedia. Aktivitas yang dilakukan di tahap *maintenance and start up* ini ialah:

- a. Mempersiapkan catatan pelaksanaan, baik berupa data-data selama pelaksanaan juga gambar pelaksanaan (*AS built drawing*).
- b. Meneliti bangunan secara cermat serta memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi.
- c. Mempersiapkan petunjuk operasional atau pelaksanaan dan panduan pemeliharanya.
- d. Melatih staff untuk melaksanakan pemeliharaan.

2.6 Penelitian Sebelumnya

2.6.1 Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya yang pernah dilakukan oleh pihak lain yang dapat dijadikan bahan pertimbangan yang berkaitan dengan masalah penelitian, antara lain.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti Sebelumnya	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Siwi dan Kartika (2022)	Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Berdasarkan PSAK 23 dan PSAK 72 Mengenai Pendapatan pada Perusahaan Manufaktur	Kinerja Keuangan, pengakuan pendapatan PSAK 23 dan pengakuan pendapatan PSAK 72	Analisis deskriptif kuantitatif	Rasio <i>price earning</i> terdapat beda signifikan saat penerapan PSAK 72. Dengan adanya aturan baru mengenai PSAK 72 dapat menjadikan laporan keuangan dengan pendapatan yang sesungguhnya. Nilai pendapatan saat menerapkan PSAK 72 pada masing-masing perusahaan menjadi lebih kecil jika dibandingkan dengan nilai pendapatan saat masih menerapkan PSAK 23.
2	Sukardi (2022)	Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan BUMN Bidang Konstruksi Bangunan yang <i>Listed</i> di Bursa Efek Indonesia Sebelum dan Selama Pandemi Covid-19	Kinerja Keuangan (Imbalan kepada pemegang saham, imbalan investasi, rasio kas, rasio lancar, <i>collection periods</i> , perputaran persediaan, perputaran total asset, raso modal sendiri terhadap aktiva)	Analisis deskriptif kualitatif	analisis kinerja keuangan terhadap 4 (empat) BUMN Bidang Konstruksi Bangunan yang <i>listed</i> di BEI menunjukkan bahwa rata-rata kinerja keuangan sebelum covid-19 lebih baik di bandingkan selama covid-19.
3	Apriwanto dan Sasono (2022)	Analisis Kinerja Perusahaan BUMN Sektor Konstruksi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Kinerja Keuangan (<i>current ratio, quick ratio, cash ratio, return on asset, return of equity, gross profit margin, operating profit margin, net profit margin, debt to asset ratio, debt to equity ratio, long term debt to equity ratio, operating income to liabilities ratio</i>)	Analisis deskriptif kualitatif	Total skor yang terbaik (urutan pertama) adalah PT. Pembangunan Perumahan, urutan kedua adalah PT. Wijaya Karya, urutan ketiga adalah PT. Waskita Karya, urutan terakhir adalah PT. Adhi Karya.
4	Firdayana, dkk (2022)	Analisis Dampak Kinerja Keuangan Perusahaan Ditinjau dari Rasio Likuiditas, Solvabilitas dan Profitabilitas pada PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Meritjan Kediri (2019-2021)	Kinerja Keuangan (<i>current ratio, quick ratio, cash ratio, debt to asset ratio, net profit margin, fross profit margin</i>)	Analisis deskriptif kualitatif	Rasio likuiditas PT. Perkebunan Nusantara X Pabrik Gula Meritjan Kediri secara keseluruhan kemampuan perusahaan membayar kewajiban (utang) jangka pendek dalam kondisi yang baik. Berdasarkan rasio solvabilitas secara keseluruhan dinyatakan

No	Nama Peneliti Sebelumnya	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
					dalam kondisi yang baik. Berdasarkan rasio profitabilitas secara keseluruhan dapat dinyatakan dalam kondisi yang kurang baik.
5	Nafisah dan Humaidi (2022)	Analisis Penerapan PSAK 72 Tentang Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan Kontrak PT. Bhandra Graha Reksa Palembang	Pengakuan dan pengukuran pendapatan kontrak berdasarkan PSAK 72	Analisis deskriptif kualitatif	Pengakuan pendapatan kontrak yang diterapkan PT. Bhandra Graha Reksa Palembang dalam mengakui pendapatan perusahaan belum sepenuhnya menerapkan Psak No. 72.
6	Hidayat (2021)	Pengaruh Penerapan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Telekomunikasi Di Masa Pandemi Covid-19	Independen : PSAK 72 Pengaruh Penerapan Dependen : Kinerja Keuangan	Analisis deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 72 berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.
7	Pratiwi dan Putri (2021)	Analisis Akuntansi Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 pada PT. Nexusled Cahaya Lestari	PSAK 72 pengakuan pendapatan	Analisis deskriptif kualitatif	Penerapan pengakuan pendapatan PT. Nexusled Cahaya Lestari belum efisien sebagai pendapatan PT. Nexusled Cahaya Lestari berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 72 dalam mencatat laporan laba Rugi.

No	Nama Peneliti Sebelumnya	Judul	Variabel	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
8	Kurniawati, dkk (2021)	Analisis Pengakuan Pendapatan atas Jasa Konstruksi pada PT. Eva Mahkota Pura	PSAK 72 pengakuan pendapatan	Analisis deskriptif kualitatif	PT. Eva Mahkota Pura telah menerapkan PSAK 72 dengan menggunakan metode sepanjang waktu kontrak (<i>over time</i>) dan menerapkan (<i>Physical Progress</i>) metode fisik dalam mengakui pendapatannya yang didasarkan pada hasil unit keluaran. Perusahaan mengukur nilai kontrak yang diakui dengan mengurangi nilai yang sesuai dengan kontrak perjanjian dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak) yang sudah termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan PPH (Pajak Penghasilan) Final.
9	Halim (2020)	Pengaruh Implementasi Pengakuan Pendapatan PSAK 72 Terhadap Kinerja Kaungan (Studi Empiris pada Perusahaan Real Estate Tahun 2018-2019)	Independen : PSAK 72 Implementasi Pengakuan Pendapata Dependen : Kinerja Keuangan	Analisis deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi PSAK 72 terhadap rasio likuiditas berpengaruh negatif. Implementasi PSAK 72 terhadap rasio aktivitas, solvabilitas, profitabilitas, dan pasar tidak berpengaruh, artinya PSAK 72 memiliki pengaruh rendah. Implementasi PSAK 72 dapat dijadikan sinyal positif kepada <i>shareholder</i> karena perusahaan telah memberikan tranparansi kebijakan PSAK 72
10	Agustrianti, dkk (2020)	Dampak Penerapan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan <i>Property, Real Estate And Building Construction</i>	Independen : PSAK 72 Penerapan Pengakuan Pendapatan Dependen : Kinerja Keuangan	Analisis deskriptif kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dampak penerapan PSAK 72 berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

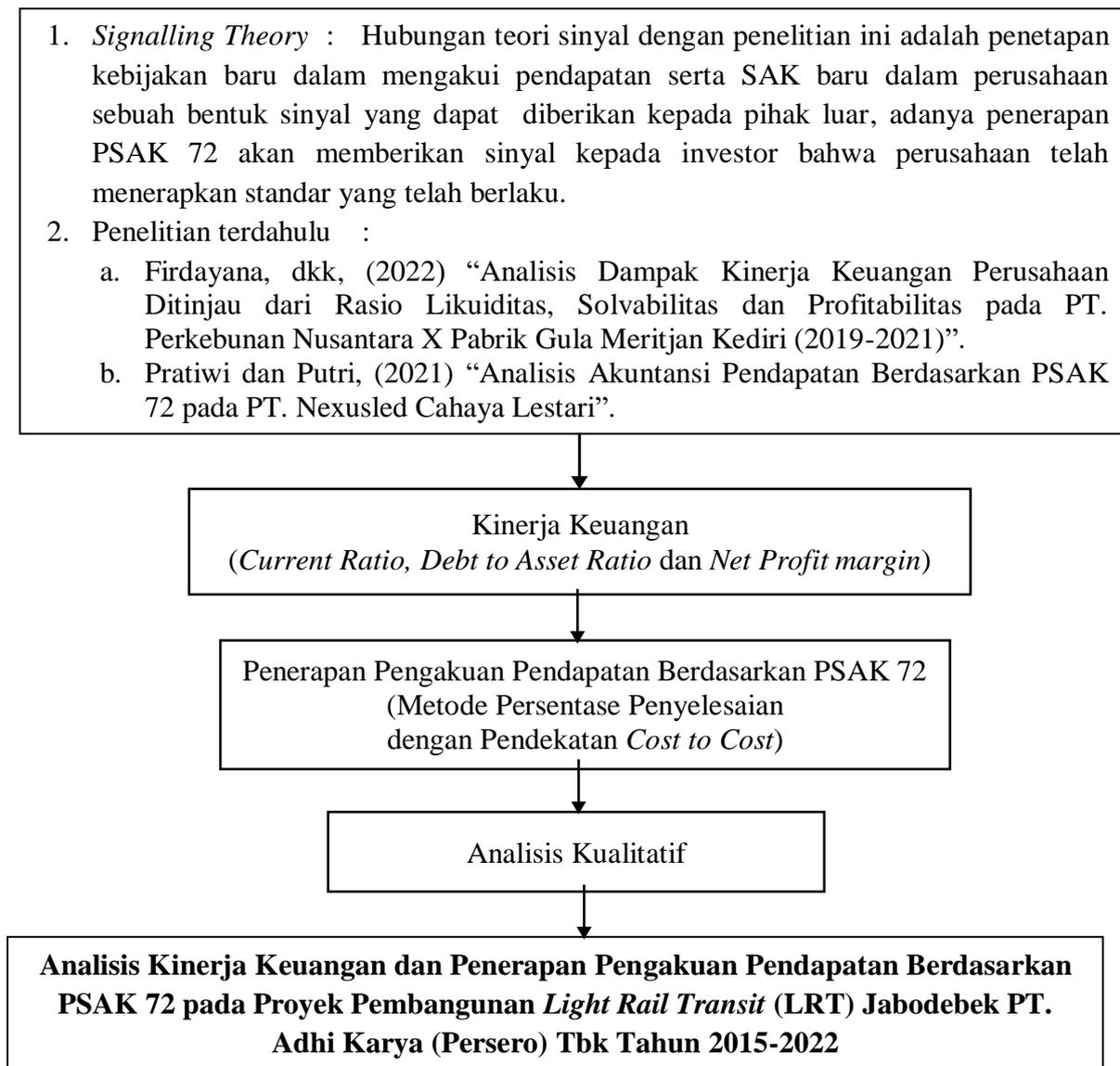
2.6.2 Perbedaan dan Persamaan Penelitian

Secara keseluruhan judul penelitian memiliki kesamaan variabel kinerja keuangan ataupun penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 dengan

penelitian terdahulu, metode analisis data. Perbedaan penelitian ini terletak pada sektor perusahaan yang diteliti, elemen variabel kinerja keuangan, lokasi penelitian serta periode penelitian terbilang baru 2015 sampai 2022.

2.7 Kerangka Pemikiran

Kerangka merupakan bagian dari suatu bentuk sistem, sedangkan konsep merupakan acuan atau batasan dari teori yang ada. Jadi, kerangka konseptual merupakan unsur dasar pokok dalam suatu penelitian dimana konsep teoritis akan berubah kedalam definisi operasional. Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang di kemukakan, maka penulis membuat kerangka konseptual mengenai Analisis Kinerja Keuangan dan Penerapan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 pada Proyek Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2015-2022 yang dapat digambarkan pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif. Menurut Sugiyono (2018) penelitian deskriptif yaitu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sebagaimana adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Menurut Rahmadi (2016), metode penelitian merupakan suatu usaha yang dilakukan dalam mengumpulkan data, mencatat dan menganalisa suatu masalah secara sistematis dan berdasarkan ilmu pengetahuan mengenai sifat-sifat daripada kejadian atau keadaan-keadaan dengan maksud untuk menerapkan faktor-faktor pokok atau akan menentukan paham-paham baru dalam mengembangkan metode-metode baru. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2018) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti adalah instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif didefinisikan oleh Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2017), sebagai proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan data perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Peneliti menggunakan penelitian kualitatif karena mempunyai tiga alasan yaitu: (1) lebih mudah mengadakan penyesuaian dengan kenyataan yang berdimensi ganda, (2) lebih mudah menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan subjek penelitian, (3) memiliki kepekaan dan daya penyesuaian diri dengan banyak pengaruh yang timbul dari pola-pola nilai yang dihadapi. Sedangkan menggunakan pendekatan deskriptif, karena tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan suatu gejala atau keadaan yang diteliti secara apa adanya serta diarahkan untuk memaparkan fakta-fakta, kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat (Moleong, 2017). Jadi, melalui penelitian deskriptif ini agar peneliti mampu menganalisis kinerja keuangan (*current ratio*, *debt to asset ratio* dan *net profit margin*) dan penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 pada Proyek Pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2022.

3.2 Objek, Unit Analisis dan Lokasi Penelitian

3.2.1 Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mengenai analisis kinerja keuangan dan penerapan pengakuan pendapatan PSAK 72 pada proyek Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2015-2022.

3.2.2 Unit Analisis Penelitian

Unit analisis dalam penelitian merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Menurut Arikunto (2019), bahwa unit analisis merupakan satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisisnya adalah PT. Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai salah satu perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.2.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai salah satu perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan input data tahun 2015-2022. Penelitian ini dilakukan di PT. Adhi Karya (Persero) Tbk yang beralamat di Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18 Jakarta 12510 – Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini diakses melalui <https://adhi.co.id/> Sedangkan waktu penelitian ini dilaksanakan pada bulan Desember 2022 sampai bulan Mei 2023.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data kualitatif. Menurut Gunawan (2015), data kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dan diarahkan pada latar dan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandang sebagai bagian dari suatu keutuhan. Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen), di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci.

Penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah (*grounded theory*) dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.

3.3.2 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dimana data sekunder adalah data yang diperoleh, didapat atau dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga tertentu. Data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2022 sebagai salah satu perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

3.4 Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:38), definisi operasionalisasi variabel merupakan penentuan konstruk atau sifat yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat diukur.

Tabel 3.1 Variabel Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Kinerja keuangan	<i>Current Ratio (CR)</i>	- Aset lancar - Liabilitas lancar	$\frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Liabilitas Lancar}} \times 100\%$	Rasio
	<i>Debt to Asset Ratio (DAR)</i>	- Total liabilitas - Total aset	$\frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$	Rasio
	<i>Net Profit Margin (NPM)</i>	- Laba bersih - Total pendapatan	$\frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$	Rasio
Penerapan pengakuan pendapatan PSAK 72	Penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72	Metode persentase penyelesaian	$\frac{\text{Biaya yang terjadi sampai tanggal ini}}{\text{Estimasi total biaya terkini}}$	Rasio

3.5 Metode Pengumpulan Data

3.5.1 Data Sekunder

Data yang dikumpulkan atau diperoleh dari sumber-sumber yang ada dengan metode dokumentasi. Data ini diperoleh dari buku-buku atau laporan-laporan terdahulu dan mengambil data laporan keuangan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk terkait kinerja keuangan dan penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72.

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini yakni analisis kualitatif, yaitu menganalisis data laporan keuangan dan data pendapatan usaha proyek yang telah dikumpulkan dengan cara menghitung, menganalisis, dan mengklasifikasikan data berupa angka. Adapun tahapan analisis data untuk memprediksi kinerja keuangan

dan pengakuan pendapatan menggunakan metode persentase penyelesaian yang diterapkan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dalam perolehan pendapatan usahanya diantaranya :

1. Menghitung rasio kinerja keuangan

a. Rasio likuiditas yang diproksikan dengan *Current Ratio* (CR)

Rasio likuiditas adalah rasio yang memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan untuk memenuhi utang-utang (liabilitas) jangka pendeknya. Penelitian ini diproksikan dengan rasio *current ratio*. Rasio ini dipilih karena merupakan ukuran yang paling umum dipakai untuk mengetahui kesanggupan perusahaan dalam memenuhi liabilitas lancar dengan menunjukkan seberapa jauh tuntutan dari kreditor jangka pendek dipenuhi oleh aset yang diperkirakan menjadi uang tunai dalam periode yang sama dengan jatuh tempo utang. Standar umum rata-rata industri konstruksi minimal 200% (2:1) atau 2 kali, artinya dengan hasil rasio tersebut perusahaan berada di titik aman dalam jangka pendek (Kasmir, 2015). Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$CR = \frac{\text{Aset Lancar}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$$

b. Rasio solvabilitas yang diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR)

Rasio solvabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh liabilitasnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang ketika perusahaan dilikuidasi. Penelitian ini diproksikan dengan *debt to asset ratio*. Rasio ini dipilih karena menggambarkan perbandingan antara total liabilitas dan total aset sehingga dapat diketahui apakah aset perusahaan cukup (*solvable*) atau tidak cukup (*insolvable*) untuk membayar semua liabilitasnya. Standar pengukuran rata-rata industri konstruksi adalah 35% (Kasmir, 2015). Apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$DAR = \frac{\text{Total Liabilitas}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

c. Rasio profitabilitas yang diproksikan dengan *Net Profit Margin* (NPM)

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan sebuah perusahaan untuk periode waktu tertentu. Penelitian ini diproksikan dengan *net profit margin ratio*. Rasio ini dipilih karena merupakan salah satu rasio yang berpengaruh signifikan untuk memprediksi pertumbuhan laba. Standar umum rata-rata industri konstruksi

untuk *net profit margin* adalah 20%, jika berada di atas rata-rata industri maka margin laba suatu perusahaan baik, begitu pun sebaliknya (Kasmir, 2015). Rasio ini dapat dihitung dengan rumus:

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100\%$$

2. Menghitung pengakuan pendapatan PSAK 72

Metode persentase penyelesaian menghitung pengakuan berkelanjutan atas pendapatan dan beban terkait proyek jangka panjang berdasarkan proporsi pekerjaan yang diselesaikan. Dengan melakukan hal ini, penjual dapat mengakui sejumlah keuntungan atau kerugian yang terkait dengan suatu proyek pada setiap periode akuntansi di mana proyek tersebut terus aktif. Metode ini bekerja paling baik jika memungkinkan untuk memperkirakan tahapan penyelesaian proyek secara berkelanjutan, atau memperkirakan sisa biaya untuk menyelesaikan sebuah proyek. Pada penelitian ini pengakuan pendapatan PSAK 72 dihitung berdasarkan metode persentase penyelesaian dengan pendekatan *Cost to Cost*. Metode ini menentukan persentase penyelesaian atas pelaksanaan pekerjaan proyek dengan cara membandingkan usaha-usaha yang telah tercurah dengan usaha-usaha yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek.

$$\text{Metode Pesentase Penyelesaian} = \frac{\text{Biaya yang terjadi sampai tanggal ini}}{\text{Estimasi total biaya terkini}}$$

Adapun langkah-langkah yang diperlukan untuk metode persentase penyelesaian adalah sebagai berikut:

- a. Kurangi total estimasi biaya kontrak dari total estimasi pendapatan kontrak untuk mendapatkan total estimasi margin kotor.
- b. Ukur sejauh mana kemajuan menuju penyelesaian, menggunakan salah satu metode yang dijelaskan di atas.
- c. Kalikan total estimasi pendapatan kontrak dengan estimasi persentase penyelesaian untuk mendapatkan jumlah total pendapatan yang dapat diakui.
- d. Kurangi pendapatan kontrak yang diakui sampai saat ini hingga periode sebelumnya dari jumlah total pendapatan yang dapat diakui. Kenali hasilnya pada periode akuntansi saat ini.
- e. Hitung biaya pendapatan yang diperoleh dengan cara yang sama. Ini berarti mengalikan persentase penyelesaian yang sama dengan total perkiraan biaya kontrak, dan mengurangkan jumlah biaya yang sudah diakui untuk mendapatkan biaya pendapatan yang harus diakui pada periode akuntansi berjalan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Perkembangan dan Kegiatan Usaha

PT Adhi Karya (Persero) Tbk, secara resmi berdiri pada 1 Juli 1974 berdasarkan Akta Notaris No. 1 Tanggal 1 Juli 1974 yang dibuat di hadapan Kartini Muljadi SH, Notaris di Jakarta, yang diubah melalui Akta No. 2 Tanggal 3 Desember 1974 oleh Notaris yang sama dan telah disahkan pada Tanggal 7 Januari 1975 melalui Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/5/13. Pada awalnya, PT Adhi Karya (Persero) Tbk merupakan perusahaan pemborong milik Pemerintah Kolonial Belanda yang didirikan pada tahun 1960 dengan nama *Architecten-Ingenieurs en Aannemersbedrijf*.

Sejalan dengan perkembangan sejarah Negara Republik Indonesia, maka pada tahun 1960 Pemerintah Republik Indonesia melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan milik Pemerintah Belanda melalui Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1960. Peraturan tersebut kemudian diundangkan oleh Menteri Muda Kehakiman pada tanggal 16 Januari 1960 di Jakarta dan diatur lebih lanjut melalui Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik No. 5 Tahun 1960 tanggal 11 Maret 1960. Pada tahun 1961, Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 65 Tahun 1961 Tentang Pendirian Perusahaan Negara PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan diundangkan oleh Sekretaris Negara pada tanggal 29 Maret 1961 di Jakarta, menyatakan bahwa perusahaan bangunan bekas milik Belanda bernama *Naamloze Vennootschap "Architecten-Ingenieur en Aannemersbedrijf Associatie Selle en de Bruyn, Reyerse en de vries N.V."* ("Associatie N.V.") yang telah dikenakan nasionalisasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 1960, dengan ini dilebur ke dalam P.N. PT Adhi Karya (Persero) Tbk dan segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Perusahaan Bangunan "*Architecten-Ingenieursen Aannemersbedrijf Associatie Selle en de Bruyn, Reyerse en de Vries N.V."* ("Associatie N.V.") beralih kepada P.N. "PT Adhi Karya (Persero) Tbk".

Pada tahun 1971, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 1971 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Bangunan Negara PT Adhi Karya (Persero) Tbk menjadi Perusahaan Perseroan (Persero), yang ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dan diundang oleh Sekretaris Negara Republik Indonesia pada tanggal 22 Juli 1971 di Jakarta. Peraturan tersebut menjadi dasar atas dilakukannya pengalihan bentuk perusahaan dari Perusahaan Bangunan menjadi perusahaan perseroan (Persero). Perkembangan bisnis yang pesat membawa PT Adhi Karya (Persero) Tbk menjadi perusahaan konstruksi pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Maret 2004. Hal ini melatar belakangi perubahan nama Perseroan menjadi PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan kepemilikan saham sebesar 51% oleh Pemerintah Republik

Indonesia, 24,5% oleh Manajemen Perseroan melalui program *Employee Management Buy Out* (EMBO), 24,5% oleh masyarakat. Status PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebagai Perseroan Terbatas dan Perusahaan Terbuka mendorong ADHI untuk meningkatkan daya saing melalui optimalisasi sumber daya yang dimiliki dengan harapan dapat mencatatkan kinerja terbaik dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Pada tahun 2018, terjadi peningkatan persaingan usaha dan perang harga di industri konstruksi yang signifikan, sehingga mendorong PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk melakukan redefinisi visi dan misi, yaitu “Menjadi korporasi inovatif dan berbudaya unggul untuk pertumbuhan yang berkelanjutan.” Perubahan Visi tersebut dikukuhkan melalui Surat Keputusan Direksi PT Adhi Karya (Persero) Tbk No. 014-6/2018/028 tanggal 9 Maret 2018. Visi tersebut menggambarkan motivasi Perseroan untuk bergerak ke bisnis lain yang terkait dengan inti bisnis Perseroan melalui sebuah *tagline* yang menjadi penguat yaitu “*Beyond Construction*”. Pertumbuhan yang bernilai dan berkesinambungan dalam Perseroan menjadi salah satu aspek penting yang senantiasa dikelola PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat luas. PT Adhi Karya (Persero) Tbk mampu menunjukkan kemampuannya sebagai perusahaan konstruksi terkemuka di Asia Tenggara melalui penciptaan daya saing yang optimal dengan pengalaman yang dibuktikan melalui keberhasilan proyek konstruksi yang sudah dijalankan.

PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengelompokkannya ke dalam 4 (empat) lini kegiatan usaha utama, yaitu *engineering* dan konstruksi, properti dan *hospitality*, manufaktur dan investasi dan konsesi yang diuraikan berikut ini:

1. *Engineering* dan konstruksi

Produk dan jasa yang dihasilkan pada segmen *engineering* dan konstruksi, meliputi:

- a. Konstruksi seluruh sektor bangunan gedung;
- b. Konstruksi seluruh sektor bangunan sipil (di antaranya konstruksi jalan, jembatan, jalan dan jembatan kereta api, pelabuhan, dermaga, bendungan, bangunan pengelolaan air bersih dan limbah, stasiun, dan lain-lain);
- c. Pekerjaan mekanikal serta elektrikal;
- d. Pembangunan sarana dan prasarana perkeretaapian;
- e. Kelistrikan, telekomunikasi, perminyakan, agro industri dan petrokimia.

2. Properti dan *hospitality*

Dalam menjalankan bisnis properti, PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengembangkan kawasan gedung bertingkat (*highrise building*), baik untuk komersial, perkantoran maupun hunian (*apartment*), dan hotel. Selain itu, PT Adhi Karya (Persero) Tbk turut mengembangkan kawasan hunian yang berkualitas, *landed house*, rumah kantor (rukan), rumah toko (ruko) dan pusat perbelanjaan (mall) baik itu dalam pengembangan lahan maupun dalam pengembangan desain pemukiman dengan konsep Transit Oriented

Development (TOD), yaitu pengembangan properti yang terintegrasi dengan stasiun LRT yang saat ini sedang dibangun oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

3. Manufaktur

Produk yang dihasilkan PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada segmen ini adalah beton pracetak. Adapun proyek-proyek yang telah menggunakan beton pracetak yang diproduksi melalui entitas anak usaha, yaitu PT Adhi Persada Beton, antara lain *Precast Concrete Piles, Precast Concrete Sheet Pile, Precast Concrete Railways, Precast Concrete Building, Precast Concrete Bridge, Precast Concrete Marine, Precast Concrete Drainage*, dan *Precast Concrete* lainnya.

4. Investasi dan konsesi

Komitmen PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk tumbuh secara berkelanjutan salah satunya diwujudkan melalui pengembangan kegiatan bisnis investasi dan konsesi. Segmen bisnis ini dijalankan oleh Perseroan dengan skema *Private Project Partnership* (PPP) atau Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) melalui penyertaan modal mandiri dari PT Adhi Karya (Persero) Tbk maupun dengan melakukan pembentukan usaha patungan antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhan ekuitas. Badan Usaha Pelaksana (BUP) yang dihasilkan dari kegiatan investasi ini antara lain meliputi proyek infrastruktur transportasi (jalan tol, jembatan dan prasarana perkeretaapian), kawasan (pariwisata dan bandara), energi (Pembangkit Energi Tenaga Sampah), penyediaan atau pengelolaan air, dan pengelolaan limbah. Kegiatan investasi ini meliputi kegiatan perusahaan pada investasi baik untuk proyek yang akan menjadi *feeding* konstruksi maupun *recurring income*.

4.1.2 Visi, Misi dan Nilai Budaya PT Adhi Karya (Persero) Tbk

PT Adhi Karya (Persero) Tbk merupakan sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. Visi dan Misi merupakan sebuah pernyataan yang digunakan sebagai cara untuk mengomunikasikan tujuan dari sebuah organisasi atau perusahaan. Adapun Visi, Misi dan Nilai Budaya PT Adhi Karya (Persero) Tbk adalah sebagai berikut :

1. Visi

Menjadi Korporasi Inovatif dan Berbudaya Unggul untuk Pertumbuhan Berkelanjutan.

2. Misi

Adapun Misi PT Adhi Karya (Persero) Tbk adalah sebagai berikut :

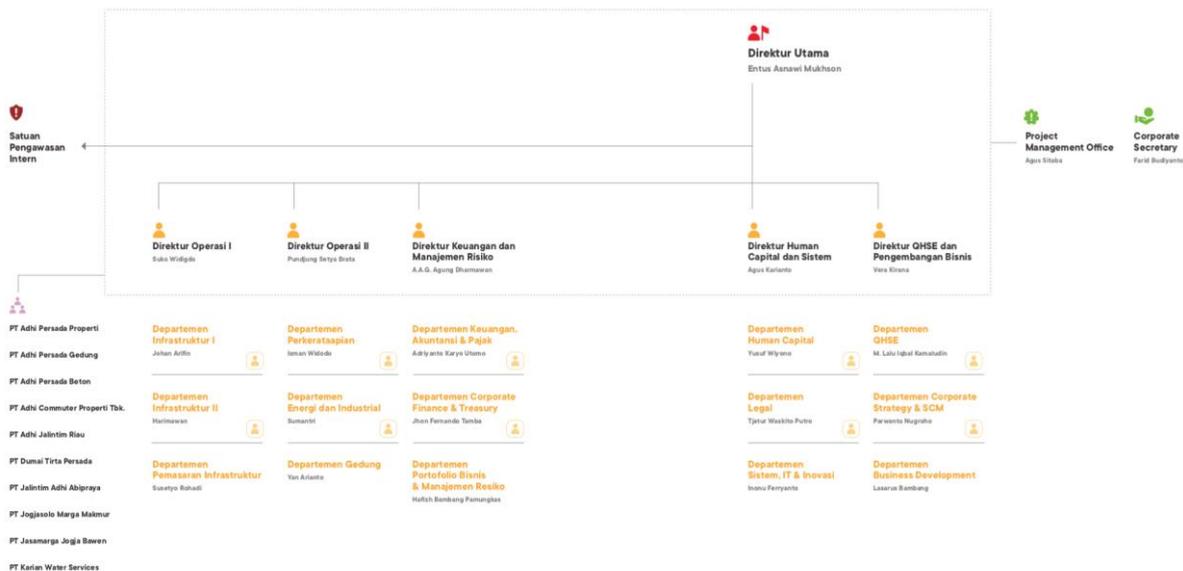
- a. Membangun insan yang unggul, profesional, amanah, dan berjiwa wirausaha.
- b. Mengembangkan bisnis konstruksi, rekayasa, *property* industri, dan investasi yang bereputasi.
- c. Mengembangkan inovasi produk dan proses untuk memberi solusi serta *impact stakeholders*.
- d. Menjalankan organisasi dengan tata kelola perusahaan yang baik.

- e. Menjalankan sistem manajemen yang menjamin pencapaian sasaran kualitas, keselamatan, kesehatan, dan lingkungan kerja.
 - f. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana untuk pembuatan keputusan dan pengelolaan risiko korporasi.
3. Nilai Budaya
- Adapun Nilai Budaya PT Adhi Karya (Persero) Tbk adalah sebagai berikut :
- a. Amanah = memegang teguh kepercayaan yang diberikan
 - b. Kompeten = terus belajar mengembangkan kapabilitas
 - c. Harmonis = saling peduli dan menghargai perbedaan
 - d. Loyal = berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
 - e. Adaptif = terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
 - f. Kolaboratif = membangun kerjasama yang sinergi.

4.1.3 Struktur Organisasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi dibuat karena memiliki sejumlah fungsi dan manfaat diantaranya menjelaskan tanggung jawab anggota organisasi atau perusahaan, menjelaskan kedudukan anggota organisasi atau perusahaan, menjelaskan pembagian tugas setiap jabatan dan menjelaskan jalur hubungan dalam pekerjaan.

Struktur Organisasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk



Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT Adhi Karya (Persero) Tbk

Sumber : Annual Report PT Adhi Karya (Persero) Tbk, (2023)

Dari struktur organisasi di atas dapat dilihat, bahwa setiap perusahaan pasti mempunyai struktur organisasi setiap bagian dan setiap bawahan bertanggung jawab kepada tugas dan atasannya. Selain itu, setiap bagian memiliki fungsi, tugas dan tanggung jawab masing-masing yang merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal tersebut diharapkan perusahaan akan mampu bersaing tidak hanya dalam tingkat lokal melainkan dalam tingkat nasional dan internasional sesuai tuntutan persaingan pasar. Adapun fungsi, tugas dan tanggung jawab semua divisi telah penulis uraikan sebagai berikut :

1. Direktur Utama

Adapun tugas dan tanggung jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasi penyelenggaraan fungsi pengurusan/ pengelolaan perusahaan oleh para anggota *Board of Director* sesuai tugas pokok Perusahaan dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh RUPS.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan *Board of Directors* yang dilakukan oleh para Direksi dan mengendalikan pelaksanaan tugas meliputi pengawasan intern, secretariat Perusahaan, perencanaan strategis Perusahaan, pengadaan barang dan/ atau jasa, manajemen risiko dan kepatuhan serta manajemen Proyek.
- c. Mengkoordinasikan kegiatan dan pelaksanaan tugas seluruh Direktur, dalam hal:
 - 1) Merencanakan, mengembangkan dan menetapkan kebijakan umum Perusahaan berdasarkan prinsip efisiensi, efektif dan sesuai dengan visi, misi dan tujuan Perusahaan.
 - 2) Mengarahkan, mengembangkan dan menetapkan strategi pengelolaan Perusahaan secara menyeluruh.
 - 3) Mengendalikan dan mengevaluasi seluruh kegiatan Perusahaan.
 - 4) Mengkoordinir menyiapkan RJPP.
 - 5) Menyampaikan RJPP yang telah ditandatangani Bersama dengan Dewan Komisaris kepada RUPS untuk mendapatkan pengesahan.

2. Direktur Operasi

Adapun tugas dan tanggung jawab Direktur Operasi adalah sebagai berikut:

- a. Bertanggung jawab terhadap proses operasional, produksi, proyek hingga kualitas produksi.
- b. Bertanggung jawab terhadap pengembangan kualitas produk maupun karyawan yang terlibat.
- c. Menyusun strategi dalam pemenuhan target perusahaan, dan cara mencapai target tersebut.
- d. Mengecek, mengawasi dan menentukan semua kebutuhan dalam proses operasional perusahaan.
- e. Merencanakan, menentukan, mengawasi, mengambil keputusan serta melakukan koordinasi dalam hal anggaran untuk operasional perusahaan.

- f. Mengawasi seluruh karyawan dan memastikan mereka menjalankan tugas sesuai dengan yang diperintahkan.
 - g. Membuat laporan kegiatan untuk diberikan kepada direktur utama.
3. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko
- Adapun tugas dan tanggung jawab Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:
- a. Mengarahkan dan mengkoordinasikan proses penyusunan anggaran yang terintegrasi dengan Direktur Utama dan semua departemen.
 - b. Mengkoordinasi dan mengontrol sistem pencatatan arus kas yang terdiri pencatatan kas, piutang, rekonsiliasi bank, aset tetap, dan utang.
 - c. Mengawasi laporan perpajakan.
 - d. Mengontrol dan mengevaluasi penyajian laporan keuangan perusahaan.
 - e. Bertanggung jawab atas pengambilan keputusan di bidang finansial berdasarkan hasil analisis pada laporan keuangan yang ada.
4. Direktur *Human Capital* dan *System*
- Adapun tugas dan tanggung jawab Direktur *Human Capital* dan *System* adalah sebagai berikut:
- a. Merencanakan, mengembangkan, dan mengimplementasikan strategi pada bidang pengelolaan dan pengembangan SDM, termasuk perekrutan karyawan, kontrak kerja, konsultasi, pelatihan, hingga penggajian.
 - b. Menangani dan memantau kinerja dan performa seluruh karyawan perusahaan.
 - c. Mengendalikan anggaran belanja SDM tiap departemen sesuai dengan anggaran yang telah disepakati.
 - d. Menginformasikan kepada para karyawan jika terdapat perubahan kebijakan yang ada dalam perusahaan.
 - e. Membuat program yang dapat meningkatkan moral dan pengetahuan karyawan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan.
 - f. Mengevaluasi dan memberikan penilaian terhadap kinerja para karyawan yang bekerja sama dengan tim eksekutif.
5. Direktur QHSE dan Pengembangan Bisnis
- Adapun tugas dan tanggung jawab QHSE dan Pengembangan Bisnis adalah sebagai berikut:
- a. Mengaudit dan melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kerja.
 - b. Memberikan peraturan-peraturan standart dalam setiap Prosedur pekerjaan.
 - c. Menjadi penyambung informasi perusahaan dengan pihak HSE di lokasi proyek maupun di Unit pekerjaan.
 - d. Bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan proyek dari aspek HSE.
 - e. Bertanggung jawab terhadap keselamatan kerja dan keamanan dilokasi proyek serta anak buahnya seperti *safety officer*, *safety supervisor*, *safety engineer*, *safety admin*, *safety man* dll.

4.2 Hasil Penelitian

Kegiatan usaha PT Adhi Karya (Persero) Tbk dilakukan sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan No. 1 Tanggal 1 Juli 1974 tersebut dibidang usaha atau kegiatan usaha utamanya adalah bergerak dalam bidang usaha konstruksi. PT Adhi Karya (Persero) Tbk menjadi perusahaan konstruksi pertama yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) sehingga mendorongnya untuk meningkatkan daya saing melalui optimalisasi sumber daya yang dimiliki dengan harapan dapat mencatatkan kinerja terbaik dan memberikan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan.

Analisis kinerja keuangan terhadap Penerapan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 pada Proyek Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek PT. Adhi Karya (Persero) merupakan salah satu pengukuran kondisi keuangan perusahaan yang perlu mendapatkan perhatian dari pihak manajemen dan pengguna keputusan dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Adanya penurunan pada kinerja keuangan akan mengakibatkan penurunan pada pengakuan pendapatan perusahaan berdasarkan PSAK 72. Pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 pada Proyek Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek PT. Adhi Karya (Persero) harus dikelola dengan baik, agar tidak terjadinya penurunan kinerja keuangan baik *Current Ratio* (CR), *Debt to Asset Ratio* (DAR) maupun *Net Profit Margin* (NPM).

4.2.1 Hasil Analisis Kinerja Keuangan pada Proyek Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2022

Pengukuran kinerja keuangan dapat dinilai dengan menggunakan analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan merupakan metode yang umum dilakukan untuk mengukur kinerja perusahaan di bidang keuangan. Adapun dalam penelitian ini rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pada segmen proyek infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk selama Tahun 2015-2022 *Current Ratio* (CR), *Debt to Asset Ratio* (DAR) dan *Net Profit Margin* (NPM). Berikut ini merupakan kondisi kinerja keuangan segmen proyek infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2022, berikut:

1. Kinerja Keuangan yang Diprosikan dengan *Current Ratio* (CR)

Current Ratio (CR) merupakan jenis rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas utang lancar (utang jangka pendek) dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Berikut ini merupakan nilai *current ratio* pada segmen proyek infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2022,

Tabel 4.1 Kinerja Keuangan yang Diprosikan dengan *Current Ratio* (CR) Tahun 2015-2022

Tahun	Aset Lancar	Liabilitas Lancar	<i>Current Ratio</i> (CR) (%)	Keterangan
2015	Rp4.634.556.299.628	Rp4.127.618.535.544	112,28	
2016	Rp8.335.220.720.608	Rp5.815.269.737.833	143,33	31,05
2017	Rp14.121.247.717.170	Rp3.939.532.098.581	358,45	215,12
2018	Rp11.295.662.893.890	Rp9.823.292.547.370	114,99	-243,46
2019	Rp16.697.812.262.398	Rp14.406.964.929.169	115,90	0,91
2020	Rp18.032.768.792.573	Rp16.109.744.074.929	111,94	-3,96
2021	Rp25.840.353.434.882	Rp23.804.668.440.720	108,55	-3,39
2022	Rp25.917.445.578.998	Rp23.815.940.124.405	108,82	0,27
Rata-rata	Rp15.609.383.462.518	Rp12.730.378.811.069	146,78	

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2023)

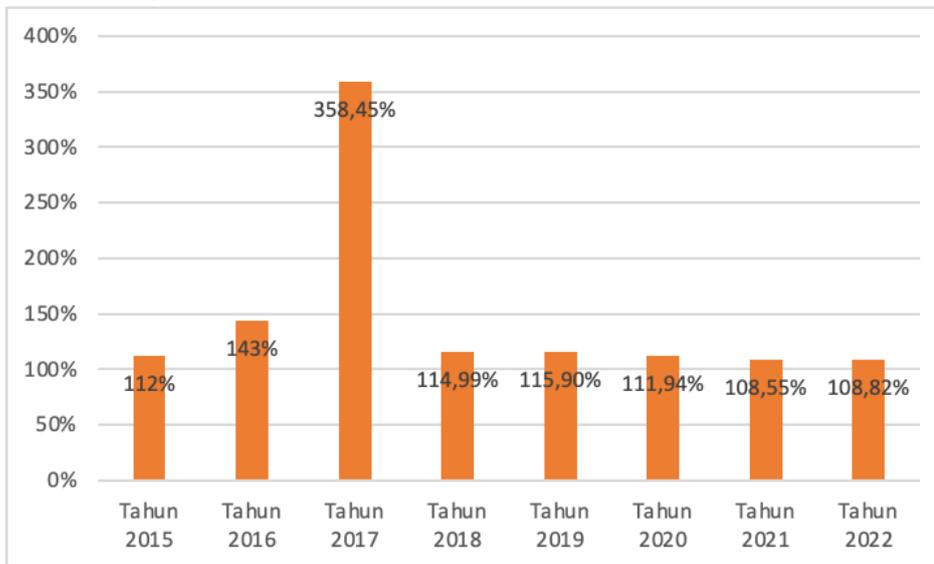
Berdasarkan Tabel 4.1, menunjukkan bahwa rata-rata *current ratio* (CR) pada segmen proyek infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk selama tahun 2015-2022 adalah sebesar 146,78%, nilai rasio tersebut dinilai kurang baik karena kurang dari standar nilai *current ratio* (CR) perusahaan konstruksi sebesar 200% atau 2 kali (Kasmir, 2015). Nilai *current ratio* (CR) tertinggi pada tahun 2017 sebesar 358,45% dan dinilai likuid, berarti setiap liabilitas atau hutang lancar Rp1 dijamin oleh aset lancar sebesar Rp3,58. Hal ini berarti pada tahun 2017 terjadi peningkatan nilai *current ratio* (CR) sebesar 215,12% dibandingkan tahun 2016. Kondisi ini disebabkan terjadinya kenaikan jumlah aset lancar pada tahun 2017 sebesar Rp14.121.247.717.170 dibandingkan jumlah liabilitas atau hutang lancar dari tahun sebelumnya. Kas dan setara kas merupakan aset lancar yang paling *liquid* dalam perusahaan selain piutang, walaupun untuk piutang sendiri meningkat dari tahun sebelumnya yang merupakan nilai negatif bagi perusahaan. Tersedianya aset lancar terutama kas dan setara kas serta piutang yang dimiliki perusahaan merupakan likuiditas yang menjamin untuk pembayaran hutang yang segera jatuh tempo atau hutang jangka pendek sehingga dapat terpenuhi. Sedangkan nilai *current ratio* (CR) terendah tahun 2021 dengan nilai *current ratio* (CR) sebesar 108,55% mengalami penurunan rasio dari tahun sebelumnya sebesar 3,39% berarti setiap kewajiban atau hutang lancar Rp1 dijamin oleh aset lancar sebesar Rp1,08. Kondisi ini disebabkan terjadinya peningkatan jumlah kewajiban atau hutang lancar Rp23.804.668.440.720 dibandingkan aset lancar dari tahun sebelumnya.

Penurunan nilai *current ratio* (CR) dikarenakan pinjaman terhadap bank meningkat dari periode sebelumnya.

Sementara itu nilai *current ratio* (CR) pada segmen proyek infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015 sebesar 112,28% berarti setiap liabilitas atau hutang lancar Rp1 dijamin oleh aset lancar sebesar Rp1,12. Pada tahun 2016 nilai *current ratio* (CR) pada segmen proyek infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 143,33% berarti setiap liabilitas atau hutang lancar Rp1 dijamin oleh aset lancar sebesar Rp1,43. Hal ini berarti pada tahun 2016 terjadi kenaikan nilai *current ratio* (CR) sebesar 31,05% dibandingkan tahun 2015. Kondisi ini disebabkan terjadinya peningkatan jumlah aset lancar Rp8.335.220.720.608 dibandingkan aset hutang atau liabilitas dari tahun sebelumnya. Selanjutnya, nilai *current ratio* (CR) segmen proyek infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk pada tahun 2018 sebesar 114,99% berarti setiap kewajiban atau hutang lancar Rp1 dijamin oleh aset lancar sebesar Rp1,14. Hal ini berarti pada tahun 2018 terjadi penurunan nilai *current ratio* (CR) sebesar 243,46% dibandingkan tahun 2017. Kondisi ini disebabkan terjadinya peningkatan jumlah liabilitas atau hutang lancar Rp9.823.292.547.370 dibandingkan aset lancar dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2019 nilai *current ratio* (CR) segmen proyek infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 115,90% berarti setiap liabilitas atau hutang lancar Rp1 dijamin oleh aset lancar sebesar Rp1,15. Hal ini berarti pada tahun 2019 terjadi kenaikan nilai *current ratio* (CR) sebesar 0,91% dibandingkan tahun 2018. Kondisi ini disebabkan terjadinya peningkatan jumlah aset lancar Rp16.697.812.262.398 dibandingkan hutang atau liabilitas lancar dari tahun sebelumnya. Kenaikan nilai *current ratio* (CR) dikarenakan adanya peningkatan dari aktiva lancar baik itu adanya penambahan kas yang diperoleh karena bertambahnya penjualan secara tunai ataupun karena pelunasan piutang, peningkatan piutang karena belum ditagih, dan peningkatan persediaan.

Sama halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, tahun 2020 nilai *current ratio* (CR) pada segmen proyek infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 111,94% berarti setiap liabilitas atau hutang lancar Rp1 dijamin oleh aset lancar sebesar Rp1,11. Hal ini berarti pada tahun 2020 terjadi penurunan nilai *current ratio* (CR) sebesar 3,96% dibandingkan tahun 2019. Kondisi ini disebabkan terjadinya peningkatan jumlah liabilitas atau hutang lancar Rp16.109.744.074.929 dibandingkan aset lancar dari tahun sebelumnya. Sedangkan nilai *current ratio* (CR) segmen proyek infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2022 sebesar 108,82% berarti setiap liabilitas atau hutang lancar Rp1 dijamin oleh aset lancar sebesar Rp1,08. Hal ini berarti pada tahun 2022 terjadi peningkatan nilai *current ratio* (CR) sebesar 0,27% dibandingkan tahun 2021. Kondisi ini disebabkan terjadinya peningkatan jumlah aset lancar sebesar Rp25.917.445.578.998 dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan semakin tinggi angka rasio, maka semakin baik karena perusahaan mampu

menjamin liabilitas lancarnya dengan aset lancar yang dimiliki perusahaan. Berikut merupakan grafik *current ratio* (CR) pada segmen proyek infrastruktur PT Adhi Karya (Persero) Tbk selama tahun 2015-2022,



Gambar 4.2 Kinerja Keuangan yang Diproksikan dengan *Current Ratio* (CR) PT Adhi Karya (Persero) Tbk

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2023)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa selama 8 tahun terakhir *current ratio* (CR) pada segmen proyek infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tidak memenuhi standar industri yang telah ditetapkan karena berada di bawah rata-rata standar industri konstruksi, namun jika dilihat dari *trend current ratio* (CR) selama tahun 2015-2022 tersebut memiliki nilai rata-rata 146,78% dalam kategori baik ($140 < x < 160$) artinya tersedia dana untuk membayar liabilitas atau hutang tahun berikutnya. Hal ini disebabkan karena PT. Adhi Karya (Persero) Tbk memiliki kas dan setara kas dalam jumlah yang besar sehingga dapat menutupi liabilitas atau hutang perusahaan karena perusahaan cenderung mengalokasikan dana perusahaan ke dalam kas dan setara kas dibandingkan dengan aset lancar lainnya. Berikut ini merupakan rasio kinerja keuangan lainnya yaitu *debt to aset ratio* (DAR) yang dijelaskan dibawah ini:

2. Kinerja Keuangan yang Diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR)

Debt to Asset Ratio (DAR) menunjukkan sejauh mana kemampuan total aset (total aktiva) untuk menutupi utang yang dimiliki oleh perusahaan. Berikut ini merupakan nilai *debt to asset ratio* (DAR) pada segmen proyek infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2022,

**Tabel 4.2 Kinerja Keuangan yang Diprosikan dengan
*Debt to Asset Ratio (DAR) Tahun 2015-2022***

Tahun	Total Liabilitas	Total Aset	<i>Debt to Asset Ratio (DAR) (%)</i>	Keterangan
2015	Rp8.852.254.725.269	Rp13.530.736.183.722	65,42	
2016	Rp9.695.895.119.968	Rp11.281.627.112.167	85,94	20,52
2017	Rp13.176.010.168.229	Rp27.645.565.698.420	47,66	-38,28
2018	Rp19.294.684.432.002	Rp25.209.601.880.940	76,54	28,88
2019	Rp25.615.108.006.621	Rp32.590.744.231.117	78,60	2,06
2020	Rp26.353.141.715.099	Rp32.749.010.654.980	80,47	1,87
2021	Rp15.781.572.000.532	Rp26.226.039.304.810	60,18	-20,29
2022	Rp17.110.311.372.300	Rp26.289.878.424.273	65,08	4,91
Rata-rata	Rp16.984.872.192.503	Rp24.440.400.436.304	70,00	

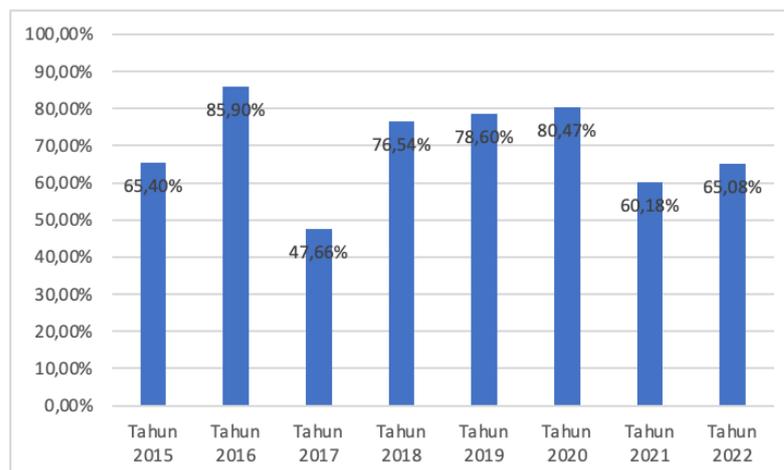
Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.2, menunjukkan bahwa rata-rata *debt to asset ratio* (DAR) pada segmen proyek infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk selama tahun 2015-2022 adalah sebesar 70% melebihi standar rata-rata industri konstruksi sebesar 35% (Kasmir, 2015). Nilai *debt to asset ratio* menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang berdasarkan aset dan modal yang dimiliki karena apabila angka *debt to asset ratio* (DAR) semakin kecil, maka semakin baik (*solvable*) serta disukai oleh kreditor dan investor dalam melihat kondisi keuangan dan kemampuan potensi perusahaan dimasa mendatang. Nilai *debt to asset ratio* (DAR) tertinggi pada tahun 2016 sebesar 85,94% artinya bahwa setiap hutang atau liabilitas sebesar Rp0,85 dijamin oleh Rp1 aset. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terjadi peningkatan nilai *debt to asset ratio* (DAR) sebesar 20,54% dari tahun 2015. Kondisi ini disebabkan terjadinya kenaikan total hutang atau liabilitas pada tahun 2016 sebesar Rp9.695.895.119.968 dibandingkan total aset pada tahun tersebut. Hal ini berdampak kurang baik terhadap perusahaan dikarenakan total hutang atau liabilitas semakin besar dibandingkan dengan total aset perusahaan. Sedangkan nilai *debt to asset ratio* (DAR) terendah pada tahun 2017 sebesar 47,66% artinya bahwa setiap hutang atau liabilitas sebesar Rp0,47 dijamin oleh Rp1 aset. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terjadi penurunan nilai *debt to asset ratio* (DAR) sebesar 38,28% dari tahun 2016. Kondisi ini disebabkan terjadinya kenaikan total aset pada tahun 2017 sebesar Rp27.645.565.698.420 yang dapat memenuhi kewajibannya berupa hutang yang dimiliki perusahaan. Hal ini berdampak baik terhadap perusahaan dikarenakan jumlah aset semakin besar dibandingkan dengan hutang perusahaan, dengan kata lain proporsi utang dalam pembiayaan untuk aset mengalami penurunan atau dapat dikatakan struktur modal perusahaan dalam keadaan aman.

Nilai *debt to asset ratio* (DAR) pada segmen proyek infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015 sebesar 65,42% artinya bahwa setiap hutang

atau liabilitas sebesar Rp0,65 dijamin oleh Rp1 aset. Nilai *debt to asset ratio* (DAR) pada tahun 2018 segmen proyek infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 76,54% artinya bahwa setiap hutang atau liabilitas sebesar Rp0,76 dijamin oleh Rp1 aset. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terjadi peningkatan nilai *debt to asset ratio* (DAR) sebesar 28,88% dari tahun 2017. Kondisi ini disebabkan terjadinya kenaikan total hutang atau liabilitas pada tahun 2018 sebesar Rp19.294.684.432.002 dibandingkan total aset pada tahun tersebut. Sedangkan nilai *debt to asset ratio* (DAR) pada segmen proyek infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2019 sebesar 78,60% artinya bahwa setiap hutang atau liabilitas sebesar Rp0,78 dijamin oleh Rp1 aset. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terjadi kenaikan nilai *debt to asset ratio* (DAR) sebesar 2,06% dari tahun 2018. Kondisi ini disebabkan terjadinya kenaikan total hutang atau liabilitas pada tahun 2019 sebesar Rp25.615.108.006.621.

Nilai *debt to asset ratio* (DAR) pada tahun 2020 segmen proyek infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 80,47% artinya bahwa setiap hutang atau liabilitas sebesar Rp0,80 dijamin oleh Rp1 aset. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terjadi peningkatan nilai *debt to asset ratio* (DAR) sebesar 1,87% dari tahun 2019. Kondisi ini disebabkan terjadinya kenaikan total hutang atau liabilitas pada tahun 2020 sebesar Rp26.353.141.715.099 dibandingkan total aset pada tahun tersebut. Tahun 2021 nilai *debt to asset ratio* (DAR) mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 20,29% yaitu menjadi 60,18% artinya bahwa setiap hutang atau liabilitas sebesar Rp0,60 dijamin oleh Rp1 aset. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan nilai *debt to asset ratio* (DAR) tahun 2021 disebabkan terjadinya penurunan total assets pada sebesar Rp26.226.039.304.810 dibandingkan total aset pada tahun tersebut. Sementara itu pada tahun 2022 segmen proyek infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 65,08% artinya bahwa setiap hutang atau liabilitas sebesar Rp0,65 dijamin oleh Rp1 aset. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terjadi peningkatan nilai *debt to asset ratio* (DAR) sebesar 4,91% dari tahun 2021. Kondisi ini disebabkan terjadinya kenaikan total hutang atau liabilitas pada tahun 2022 sebesar Rp17.110.311.372.300 dibandingkan total aset pada tahun tersebut. Berikut merupakan grafik *debt to asset ratio* (DAR) PT Adhi Karya (Persero) Tbk selama tahun 2015-2022,



Gambar 4.3 Kinerja Keuangan yang Diproksikan dengan *Debt to Asset Ratio* (DAR) PT Adhi Karya (Persero) Tbk

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2023)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa selama 8 tahun terakhir *debt to asset ratio* (DAR) pada segmen proyek infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dikatakan kurang baik karena berada di atas standar industri konstruksi yang telah ditetapkan sebesar 35% artinya banyak aset pada perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Hal ini karena PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dalam melakukan pembiayaan operasionalnya, perusahaan didominasi oleh utang dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya. Hal ini akan berdampak pada keberlangsungan hidup perusahaan. Berikut ini merupakan rasio kinerja keuangan lainnya yaitu *net profit margin* (NPM) yang dijelaskan dibawah ini:

3. Kinerja Keuangan yang Diproksikan dengan *Net Profit Margin* (NPM)

Net Profit Margin Ratio (NPM) menunjukkan sejauh mana kemampuan perusahaan melalui penjualan atau kegiatan utama untuk menghasilkan laba. Berikut ini merupakan nilai *net profit margin* (NPM) pada segmen proyek infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2022,

Tabel 4.3 Kinerja Keuangan yang Diproksikan dengan *Net Profit Margin* (NPM) Tahun 2015-2022

Tahun	Laba Bersih	Total Pendapatan	<i>Net Profit Margin Ratio</i> (NPM) (%)	Keterangan
2015	Rp456.720.299.816	Rp8.566.820.403.028	5,33	
2016	Rp209.994.520.993	Rp7.270.720.267.972	2,89	-2,44
2017	Rp831.349.973.661	Rp13.702.576.773.977	6,07	3,18
2018	Rp107.154.985.252	Rp8.558.826.642.380	1,25	-4,82
2019	Rp512.977.730.841	Rp116.013.421.710.124	0,44	-0,81
2020	Rp30.452.762.863	Rp8.961.503.792.262	0,34	-0,10
2021	Rp19.370.783.458	Rp11.019.389.442.508	0,18	-0,16
2022	Rp56.029.473.938	Rp12.346.654.762.262	0,45	0,28
Rata-rata	Rp278.006.316.353	Rp23.304.989.224.314	2,12	

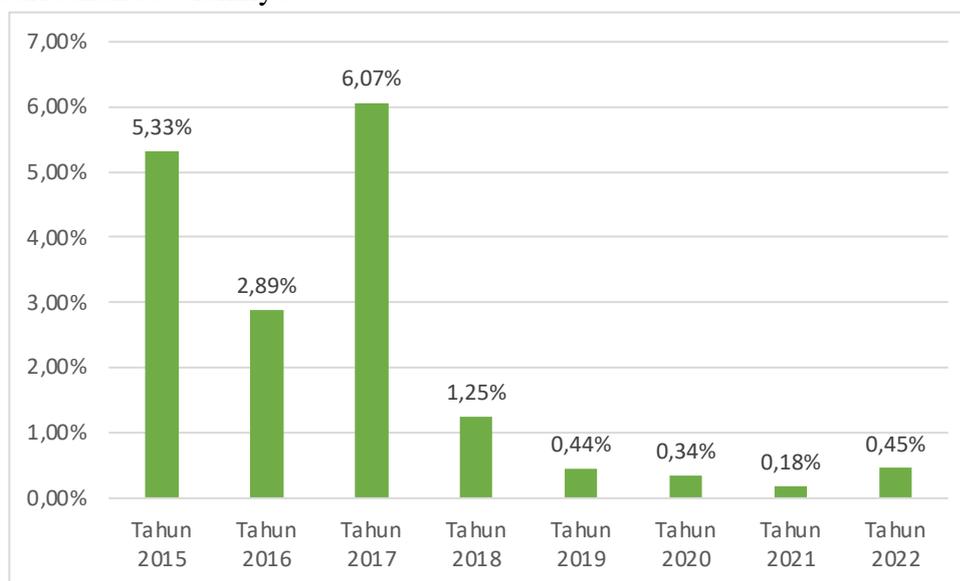
Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.3, menunjukkan bahwa rata-rata *net profit margin ratio* (NPM) pada segmen proyek infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk selama tahun 2015-2022 sebesar 2,12% atau kurang baik karena kurang dari standar rata-rata perusahaan konstruksi sebesar 20% (Kasmir, 2019). Hal tersebut karena kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang besar dibebani oleh penjualan dan beban bunga yang besar juga. Sedangkan semakin tinggi nilai profitabilitas suatu perusahaan menunjukkan semakin besar kemampuan perusahaan menggunakan sumber dananya yang berasal dari internal perusahaan berupa keuntungan dari operasi perusahaan. Nilai *net profit margin ratio* (NPM) tertinggi pada tahun 2017 sebesar 6,07% artinya bahwa setiap Rp1 penjualan yang dilakukan pada tahun 2017 dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,0607. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terjadi peningkatan *net profit margin ratio* (NPM) sebesar 3,18% dari tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan adanya kenaikan laba bersih tahun 2017 menjadi sebesar Rp831.349.973.661 dari tahun sebelumnya. Sedangkan nilai *net profit margin ratio* (NPM) terendah pada tahun 2021 sebesar 0,18% artinya bahwa setiap Rp1 penjualan yang dilakukan pada tahun 2021 dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,0018. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2021 terjadi penurunan *net profit margin ratio* (NPM) sebesar 0,16% dari tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan adanya penurunan laba bersih tahun 2021 menjadi sebesar Rp19.370.783.458 dari tahun sebelumnya.

Sementara itu nilai *net profit margin ratio* (NPM) pada segmen proyek infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015 sebesar 5,33% artinya bahwa setiap Rp1 penjualan yang dilakukan pada tahun 2015 dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,0533. Selanjutnya nilai *net profit margin ratio* (NPM) pada tahun 2016 sebesar 2,89% artinya bahwa setiap Rp1 penjualan yang dilakukan pada tahun 2016 dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,0289. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2016 terjadi penurunan *net profit margin ratio* (NPM) sebesar 2,44% dari tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan adanya penurunan laba bersih tahun 2016 menjadi sebesar Rp209.994.520.993 dari tahun sebelumnya. Nilai *net profit margin ratio* (NPM) pada tahun 2018 segmen proyek infrastruktur sebesar 1,25% artinya bahwa setiap Rp1 penjualan yang dilakukan pada tahun 2018 dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,0125. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terjadi penurunan *net profit margin ratio* (NPM) sebesar 4,82% dari tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan adanya penurunan laba bersih tahun 2018 menjadi sebesar Rp107.154.985.252 dari tahun sebelumnya.

Nilai *net profit margin ratio* (NPM) pada tahun 2019 segmen proyek infrastruktur sebesar 0,44% artinya bahwa setiap Rp1 penjualan yang dilakukan pada tahun 2019 dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,0044. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2019 terjadi penurunan *net profit margin ratio*

(NPM) sebesar 0,81% dari tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan adanya penurunan laba bersih tahun 2019 menjadi sebesar Rp512.977.730.841 dibandingkan pendapatan tahun sebelumnya. Sedangkan pada tahun 2020 nilai *net profit margin ratio* (NPM) sebesar 0,34% artinya bahwa setiap Rp1 penjualan yang dilakukan pada tahun 2020 dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,0034. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2020 terjadi penurunan *net profit margin ratio* (NPM) sebesar 0,10% dari tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan adanya penurunan laba bersih tahun 2020 menjadi sebesar Rp30.452.762.863 dari tahun sebelumnya. Tahun 2022 nilai *net profit margin ratio* (NPM) sebesar 0,45% artinya bahwa setiap Rp1 penjualan yang dilakukan pada tahun 2022 dapat menghasilkan laba bersih sebesar Rp0,0045. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terjadi kenaikan *net profit margin ratio* (NPM) sebesar 0,28% dari tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan adanya peningkatan laba bersih tahun 2022 menjadi sebesar Rp56.029.473.938 dari tahun sebelumnya.



Gambar 4.4 Kinerja Keuangan yang Diproksikan dengan *Net Profit Margin Ratio* (NPM) PT Adhi Karya (Persero) Tbk
Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2023)

Sehingga dapat disimpulkan bahwa selama 8 tahun terakhir *net profit margin ratio* (NPM) pada segmen proyek infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk memiliki nilai rasio yang fluktuatif tinggi dan rendah yang menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan tinggi dalam menggunakan sumber dananya yang berasal dari internal perusahaan berupa keuntungan dari operasi perusahaan. Namun nilai rasio tersebut belum memenuhi standar industri yang telah ditetapkan. Hal ini karena laba yang rendah menunjukkan harga pokok penjualan yang tinggi, yang dapat dikaitkan dengan kebijakan pembelian yang merugikan,

harga jual yang rendah, penjualan yang rendah, persaingan pasar yang ketat, atau kebijakan promosi penjualan yang salah.

4.2.2 Hasil Analisis Penerapan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 pada Proyek Pembangunan *Light Rail Transit (LRT) Jabodebek PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2015-2022*

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk adalah sebuah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di bidang konstruksi. PT. Adhi Karya (Persero) Tbk membagi segmen operasionalnya menjadi 4 (empat) segmen, yaitu segmen *engineering* dan infrastruktur, segmen properti dan *hospitality*, segmen manufaktur, segmen investasi dan konsesi. Analisis dan pembahasan kinerja keuangan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk yang disajikan dalam Laporan Tahunan telah mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian PT Adhi Karya (Persero) Tbk untuk tahun buku yang berakhir pada akhir periode yakni 31 Desember. Laporan keuangan konsolidasian tersebut disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (“DSAK”) Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan, serta keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-347/BL/2012 Tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

1. Mengidentifikasi Kontrak dengan Pelanggan

Kontrak konstruksi merupakan kontrak yang melaksanakan pendirian atau penambahan sebuah bangunan maupun bentuk lainnya (sarana dan prasarana) yang masa pengerjaannya dapat diselesaikan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pada tahap pertama ini bertujuan untuk mengetahui apakah kontrak atas konstruksi tersebut dapat diakui sesuai dengan PSAK 72 apabila dapat memenuhi keseluruhan kriteria yang dijelaskan pada paragraf 9, yaitu pihak-pihak yang terkait telah menyetujui dan bertanggung jawab dalam melaksanakan masing-masing kewajiban yang tertera dalam kontrak, dapat mengidentifikasi atas barang atau jasa yang akan dialihkan, kontrak memiliki substansi komersial yang merupakan perubahan resiko, waktu dan jumlah arus kas yang disebabkan oleh kontrak, serta besar kemungkinan entitas dapat menagih atau menerima hak imbalan atas pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Selanjutnya perusahaan dapat mengidentifikasi kontrak tersebut jika terjadi kombinasi atau modifikasi kontrak. Gabungan atau kombinasi kontraknya dapat terjadi jika gabungan beberapa kontak yang disepakati dalam waktu dan pelanggan yang sama dan dicatat sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal, serta jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak tergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain. Sehingga kontrak-kontrak tersebut diakui sebagai satu kontrak tunggal. Kontrak konstruksi

merupakan gabungan dari kontrak-kontrak yang berkaitan dalam proses pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi dengan pelanggan. Oleh karena itu kontrak konstruksi diidentifikasi sebagai kontrak tunggal yang memiliki tujuan komersial yang sama dan saling bergantung. Sedangkan modifikasi kontrak terjadi apabila pihak-pihak yang terkait dalam kontrak setuju akan perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak sehingga menimbulkan ketentuan baru atau mengubah ketentuan yang sudah ada atas hak dan kewajiban yang dapat dipaksakan oleh para pihak dalam kontrak.

PT. Adhi Karya (Persero) Tbk memiliki kebijakan terkait transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi. Transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi, yang dilakukan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, senantiasa memperhatikan prinsip kehati-hatian sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum dan telah memenuhi Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan, serta PSAK No. 7 tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi. Adapun transaksi material yang dilakukan Perseroan dengan pihak afiliasi/pihak berelasi, merupakan transaksi terkait kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan, dalam rangka menghasilkan pendapatan usaha dan dijalankan secara rutin, berulang, dan/atau berkelanjutan. Sepanjang tahun 2022, Perseroan tidak memiliki pelanggaran atas peraturan perundang-undangan terkait transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi/pihak berelasi. Perseroan telah melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, hal itu sesuai dengan PSAK 72, "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi". Berdasarkan Peraturan VIII.G.7, entitas berelasi dengan Pemerintah merupakan entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi secara signifikan oleh Pemerintah. Seluruh transaksi dengan pihak berelasi yang dilakukan pada tahun 2022 dilakukan secara wajar (*Arm's Length*) dan sesuai dengan persyaratan komersial normal.

Pendapatan yang berhubungan dengan kontrak konstruksi diakui sepanjang waktu yang dicatat dengan menggunakan metode persentase penyelesaian. Dengan metode ini, pendapatan yang diakui setara dengan estimasi terbaru dari total nilai kontrak dikalikan dengan tingkat penyelesaian sebenarnya yang ditentukan dengan mengacu pada hasil survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Pendapatan kontrak terdiri dari jumlah pendapatan semula yang disetujui dalam kontrak dan penyimpangan dalam pekerjaan kontrak, klaim, dan pembayaran insentif sepanjang hal ini memungkinkan untuk menghasilkan pendapatan dan dapat diukur dengan andal. Jika adanya kemungkinan bahwa kontrak akan menghasilkan kerugian pada saat penyelesaian kontrak, penyisihan atas kerugian yang diperkirakan hingga penyelesaian kontrak diakui sebagai penyisihan kini pada laporan keuangan konsolidasian. Kerugian diakui secara penuh ketika dapat diukur secara andal, terlepas dari tingkat penyelesaian.

- a. Biaya kontrak yang tidak mungkin dipulihkan diakui segera sebagai beban tahun berjalan pada laba rugi.
- b. Beban langsung dan beban tidak langsung proyek yang dapat dialokasikan ke suatu proyek tertentu, diakui sebagai beban pada proyek yang bersangkutan, sedangkan beban yang tidak dapat didistribusikan atau tidak dapat dialokasikan ke aktivitas proyek menjadi beban nonproyek (beban usaha).
- c. Pendapatan dari penjualan barang diakui pada suatu waktu tertentu saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan, yaitu pada saat penyerahan barang, atau dalam hal barang disimpan di gudang Grup atas permintaan pelanggan.
- d. Pendapatan dari penjualan aset *real estat* diakui pada suatu waktu tertentu saat pengendalian atas aset telah berpindah kepada pelanggan, yaitu saat terjadi penyerahan aset kepada pembeli.
- e. Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual), kecuali merupakan aset yang terkait dengan aktivitas kontrak masa depan.
- f. Biaya yang secara langsung berhubungan dengan kontrak, menghasilkan sumber daya untuk memenuhi kontrak ("biaya untuk memenuhi") atau penambahan untuk mendapatkan kontrak ("biaya untuk memperoleh") dan diharapkan dapat dipulihkan. Beban tersebut dengan demikian memenuhi syarat kapitalisasi berdasarkan PSAK 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan dicatat sebagai aset lancar lainnya. Beban tersebut diamortisasi dengan cara sistematis sejalan dengan penyerahan barang atau jasa yang terkait dengan aset tersebut.

2. Mengidentifikasi Kewajiban Pelaksanaan

Setelah mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, tahap selanjutnya yaitu menentukan kewajiban pelaksanaan. Dalam menentukan kewajiban pelaksanaan, entitas menilai sifat barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan menentukan apakah kewajiban pelaksanaan terhadap pengalihan barang dan atau jasa kepada pelanggan dapat dipenuhi sepanjang waktu atau pada waktu tertentu. Kewajiban pelaksanaan atas kontrak dengan pelanggan dalam penelitian ini merupakan jasa konstruksi.

Barang dan atau jasa yang dijanjikan pada kontrak bersifat dapat dibedakan atau tidak dapat dibedakan. Barang dan jasa bersifat dapat dibedakan dengan memenuhi dua kriteria yaitu pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa baik itu sendiri maupun bersama dengan sumber daya lain yang siap tersedia kepada pelanggan, dan janji entitas untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak. Pada jasa konstruksi salah satu kriteria di atas tidak dapat dipenuhi karena dalam penyediaan jasa tersebut perusahaan menggunakan beberapa jasa dan barang yang saling berhubungan satu sama lain dan memerlukan lebih dari satu fase, elemen atau unit sehingga *output* yang dihasilkan merupakan kombinasi atas barang dan jasa tersebut. Oleh karena itu pengalihan jasa

konstruksi tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, sehingga entitas mencatat seluruh barang dan jasa tersebut sebagai satu kesatuan kewajiban pelaksanaan (tunggal).

Setelah mengidentifikasi sifat barang dan jasa yang dijanjikan dalam kontrak, perusahaan menentukan apakah kewajiban pelaksanaan terhadap pengalihan barang dan atau jasa kepada pelanggan dapat dipenuhi sepanjang waktu atau pada waktu tertentu. Berdasarkan informasi yang terdapat pada Catatan Atas Laporan Keuangan PT Adhi Karya (Persero) Tbk melaksanakan kewajiban pelaksanaan atas jasa konstruksi yang diselesaikan sepanjang waktu. Dalam pemenuhan yang diselesaikan sepanjang waktu yang memenuhi 3 kriteria yaitu 1) pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan, dalam hal ini pelaksanaan jasa konstruksi tidak hanya dilakukan sekali setiap transaksi dimulai, tetapi proses tersebut rutin dilakukan hingga bangunan atau infrastruktur lainnya yang dijanjikan menjadi sebuah aset utuh atau telah rampung, oleh karena itu pelanggan memperoleh manfaat dari awal kegiatan pelaksanaan itu dilakukan hingga terpenuhinya proses penyelesaian yang dijanjikan. 2) Kinerja perusahaan menciptakan atau meningkatkan aset yang dikendalikan pelanggan, pada jasa konstruksi pengendalian atas aset merujuk pada kemampuan untuk mengarahkan penggunaan atas aset yang diperoleh dari pekerjaan dalam proses yang dilakukan sehingga terjadinya peningkatan atas hal tersebut. 3) Perusahaan memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan dari kinerja yang telah diselesaikan, dalam hal ini pelanggan wajib membayar seluruh tagihan yang diberikan entitas sesuai dengan perjanjian kontrak yang telah dilaksanakan. Dalam kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, PT Adhi Karya (Persero) Tbk mengukur kemajuan terhadap pelaksanaan kontrak jasa konstruksi dengan mengacu pada keadaan nyata atau fisik yang terjadi di lapangan.

3. Menentukan Harga Transaksi

Dalam menentukan harga transaksi, perusahaan harus memperhatikan syarat-syarat yang tertera pada kontrak dan praktik bisnis keseharian perusahaan. Harga transaksi berupa hasil yang diestimasi menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga (perpajakan). PT Adhi Karya (Persero) Tbk menentukan harga transaksi sesuai dengan ketentuan yang dijabarkan dalam kontrak dan praktik bisnis umum perusahaan.

4. Mengalokasikan Harga Transaksi Terhadap Kewajiban Pelaksanaan

Tahap selanjutnya setelah menentukan harga transaksi kontrak, entitas mengalokasikan harga kepada setiap kewajiban pelaksanaan. Pengalokasian harga transaksi bertujuan untuk dapat mengidentifikasi atas harga jual berdiri sendiri dari barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan sesuai yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan sehingga entitas dapat mengetahui masing-masing kewajiban pelaksanaan dan mengakui pendapatannya

berdasarkan kewajiban pelaksanaan tersebut. Pada tahap sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kewajiban pelaksanaan jasa konstruksi merupakan jasa yang tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, sehingga entitas tidak mengalokasikan harga transaksi pada tiap-tiap barang dan jasa yang digunakan dalam penyelesaian kontrak dikarenakan nilai transaksi pada kontrak konstruksi sudah merepresentasikan kewajiban pelaksanaan dari seluruh barang dan jasa.

5. Mengakui Pendapatan

Pada tahap ini entitas dapat mengakui pendapatannya setelah keempat tahapan yang dijelaskan sebelumnya telah terpenuhi. Berdasarkan dari penjelasan pada tahap sebelumnya, dalam kewajiban pelaksanaan yang dilakukan sepanjang waktu atas jasa konstruksi, PT Adhi Karya mengakui pendapatannya berdasarkan hasil fisik yang terjadi di lapangan sebagai pengukuran kemajuan dalam penyelesaian jasa konstruksi yang dijanjikan dengan pelanggan.

Dalam pendapatan kontrak dan biaya kontrak yang berhubungan dengan kontrak konstruksi yang telah diakui masing-masing sebagai pendapatan dan beban dicatat dengan memperhatikan tahap penyelesaian aktivitas kontrak pada tanggal akhir periode pelaporan menggunakan metode persentase penyelesaian. Persentase penyelesaian konstruksi ditetapkan berdasarkan survei atas pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Dalam rangka mendukung program-program pemerintah dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian melalui pengembangan infrastruktur di Indonesia, PT Adhi Karya (Persero) Tbk dipercaya pemerintah menggarap proyek- proyek yang tergolong dalam kategori Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu proyek-proyek yang dianggap strategis dan memiliki urgensi tinggi sehingga diberikan fasilitas-fasilitas kemudahan pelaksanaan proyek oleh pemerintah. Salah satu PSN yang dilaksanakan oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk adalah pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2015 untuk membangun prasarana LRT. Pemerintah menunjuk PT Adhi Karya (Persero) Tbk karena dinilai paling siap dalam membangun LRT Jabodebek. Berikut ini merupakan pengakuan pendapatan proyek Pembangunan LRT oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan nilai proyek sebesar Rp23.534.833.659.229 yang dibagi kedalam 2 (dua) jenis proyek yaitu proyek Pembangunan Prasarana LRT Terintegrasi Wilayah Jabodebek dengan nilai proyek Rp21.772.640.362.000 dan proyek Pembangunan Jalan LRT Terintegrasi Wilayah Jabodebek dengan nilai proyek Rp1.762.193.297.229,

Tabel 4.4 Progress Penyelesaian Kontrak Konstruksi Pembangunan Prasarana LRT Terintegrasi Wilayah Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2015-2022

Tahun	Nilai Kontrak	Biaya Konstruksi	Total Estimasi Biaya	Estimasi Laba	Persentase (%) Penyelesaian
2015	Rp21.772.640.362.000	Rp56.606.825.911	Rp20.903.284.879.566	Rp869.355.482.434	0,27
2016		Rp601.478.312.120	Rp20.903.284.879.566	Rp869.355.482.434	2,88
2017		Rp4.504.691.288.822	Rp20.903.284.879.566	Rp869.355.482.434	21,55
2018		Rp5.997.391.497.293	Rp20.903.284.879.566	Rp869.355.482.434	28,69
2019		Rp3.294.059.044.054	Rp20.903.284.879.566	Rp869.355.482.434	15,76
2020		Rp789.689.838.722	Rp20.903.284.879.566	Rp869.355.482.434	3,78
2021		Rp2.764.807.028.025	Rp20.903.284.879.566	Rp869.355.482.434	13,23
2022		Rp2.889.588.546.150	Rp20.903.284.879.566	Rp869.355.482.434	13,82
Total		Rp20.898.312.381.097	Rp20.903.284.879.566	Rp869.355.482.434	100

Sumber : PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Data diolah (2023)

Tabel 4.4 progress penyelesaian kontrak konstruksi Pembangunan Prasarana LRT Terintegrasi Wilayah Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) menggunakan metode persentase penyelesaian. Dari tabel tersebut diketahui persentase penyelesaian tahun 2015-2022 yang ditentukan dengan cara membandingkan biaya konstruksi dengan total estimasi biaya sebesar Rp20.903.284.879.566. Kemudian diperoleh juga data setiap bulan sebagai berikut :

Tabel 4.5 Pendapatan, Biaya dan Laba Kotor dari Proyek Pembangunan Prasarana LRT Terintegrasi Wilayah Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2015-2022

Periode	Sampai Periode	Diakui Periode Sebelumnya	Diakui Periode Saat ini
Tahun 2015			
Pendapatan	Rp58.786.128.977	-	Rp869.355.482.434
Biaya	Rp56.606.825.911	-	Rp56.606.825.911
Laba kotor	Rp2.179.303.066	-	Rp812.748.656.523
Tahun 2016			
Pendapatan	Rp685.838.171.403	Rp58.786.128.977	Rp627.052.042.426
Biaya	Rp601.478.312.120	Rp56.606.825.911	Rp544.871.486.209
Laba kotor	Rp84.359.859.283	Rp2.179.303.066	Rp82.180.556.216
Tahun 2017			
Pendapatan	Rp5.377.842.169.414	Rp685.838.171.403	Rp4.692.003.998.011
Biaya	Rp4.504.691.288.822	Rp601.478.312.120	Rp3.903.212.976.702
Laba kotor	Rp873.150.880.592	Rp84.359.859.283	Rp788.791.021.309
Tahun 2018			

Periode	Sampai Periode	Diakui Periode Sebelumnya	Diakui Periode Saat ini
Pendapatan	Rp11.624.412.689.27 ₂	Rp5.377.842.169.414	Rp6.246.570.519.858
Biaya	Rp5.997.391.497.293	Rp4.504.691.288.822	Rp1.492.700.208.471
Laba kotor	Rp5.627.021.191.979	Rp873.150.880.592	Rp4.753.870.311.387
Tahun 2019			
Pendapatan	Rp15.055.780.810.32 ₃	Rp11.624.412.689.27 ₂	Rp3.431.368.121.051
Biaya	Rp3.294.059.044.054	Rp5.997.391.497.293	-Rp2.703.332.453.239
Laba kotor	Rp11.761.721.766.26 ₉	Rp5.627.021.191.979	Rp6.134.700.574.290
Tahun 2020			
Pendapatan	Rp15.878.786.616.00 ₇	Rp15.055.780.810.32 ₃	Rp823.005.805.684
Biaya	Rp789.689.838.722	Rp3.294.059.044.054	-Rp2.504.369.205.332
Laba kotor	Rp15.089.096.777.28 ₅	Rp11.761.721.766.26 ₉	Rp3.327.375.011.015
Tahun 2021			
Pendapatan	Rp18.759.306.935.89 ₉	Rp15.878.786.616.00 ₇	Rp2.880.520.319.893
Biaya	Rp2.764.807.028.025	Rp789.689.838.722	Rp1.975.117.189.303
Laba kotor	Rp15.994.499.907.87 ₄	Rp15.089.096.777.28 ₅	Rp905.403.130.589
Tahun 2022			
Pendapatan	Rp21.768.285.833.92 ₈	Rp18.759.306.935.89 ₉	Rp3.008.978.898.028
Biaya	Rp2.889.588.546.150	Rp2.764.807.028.025	Rp124.781.518.125
Laba kotor	Rp18.878.697.287.77 ₇	Rp15.994.499.907.87 ₄	Rp2.884.197.379.904

Sumber : PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Data diolah (2023)

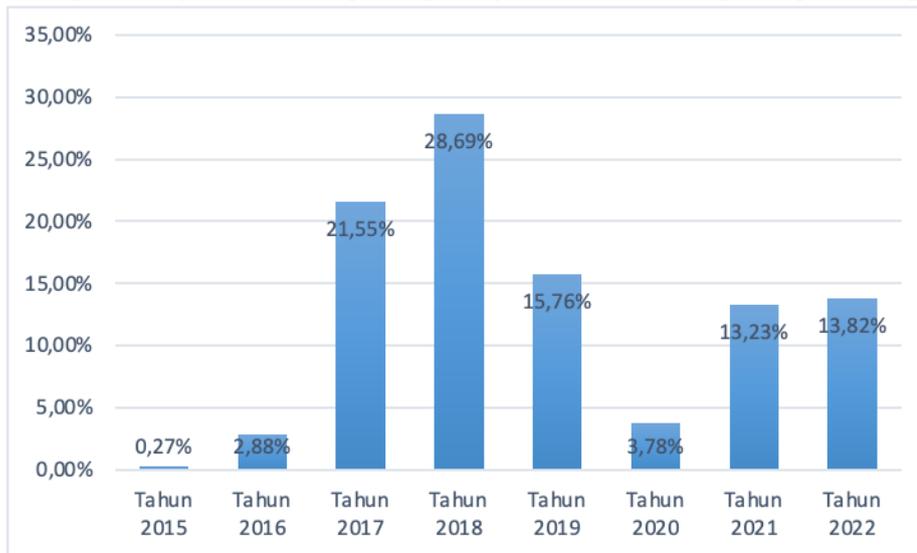
Berdasarkan Tabel 4.5 dapat dilihat bahwa persentase penyelesaian kontrak proyek konstruksi Pembangunan Prasarana LRT Terintegrasi Wilayah Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk selama tahun 2015-2022 sebesar 100% dari nilai kontrak sebesar Rp21.772.640.362.000 dari pemberi kerja Direktorat Jendral Perkreataapian Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Perhitungan pengakuan pendapatan yang diakui perusahaan konstruksi dilakukan setelah kontrak proyek selesai dilakukan. Pencapaian penyelesaian kontrak proyek konstruksi pembangunan prasarana LRT terintegrasi Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk tertinggi pada tahun 2018 sebesar 28,69% dengan nilai pendapatan yang diperoleh segmen proyek infrastruktur sebesar Rp6.246.570.519.858 artinya adanya peningkatan percepatan pengerjaan proyek pembangunan LRT terintegrasi Jabodebek sebesar 7,14% dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya pengebutan

pekerjaan proyek konstruksi pembangunan prasarana LRT terintegrasi Jabodebek untuk dilakukan uji coba kereta LRT pada bulan April 2018. Uji coba tahap awal tersebut dilakukan di lintas Cibubur - Cawang, yang progres konstruksinya paling maju dibandingkan dengan dua lintas lainnya. Sedangkan pencapaian penyelesaian kontrak proyek konstruksi pembangunan prasarana LRT terintegrasi Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk terendah pada tahun 2015 sebesar 0,27% dengan nilai pendapatan yang diperoleh segmen proyek infrastruktur sebesar Rp869.355.482.434. Nilai persentase tersebut masih rendah karena pada tahun tersebut proyek baru dimulai.

Pencapaian penyelesaian kontrak proyek konstruksi pembangunan prasarana LRT terintegrasi Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada tahun 2016 sebesar 2,88% dengan nilai pendapatan pada segmen proyek infrastruktur sebesar Rp627.052.042.426, persentase penyelesaian kontrak pada tahun 2016 tersebut masih rendah karena proyek pembangunan prasarana LRT Jabodebek sedikit terkendala masalah pembebasan lahan untuk depo di lahan seluas 10,5 hektare di Bekasi. Sementara itu pada tahun 2017 pencapaian penyelesaian kontrak proyek konstruksi pembangunan LRT terintegrasi Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 21,55% dengan nilai pendapatan segmen proyek infrastruktur sebesar Rp4.692.003.998.011, artinya adanya peningkatan percepatan pengerjaan proyek pembangunan prasarana LRT terintegrasi Jabodebek sebesar 18,67% dari tahun 2016. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2017 PT Adhi Karya (Persero) Tbk sedang melaksanakan percepatan pembangunan proyek LRT Jabodebek sepanjang 43,3 km dengan tiga lintas layanan, yaitu Cibubur – Cawang, Bekasi Timur – Cawang, dan Cawang – Dukuh Atas.

Sedangkan pencapaian penyelesaian kontrak proyek konstruksi pembangunan prasarana LRT terintegrasi Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada tahun 2019 sebesar 15,76% dengan nilai pendapatan sebesar Rp3.431.368.121.051 artinya adanya penurunan pengerjaan proyek pembangunan prasarana LRT terintegrasi Jabodebek sebesar 12,93% di tahun 2019. Hal tersebut dikarenakan kendala pembebasan lahan dan jumlah jam kerja yang terbilang singkat karena mempertimbangkan tingkat lalu lintas yang padat di wilayah Cawang-Dukuh Atas. Tahun 2020 pencapaian penyelesaian kontrak proyek konstruksi pembangunan prasarana LRT terintegrasi Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 3,78% dengan nilai pendapatan sebesar Rp823.005.805.684, artinya adanya penurunan progress pengerjaan proyek pembangunan prasarana LRT terintegrasi Jabodebek sebesar 11,98% dari tahun 2019. Pada tahun 2021 pencapaian penyelesaian kontrak proyek konstruksi pembangunan prasarana LRT terintegrasi Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 13,23% dengan nilai pendapatan pada segmen proyek infrastruktur sebesar Rp2.880.520.319.893, artinya adanya peningkatan percepatan pengerjaan proyek pembangunan prasarana LRT terintegrasi Jabodebek sebesar 9,45% dari tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan adanya percepatan pembangunan secara bertahap dalam penyelesaian tes sarana dan

tes konstruksi secara bersamaan. Semetara itu pada tahun 2022 pencapaian penyelesaian kontrak proyek konstruksi pembangunan prasarana LRT terintegrasi Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk sebesar 15,82% dengan nilai pendapatan segmen proyek infrastruktur sebesar Rp3.008.978.898.028, artinya adanya peningkatan percepatan pengerjaan proyek pembangunan LRT terintegrasi Jabodebek sebesar 0,59% dari tahun 2021. Hal tersebut dikarenakan adanya pengebutan pembangunan dalam persiapan uji coba akhir dan persiapan beroperasi.



Gambar 4.5 Progress Penyelesaian Kontrak Konstruksi Pembangunan Prasarana LRT Terintegrasi Jabodebek Tahun 2015-2022

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2023)

Selain proyek pembangunan prasarana LRT terintegrasi Jabodebek, PT Adhi Karya (Persero) Tbk juga mendukung peningkatan pertumbuhan perekonomian dan ditunjuk pemerintah dalam pembangunan percepatan jalan LRT terintegrasi Jabodebek selama tahun 2018-2020. Pembangunan jalan LRT oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk memiliki nilai proyek sebesar Rp1.762.193.297.229. Berikut ini progress penyelesaian kontrak konstruksi pada tahun 2018-2020.

Tabel 4.6 Progress Penyelesaian Kontrak Konstruksi Pembangunan Jalan LRT Terintegrasi Wilayah Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2018-2020

Tahun	Nilai Kontrak	Biaya Konstruksi	Total Estimasi Biaya	Estimasi Laba	Persentase (%) Penyelesaian
2018	Rp1.762.193.297.229	Rp451.416.564.312	Rp770.000.812.990	Rp992.192.484.239	58,63
2019		Rp247.939.928.047	Rp770.000.812.990	Rp992.192.484.239	32,20
2020		Rp70.639.020.119	Rp770.000.812.990	Rp992.192.484.239	9,17
Total		Rp769.995.512.478			100

Sumber : PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Data diolah (2023)

Tabel 4.6 progress penyelesaian kontrak konstruksi Pembangunan Jalan LRT Terintegrasi Wilayah Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) menggunakan metode persentase penyelesaian. Dari tabel tersebut diketahui persentase penyelesaian tahun 2018-2020 yang ditentukan dengan cara membandingkan biaya konstruksi dengan total estimasi biaya, kemudian diperoleh juga data setiap bulan sebagai berikut :

Tabel 4.7 Pendapatan, Biaya dan Laba Kotor dari Proyek Pembangunan Jalan LRT Terintegrasi Wilayah Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2015-2022

Periode	Sampai Periode	Diakui Periode Sebelumnya	Diakui Periode Saat ini
Tahun 2018			
Pendapatan	Rp1.033.094.031.161,36	-	Rp1.033.094.031.161
Biaya	Rp451.416.564.312	-	Rp451.416.564.312
Laba kotor	Rp581.677.466.849,01	-	Rp581.677.466.849
Tahun 2019			
Pendapatan	Rp1.600.600.171.873,10	Rp1.033.094.031.161	Rp567.506.140.711,74
Biaya	Rp247.939.928.047	Rp451.416.564.312	- Rp203.476.636.265,28
Laba kotor	Rp1.352.660.243.826,03	Rp581.677.466.849	Rp770.982.776.977,02
Tahun 2020			
Pendapatan	Rp1.761.840.858.569,55	Rp1.600.600.171.873	Rp161.240.686.696,45
Biaya	Rp70.639.020.119	Rp247.939.928.047	- Rp177.300.907.928,20
Laba kotor	Rp1.691.201.838.450,68	Rp1.352.660.243.826	Rp338.541.594.624,65

Sumber : PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Data diolah (2023)

Berdasarkan Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa persentase penyelesaian kontrak proyek konstruksi Pembangunan Jalan LRT Terintegrasi Wilayah Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk selama tahun 2018-2020 sebesar 100% dari nilai kontrak sebesar Rp1.762.193.297.229 dari pemberi kerja Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Perhitungan pengakuan pendapatan yang diakui perusahaan konstruksi dilakukan setelah kontrak proyek selesai dilakukan. Pencapaian penyelesaian kontrak proyek konstruksi pembangunan jalan LRT terintegrasi Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk tertinggi pada tahun 2018 sebesar 58,63% dengan nilai pendapatan yang diperoleh segmen proyek infrastruktur sebesar

Rp1.033.094.031.161. Hal tersebut dikarenakan adanya pengebutan pekerjaan proyek konstruksi pembangunan jalan LRT terintegrasi Jabodebek. Sedangkan pencapaian penyelesaian kontrak proyek konstruksi pembangunan jalan LRT terintegrasi Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk terendah pada tahun 2020 sebesar 9,17% dengan nilai pendapatan yang diperoleh segmen proyek infrastruktur sebesar Rp161.240.686.696,45. Nilai persentase tersebut masih rendah karena pada tahun tersebut proyek selesai dan akan dilakukan uji coba jalan.



Gambar 4.6 Progress Penyelesaian Kontrak Konstruksi Pembangunan Jalan LRT Terintegrasi Jabodebek Tahun 2015-2022

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2023)

4.2.3 Hasil Analisis Kinerja Keuangan Mempengaruhi Penerapan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 pada Proyek Pembangunan *Light Rail Transit (LRT) Jabodebek PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2015-2022*

Penguukuran kinerja keuangan dalam penelitian ini diukur berdasarkan *current ratio*, *debt to asset ratio* dan *net profit margin*. *Current ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan. Menunjukkan sejauh mana tagihan-tagihan jangka pendek dari para kreditur dapat dipenuhi dengan aktiva yang diharapkan akan dikonversikan menjadi uang tunai dalam waktu dekat. Nilai rata-rata *current ratio* (CR) pada segmen proyek infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2022 sebesar 146,78%, nilai tersebut dinilai kurang baik dalam membayar liabilitas atau hutang perusahaan karena perusahaan cenderung mengalokasikan dananya dalam bentuk kas dibandingkan asset lancar lainnya. *Current ratio* yang rendah menunjukkan adanya masalah dalam likuiditas karena mengalami permasalahan ekonomi tak terduga yaitu saat terjadinya pandemi *Covid-19* tahun 2019-2021, dalam

hal ini pandemi tersebut yang berdampak pada seluruh sektor usaha. Selain itu penurunan *current ratio* juga dapat disebabkan karena adanya penurunan aktiva lancar dan peningkatan hutang lancar. Penurunan aktiva lancar bisa disebabkan karena adanya pengurangan kas yang digunakan untuk melunasi hutang lancar ataupun untuk membeli bahan baku. Sedangkan peningkatan hutang lancar disebabkan karena perusahaan belum melunasi hutang lancarnya dan perusahaan menerima pinjaman dari kreditur. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa *current ratio* mampu menjelaskan perubahan laba yang terjadi dalam perusahaan hanya saja bagian dari *current ratio* tersebut tidak begitu besar, dimana nilai *current ratio* yang rendah cenderung akan meningkatkan perubahan pendapatan yang diakui oleh perusahaan.

Debt to asset ratio adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur sejauh mana suatu perusahaan menggunakan utang dalam membiayai asetnya. Rasio ini menunjukkan persentase total aset yang dibiayai oleh utang, baik utang jangka pendek maupun jangka panjang. *Debt to asset ratio* memiliki peranan penting karena dapat membantu para pemangku kepentingan, seperti investor, kreditur, dan manajemen, dalam menilai kesehatan keuangan perusahaan. Nilai rata-rata *debt to asset ratio* (DAR) pada segmen proyek infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2022 sebesar 70% dan dinilai kurang solvable. Jadi apabila *debt to asset ratio* perusahaan tinggi, artinya pendanaan dengan hutang semakin banyak, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi hutangnya yang dimilikinya dan sebaliknya. Semakin meningkat nilai *debt to asset ratio* maka semakin kecil kemungkinan pengakuan pendapatan akan meningkat. Nilai *debt to asset ratio* terhadap penerapan pengakuan pendapatan PSAK 72 yang tidak signifikan menunjukkan bahwa penerapan pengakuan pendapatan PSAK 72 tidak semata-mata dipengaruhi oleh *debt to asset ratio* yang merupakan pengukuran kemampuan perusahaan sejauh mana modal perusahaan dapat menutupi utang-utang kepada pihak luar. Hal ini pun mengindikasikan bahwa perusahaan belum secara optimal menggunakan utang yang akan menimbulkan beban bunga sebagai modal dalam meningkatkan pendapatan serta belum efektif dan efisien dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Jika beban perusahaan semakin tinggi maka *debt to asset ratio* semakin memburuk dan hal ini berdampak pada penurunan pengakuan pendapatan (Dewi, 2016).

Net profit margin merupakan rasio keuangan yang mengukur persentase laba yang diperoleh perusahaan sehubungan dengan pendapatannya. Dinyatakan sebagai persentase, ini menunjukkan berapa banyak laba yang dihasilkan perusahaan untuk setiap rupiah pendapatan yang dihasilkan. Pengukuran rasio ini bertujuan untuk melihat seberapa efektif perusahaan beroperasi. Nilai rata-rata *net profit margin ratio* (NPM) pada segmen proyek infrastruktur PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2022 sebesar 2,12% dan dinilai rendah atau semakin menurun menunjukkan bahwa kinerja perusahaan yang kurang baik dan kegiatan operasi perusahaan semakin

kurang efisien. Hal ini akan merugikan perusahaan karena akan sulit memperluas usahanya dan prestasi perusahaan juga dapat menurun dimasa yang akan datang. Berdasarkan hal tersebut dalam penelitian ini menunjukkan bahwa *net profit margin* tidak mewakili keseluruhan komponen perusahaan dalam pencapaian laba melainkan hanya dari penjualannya. Naiknya biaya perusahaan akan menyebabkan hasil penjualan yang diterima tidak sepadan dibandingkan biaya perusahaan dapat mengakibatkan timbulnya utang perusahaan. Pemberi proyek juga tidak terlalu mempertimbangkan *net profit margin* untuk memprediksikan proses penyelesaian proyek.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini membahas mengenai analisis kinerja keuangan dan penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 pada Proyek Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2022 sebagai salah satu perusahaan konstruksi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa :

1. Kinerja keuangan pada Proyek Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2022 dapat disimpulkan sebagai berikut:
 - a. *Current ratio* pada segmen proyek infrastruktur PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada tahun 2015-2022 dinilai kurang baik namun jika dilihat dari *trend* nilai *current ratio* termasuk dalam kategori sedang yang berarti perusahaan tersedia cukup dana untuk membayar liabilitas atau hutang tahun ditahun berikutnya karena perusahaan memiliki kas dan setara kas dalam jumlah yang besar sehingga dapat menutupi kewajiban atau hutang perusahaan dibandingkan dengan asset lancar lainnya.
 - b. *Debt to asset ratio* pada segmen proyek infrastruktur PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada tahun 2015-2022 dinilai kurang baik karena melakukan pembiayaan operasionalnya didominasi oleh hutang dibandingkan dengan sumber pembiayaan lainnya.
 - c. *Net profit margin* pada segmen proyek infrastruktur PT Adhi Karya (Persero) Tbk pada tahun 2015-2022 dinilai kurang baik karena laba rendah yang menunjukkan harga pokok penjualan yang tinggi, penjualan yang rendah, persaingan pasar yang ketat dan kebijakan promosi penjualan yang salah.
2. Penerapan pengakuan pendapatan PSAK 72 pada Proyek Pembangunan *Light Rail Transit* (LRT) Jabodebek PT. Adhi Karya (Persero) Tbk tahun 2015-2022 secara langsung berhubungan pada kontrak dengan pelanggan yang diakui perusahaan setelah kontrak proyek selesai dilakukan. Terjadinya kenaikan dan penurunan pengakuan pendapatan berdasarkan progress pencapaian proyek pembangunan LRT Jabodebek. Kenaikan progress penyelesaian proyek terjadi karena percepatan pekerjaan proyek sedangkan penurunan progress penyelesaian proyek terjadi karena adanya kendala dalam pembebasan lahan dan jam kerja pekerja proyek yang terbilang singkat karena mempertimbangkan tingkat lalu lintas yang padat.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dan kesimpulan yang diperoleh, penulis bermaksud untuk memberikan saran-saran yang mungkin dapat berguna bagi PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, yaitu sebagai berikut:

1. PT. Adhi Karya (Persero) Tbk yang menjadi objek penelitian sebaiknya berupaya memperhatikan rasio-rasio keuangannya seperti *current ratio*, *debt to asset ratio* dan *net profit margi* karena para investor dan pemilik proyek jasa kontraktor menggunakan rasio-rasio tersebut guna mempredik kemampuan perusahaan dalam menyelesaikan proyeknya dimasa yang akan datang, sehingga perusahaan mendapat keuntungan dan pemilik proyek dapat meminimalisir kerugian pada saat memutuskan untuk menggunakan jasa kontraktor pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk.
2. PT. Adhi Karya (Persero) Tbk, yaitu perusahaan perlu meningkatkan pendapatan dari sumber pendapatan selain pendapatan dari kontrak jangka panjang agar perusahaan dapat mempertahankan kinerja keuangannya tetap baik karena berdasarkan PSAK 72 pendapatan dari kontrak jangka panjang baru dapat diakui ketika kontrak selesai.
3. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah analisis yang digunakan untuk melihat dampak kinerja keuangan terhadap penerapan pengakuan pendapatan psak 72 dengan menggunakan jenis proyek lain dan perusahaan konstruksi lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Aflah, dan Taufikul Ichsan. (2022). Analisis Dampak Penerapan Pengakuan Pendapatan Jasa Konstruksi Berdasarkan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Subsektor Konstruksi yang Terdaftar di BEI Pada Masa Pandemi Covid 19. *Seminar Nasional Akuntansi dan Manajemen PNJ*. Vol. 3.
- Agustrianti, Wiliana, Ayunita Ajengtyas Saputri Mashuri, dan Anita Nopiyanti. (2022). Dampak Penerapan Psak 72 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Property, Real Estate and Building Construction Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2019. *Prosiding BIEMA (Business Management, Economic, and Accounting National Seminar)*. Vol. 1.
<https://doi.org/10.24127/diversifikasi.v2i3.1248>
- Aji, Mustiko dan Abdul Aziz. (2022) *Analisis dampak kinerja keuangan terhadap penerapan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK 72 perusahaan real estate di Indonesia yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2020*. Diss. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Arikunto, Suharsimi. (2019). *Prosedur Penelitian*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Astuti, Dewi. (2019). *Manajemen Keuangan Perusahaan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Darminto, Dwi Prastowo dan Rifka Julianty. (2019). *Analisis Laporan Keuangan : Konsep dan Manfaat*. Yogyakarta: AMP-YKPN.
- Dipohusodo, Istimawan. (2017). *Manajemen Proyek dan Konstruksi*. Yogyakarta: ANDI.
- Duli, Nikolaus. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif : Beberapa Konsep Dasar untuk Penulisan Skripsi dan Analisis Data dengan SPSS*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Ervianto, Wulfram. (2015). *Manajemen Proyek Konstruksi Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Fahmi, Irham. (2017). *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung : Alfabeta.
- Firmansyah, Amrie, dan Satya Budi Tama. (2021). Perbedaan perlakuan pendapatan dari kontrak dengan pelanggan sebelum dan sesudah penerapan PSAK 72 di Indonesia. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi* 5(3): 270-280.
- Halim, Claristy Novenaliane. (2020). *Pengaruh Implementasi Pengakuan Pendapatan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Real Estate Tahun 2018-2019)*. Diss. Universitas Brawijaya.

- Harahap, Sofyan syafri. (2018). *Analisis Kritis Laporan Keuangan Edisi 10*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Harmono. (2017). *Manajemen Keuangan Berbasis Balanced*. Jakarta: PT. Bumi Angkasa Raya.
- Harnanto. (2019). *Dasar-dasar Akuntansi Edisi ke 2*. Yogyakarta: ANDI
- Hery. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI). (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 72: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan*. Jakarta: IAI.
- Jogiyanto. (2017). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi (Edisi ke 10)*. Yogyakarta: BPFPE.
- Kasmir. (2019). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Kieso, D., Weygandt, J., & Warfield, T. (2014). *Intermediate Accounting: IFRS Edition*. New Jersey: John Wiley and Sons.
- Maith, Hendry Andres. (2015). Analisis Laporan Keuangan dalam Mengukur Kinerja Keuangan pada PT. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1.3.
- Matono, Nanang. (2018). *Metode Penelitian kuantitatif*. Jakarta : PT. Rajagrafindo Persada.
- Mulyadi. (2018). *System Informasi Akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir, Setia. (2018). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Muyassaroh, Siti. (2016). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Sukarela Laporan Keuangan pada Perusahaan yang Go Public di BEI. *Jurnal Fakultas Ekonomi*. Universitas Diponegoro. Semarang.
- Ng Eng Juan., dan Ersya Tri Wahyuni. (2016). *Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan Edisi 2*. Jakarta : 2012.
- Novianti, M.D. (2014). Penerapan Metode Pengakuan Pendapatan Kontrak Jangka Panjang pada PT. Adhi Karya Jaya Mandiri. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya..* 3.8 : 200-2014.
- Priyastama, Romie. (2017). *Buku Sakti Kuasai SPSS*. Yogyakarta: Start up.
- Putri, Bella Giovana. (2022). Analisis Rasio Keuangan untuk Mengukur Kinerja Keuangan. *Inspirasi: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 17.1 : 214-226.
- Rubianti, Nana. (2018). Analisa Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Perusahaan Pada PT. Admiral Lines Cabang Tanjung Pinang. *Jurnal*

Akuntansi. Tanjung Pinang: Fakultas Ekonomi Universitas Maritim Raja Ali Haji.

Rudianto. (2018). *Pengantar Akuntansi*. Jakarta : Erlangga.

Sarmanu. (2017). *Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Statistika*. Surabaya: Airlangga University Press.

Sartono. Agus. (2016). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi*. Edisi 4. Yogyakarta: BPFE.

Setiawan, Budi. (2016). *Menganalisis Statistik Bisnis dan Ekonomi dengan SPSS 21*. Yogyakarta: ANDI.

Sharawati, Dinastya. (2019). Analisis Laporan Keuangan Sebagai Alat Penilaian Kinerja Keuangan Pada Koperasi (Studi Pada Koperasi Universitas Brawijaya Malang Periode 2009- 2012). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. Vol. 06. No. 2.2

Solikhah, M., Susyanti, J., dan Wahono, B. (2017). Analisa Kinerja Keuangan Perusahaan Real Estate Dan Property Sebelum Dan Selama Diberlakukannya Pp No.34 Tahun 2016. *EJurnal Riset Manajemen Prodi Manajemen*, September, 13–28.

Sochib. (2018). *Pengantar Akuntansi*. Yogyakarta: Deepublish.

Sujarweni, V Wiratna. (2017). *Analisis Laporan Keuangan: Teori, Aplikasi dan Hasil Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: PT Alfabet.

Suryani dan Hendryadi. (2019). *Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana.

Ujiyantho dan Pramuka. (2016). Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan (Studi Pada Perusahaan Go Publik Sektor Manufaktur), *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X*. Makasar.

Umar, Bakry S. (2015). *Metodologi Penelitian: Kualitatif versus Kuantitatif, dalam Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

Veronica, Veronica, Utami Puji Lestari, dan Elisabeth Yansye Metekohy. (2019) Analisis Dampak Penerapan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Real Estat di Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018. *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar*. Vol. 10. No. 1.

Warsono, Sony. (2018). *Akuntansi Pengantar 1*. Yogyakarta: Graha Cendekia.

Wiagustini, Ni luh Putu. (2014). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Denpasar. Udayana University Press.

Wisnantiasri, Sila Ninin. Pengaruh PSAK 72: Pendapatan dari kontrak dengan Pelanggan Terhadap Shareholder Value. *Widyakala: Journal Of Pembangunan Jaya University* 5.1 (2018): 60-65.
<https://doi.org/10.36262/widyakala.v5i1.77>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Yulia

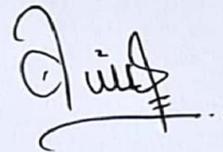
Alamat : Gg. Balai Desa Tajur Rt/Rw
002/005 Kelurahan Tajur
Kecamatan Kota Bogor Timur,
16141

Pendidikan

- SD : SDN Tajur 1
- SMP : SMP PGRI 1 Ciawi
- SMA : SMK Wikrama Bogor
- Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, 28 Juli 2023

Peneliti,



(Ayu Yulia)

Lampiran 1.**Data Keuangan Segmen Proyek Infrastruktur
PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Tahun 2015-2022**

Tahun	Aset Lancar	Liabilitas Lancar	Total Liabilitas	Total Aset	Laba Bersih	Total Pendapatan
2015	Rp4.634.556.299.628	Rp4.127.618.535.544	Rp8.852.254.725.269	Rp13.530.736.183.722	RP456.720.299.816	Rp8.566.820.403.028
2016	Rp8.335.220.720.608	Rp5.815.269.737.833	Rp9.695.895.119.968	Rp11.281.627.112.167	Rp209.994.520.993	Rp7.270.720.267.972
2017	Rp14.121.247.717.170	Rp3.939.532.098.581	Rp13.176.010.168.229	Rp27.645.565.698.420	Rp831.349.973.661	Rp13.702.576.773.977
2018	Rp11.295.662.893.890	Rp9.823.292.547.370	Rp19.294.684.432.002	Rp25.209.601.880.940	Rp107.154.985.252	Rp8.558.826.642.380
2019	Rp16.697.812.262.398	Rp14.406.964.929.169	Rp25.615.108.006.621	Rp32.590.744.231.117	Rp512.977.730.841	Rp116.013.421.710.124
2020	Rp18.032.768.792.573	Rp16.109.744.074.929	Rp26.353.141.715.099	Rp32.749.010.654.980	Rp30.452.762.863	Rp8.961.503.792.262
2021	Rp25.840.353.434.882	Rp23.804.668.440.720	Rp15.781.572.000.532	Rp26.226.039.304.810	Rp19.370.783.458	Rp11.019.389.442.508
2022	Rp25.917.445.578.998	Rp23.815.940.124.405	Rp17.110.311.372.300	Rp26.289.878.424.273	Rp56.029.473.938	Rp12.346.654.762.262
Rata-rata	Rp15.609.383.462.518	Rp12.730.378.811.069	Rp16.984.872.192.503	Rp24.440.400.436.304	Rp278.006.316.353	Rp23.304.989.224.314

Lampiran 2.

**Progress Penyelesaian Kontrak Konstruksi Pembangunan Prasarana
LRT Terintegrasi Wilayah Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk**

Tahun	Nilai Kontrak	Biaya Konstruksi	Total Estimasi Biaya	Estimasi Laba	Persentase (%) Penyelesaian
2015	Rp21.772.640.362.000	Rp56.606.825.911	Rp20.903.284.879.566	Rp869.355.482.434	0,27
2016		Rp601.478.312.120	Rp20.903.284.879.566	Rp869.355.482.434	2,88
2017		Rp4.504.691.288.822	Rp20.903.284.879.566	Rp869.355.482.434	21,55
2018		Rp5.997.391.497.293	Rp20.903.284.879.566	Rp869.355.482.434	28,69
2019		Rp3.294.059.044.054	Rp20.903.284.879.566	Rp869.355.482.434	15,76
2020		Rp789.689.838.722	Rp20.903.284.879.566	Rp869.355.482.434	3,78
2021		Rp2.764.807.028.025	Rp20.903.284.879.566	Rp869.355.482.434	13,23
2022		Rp2.889.588.546.150	Rp20.903.284.879.566	Rp869.355.482.434	13,82
Total		Rp20.898.312.381.097	Rp20.903.284.879.566	Rp869.355.482.434	100

Sumber : PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Data diolah (2023)

**Pendapatan, Biaya dan Laba Kotor dari Proyek Pembangunan
Prasarana LRT Terintegrasi Wilayah Jabodebek**

PERIODE	SAMPAI PERIODE	DIAKUI PERIODE SEBELUMNYA	DIAKUI PERIODE SAAT INI
Tahun 2015			
Pendapatan	Rp58.786.128.977	-	Rp869.355.482.434
Biaya	Rp56.606.825.911	-	Rp56.606.825.911
Laba kotor	Rp2.179.303.066	-	Rp812.748.656.523
Tahun 2016			
Pendapatan	Rp685.838.171.403	Rp58.786.128.977	Rp627.052.042.426
Biaya	Rp601.478.312.120	Rp56.606.825.911	Rp544.871.486.209
Laba kotor	Rp84.359.859.283	Rp2.179.303.066	Rp82.180.556.216
Tahun 2017			
Pendapatan	Rp5.377.842.169.414	Rp685.838.171.403	Rp4.692.003.998.011
Biaya	Rp4.504.691.288.822	Rp601.478.312.120	Rp3.903.212.976.702
Laba kotor	Rp873.150.880.592	Rp84.359.859.283	Rp788.791.021.309
Tahun 2018			
Pendapatan	Rp11.624.412.689.272	Rp5.377.842.169.414	Rp6.246.570.519.858
Biaya	Rp5.997.391.497.293	Rp4.504.691.288.822	Rp1.492.700.208.471
Laba kotor	Rp5.627.021.191.979	Rp873.150.880.592	Rp4.753.870.311.387

PERIODE	SAMPAI PERIODE	DIAKUI PERIODE SEBELUMNYA	DIAKUI PERIODE SAAT INI
Tahun 2019			
Pendapatan	Rp15.055.780.810.323	Rp11.624.412.689.272	Rp3.431.368.121.051
Biaya	Rp3.294.059.044.054	Rp5.997.391.497.293	-Rp2.703.332.453.239
Laba kotor	Rp11.761.721.766.269	Rp5.627.021.191.979	Rp6.134.700.574.290
Tahun 2020			
Pendapatan	Rp15.878.786.616.007	Rp15.055.780.810.323	Rp823.005.805.684
Biaya	Rp789.689.838.722	Rp3.294.059.044.054	-Rp2.504.369.205.332
Laba kotor	Rp15.089.096.777.285	Rp11.761.721.766.269	Rp3.327.375.011.015
Tahun 2021			
Pendapatan	Rp18.759.306.935.899	Rp15.878.786.616.007	Rp2.880.520.319.893
Biaya	Rp2.764.807.028.025	Rp789.689.838.722	Rp1.975.117.189.303
Laba kotor	Rp15.994.499.907.874	Rp15.089.096.777.285	Rp905.403.130.589
Tahun 2022			
Pendapatan	Rp21.768.285.833.928	Rp18.759.306.935.899	Rp3.008.978.898.028
Biaya	Rp2.889.588.546.150	Rp2.764.807.028.025	Rp124.781.518.125
Laba kotor	Rp18.878.697.287.777	Rp15.994.499.907.874	Rp2.884.197.379.904

Sumber : PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Data diolah (2023)

Lampiran 3.

**Progress Penyelesaian Kontrak Konstruksi Pembangunan Jalan LRT
Terintegrasi Wilayah Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk**

Tahun	Nilai Kontrak	Biaya Konstruksi	Total Estimasi Biaya	Estimasi Laba	Persentase (%) Penyelesaian
2018	Rp1.762.193.297.229	Rp451.416.564.312	Rp770.000.812.990	Rp992.192.484.239	58,63
2019		Rp247.939.928.047	Rp770.000.812.990	Rp992.192.484.239	32,20
2020		Rp70.639.020.119	Rp770.000.812.990	Rp992.192.484.239	9,17
Total		Rp769.995.512.478			100

Sumber : PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Data diolah (2023)

**Tabel 4.7 Pendapatan, Biaya dan Laba Kotor dari Proyek Pembangunan
Jalan LRT Terintegrasi Wilayah Jabodebek oleh PT Adhi Karya (Persero) Tbk**

PERIODE	SAMPAI PERIODE	DIAKUI PERIODE SEBELUMNYA	DIAKUI PERIODE SAAT INI
Tahun 2018			
Pendapatan	Rp1.033.094.031.161,36	-	Rp1.033.094.031.161
Biaya	Rp451.416.564.312	-	Rp451.416.564.312
Laba kotor	Rp581.677.466.849,01	-	Rp581.677.466.849
Tahun 2019			
Pendapatan	Rp1.600.600.171.873,10	Rp1.033.094.031.161	Rp567.506.140.711,74
Biaya	Rp247.939.928.047	Rp451.416.564.312	-Rp203.476.636.265,28
Laba kotor	Rp1.352.660.243.826,03	Rp581.677.466.849	Rp770.982.776.977,02
Tahun 2020			
Pendapatan	Rp1.761.840.858.569,55	Rp1.600.600.171.873	Rp161.240.686.696,45
Biaya	Rp70.639.020.119	Rp247.939.928.047	-Rp177.300.907.928,20
Laba kotor	Rp1.691.201.838.450,68	Rp1.352.660.243.826	Rp338.541.594.624,65

Sumber : PT Adhi Karya (Persero) Tbk, Data diolah (2023)